

**MEKANISME DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI PADA
MASYARAKAT PETANI DALAM PERSPEKTIF
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**
(Studi tentang pendistribusian pupuk subsidi oleh Dinas
Indagkop dan UKM Kab.Ponorogo)

SKRIPSI

**Diajukan untuk menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**IHWAN DADANG SETYO PRAYITNO
NIM : 0610313083**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
MALANG
2010**

MOTTO

*“Apabila kita lunak pada hidup maka
hidup akan “keras” pada kita ...
dan Apabila kita “keras” pada hidup
maka hidup akan lunak pada kita..... “*

--Andry Wongso--

*“..kalau mati , dengan berani;
kalau hidup dengan berani.Kalau
keberanian tidak ada itulah sebabnya
setiap bangsa asing bisa jajah kita ...”*

-- Pramodya Ananta Toer--

RINGKASAN

Ihwan Dadang , 2010. **Mekanisme Distribusi Pupuk Bersubsidi Pada Masyarakat Petani dalam perspektif Administrasi Pembangunan (Studi tentang pendistribusian pupuk subsidi oleh Dinas Indagkop dan UKM, Kab.Ponorogo).**Skripsi .Konsentrasi Administrasi Pembangunan.Jurusan Administrasi Publik. Universitas Brawijaya Malang.**Dosen Pembimbing (1) Prof.Dr.Agus Suryono, MS, (2) Drs.Abdullah Said,M.Si. 112+**

Pembangunan merupakan salah satu wujud dari kemauan dan kemampuan suatu negara untuk dapat lebih berkembang lagi kearah yang lebih maju. Begitu juga dengan apa yang diinginkan bangsa Indonesia untuk dapat melaksanakan pembangunan dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sederajat dan sejajar dengan bangsa – bangsa lain yang lebih maju. Pembangunan Pertanian merupakan salah satu wujud yang dilakukan dalam upaya bersama memajukan dunia pertanian yang terkadang dalam implementasinya di lapangan kurang optimal sehingga seringkali dalam realitanya banyak faktor yang mesti dibenahi agar kedepannya didapatkan suatu wujud dunia pertanian yang berkompeten dan yang dapat diandalkan oleh setiap warganya.Maka dalam hal ini perlu dikaji lebih lanjut tentang tataran daripada aspek –aspek yang dapat mendorong terciptanya pertanian yang lebih baik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk upaya pendistribusian pupuk bersubsidi oleh Dinas Industri ,Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah di daerah dalam proses Pendistribusian pupuk kepada masyarakat pertanian di Kabupaten Ponorogo , dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan faktor Penghambat dalam proses pendistribusian pupuk bersubsidi pada masyarakat pertanian di kawasan Kabupaten Ponorogo.1)Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, dan melakukan observasi serta mencari dokumen-dokumen yang terkait. Fokus dari penelitian ini antara lain: 1) Mekanisme Dalam Distribusi Pupuk subsidi pada masyarakat petani daerah khususnya kawasan Kabupaten Ponorogo secara umum diantaranya meliputi : a)Sosialisasi program Pupuk Bersubsidi. b)Kriteria pendistribusian pupuk subsidi di Kawasan Ponorogo.c) Mekanisme pendistribusian pupuk di Kabupaten Ponorogo.d) Proses distribusi pupuk subsidi bagi masyarakat pertanian.2) Peran pihak – pihak yang terkait dalam pendistribusian pupuk :a) Pihak Dinas Indagkop dan UKM.b)Pihak koperasi tani.c) Kelompok masyarakat tani.3) Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi .a)Faktor pendorong. b)Faktor penghambat. c)Upaya yang dilakukan dalam proses distribusi pupuk bersubsidi oleh pemerintah bagi masyarakat tani khususnya Kabupaten Ponorogo.

Dari hasil penelitian ini dapat diperoleh bahwa: 1) Mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi yang diperuntukan bagi masyarakat pertanian telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dengan mekanisme yang berlaku sesuai dengan peraturan pemerintah tentang pendistribusian pupuk bersubsidi .a) Dalam hal sosialisasi tentang program pendistribusian pupuk tersebut banyak dilakukan oleh banyak unsur antara lain pengecer ,distributor dan dari masyarakat tani itu sendiri. b) Mengenai kriteria yang ditetapkan tentang siapa saja yang

berhak memperoleh pupuk bersubsidi ialah mengenai kepemilikan lahan pertanian, dimana pemerintah memberi ketentuan luas lahan yang tidak lebih dari 25 hektar untuk pengajuannya. c) Untuk mendapatkan pupuk bersubsidi para petani hendaknya mempunyai bukti keanggotaan daripada Rencana Definitif Kerja Kelompok yang kedepanya hal itu digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi secara teroganisisr.2) Dalam upaya pendistribusian pupuk bersubsidi ,dalam hal ini pemerintah tidak bekerja sendirian tetapi banyak unsur yang mendukung terciptanya proses tersebut,antara lain dari pihak Dinas Industri Perdagangan dan Usah Kecil Menengah,Koperasi Tani dan Masyarakat Tani. a) Peran dari Dinas Industri dan Perdagangan ialah mengenai segala macam hal yang berhubungan dengan administasi yang menunjang kelancaran proses distribusi pupuk bersubsidi. b)Pihak lain yang mendukung daripada proses distribusi ialah dari pihak Koperasi Tani yang berada di kawasan Ponorogo.c) Unsur terakhir ialah dari kelompok tani sendiri,unsur ini dirasa sangat vital dikarenakan inilah pihak terakhir yang dapat merasakan sukses ataupun gagalnya program distribusi pupuk bersubsidi oleh pemerintah.3) Berbagai faktor mewarnai dalam hal faktor pendorong serta penghambatnya proses distribusi pupuk bersubsidi. a) salah satu faktor yang dapat dikatakan sebagai pendorong yang dilaksanakan ialah tahapan-tahapan proses pengajuan pupuk dengan sistem kelompok tani, hal ini apabila terus diperbaiki akan menghasilkan suatu sistem pengajuan pupuk bersubsidi yang terencana dengan baik. b) Sosialisasi merupakan hal yang dapat dikatakan sebagai penghambat daripada proses pendistribusian tersebut.hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang kurang paham akan tujuan proses tersebut.c) Upaya –upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengantisipasi hal tersebut ialah dengan melakukan sosialisasi terhadap komunitas masyarakat tani di daerah.

Terkait dengan hai itu, saran yang diberikan yaitu dalam kegiatannya hendaknya senantiasa memperhatikan komunikasi perlini dan kondisi masyatrkat tani yang berada di daerah ,hal ini dirasa penting sebab sampai tidaknya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat tergantung komunikasi yang dijalankan oleh pemerintah kepada masyarakatnya artinya dalam hal ini para petani yang menjadi sasaran dalam proses distribusi pupuk pertanian lebih diperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat, meskipun proses sosialisasi sudah berjalan dengan baik dan diterima masyarakat, tetapi hal ini perlu ditingkatkan karena dengan meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap proses distribusi pupuk bersubsidi maka hal itu akan lebih memperlancar daripada tujuaan yang ingin dicapai.Hal lain yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam upaya pendistribusian pupuk subsidi ialah meninjau kembali program pengajuan pupuk bersubsidi agar lebih mudah dalam syarat pengajuannya.Hal ini dirasa penting karena ukuran yang diperoleh oleh para petani tentang mudah atau sulitnya dalam pengajuan pupuk bersubsidi menjadi tolak ukur tersendiri untuk kesuksesan program pemerintah tersebut.

SUMMARY

Ihwan Dadang, 2010. **The distribution of Subsidized Fertilizer At Farmers Community Development Administration in perspective (Study on the distribution of fertilizer subsidy by the Department Indagkop and SMEs, Kab.Ponorogo).** Thesis. Pembangunan.Jurusan Administration Public Administration Concentration. UB Malang.**Dosen Advisors (1) Prof.Dr.Agus Suryono, SU, (2) Drs.Abdullah Said, M.Sc. 112 +**

Development is one manifestation of the willingness and ability of a country to be able to grow even more towards the more advanced. So also with what it wants the Indonesian people to be able to carry out development in order to create an equal society and parallel to the nations - other nations are more advanced. Agricultural development is one manifestation of which is done in joint effort to promote the agricultural world that sometimes in less than optimal implementation on the ground so usually in reality many factors that must be addressed for the future of the world get a form of agriculture that are competent and who can be relied upon by any people. So in terms of This needs to be further reviewed on the level than those aspects that can enhance the creation of better farming.

The purpose of this research is to know to describe and analyze the form of subsidized fertilizer distribution efforts by the Department of Industry, Trade and Small and Medium Enterprises in the region in the process of distribution of fertilizers to the agricultural community in Ponorogo, and to describe and analyze the factors supporting and Inhibiting factor in the distribution process subsidized fertilizer in the agricultural community in the region Ponorogo.1 District) This study uses qualitative research methods to the type of descriptive research techniques used in data collection interviews, observations, and conducting search-related documents. The focus of this research include: 1) The mechanism of the fertilizer distribution subsidies on local farming communities, especially the region in general Ponorogo among others include: a) Dissemination of subsidized fertilizer program. b) Criteria distribution of fertilizer subsidy in the Area Ponorogo.c) Mechanism of fertilizer distribution in the District Ponorogo.d) The distribution of subsidized fertilizer to society pertanian.2) The role of parties - parties involved in the distribution of fertilizer: a) The Department Indagkop and UKM.b) The cooperative farmer.c) Group peasant society .3) factors driving and inhibiting factors encountered. a) the driving factor. b) inhibiting factor. c) Efforts are made in the process of subsidized fertilizer distribution by the government for the people, especially farmers Ponorogo.

From the results of this study can be obtained that: 1) The distribution of subsidized fertilizer intended for the agricultural community in accordance with what has been determined that where in accordance with the prevailing mechanism in accordance with government regulations concerning the distribution of subsidized fertilizer. a) In the case of socialization of the program fertilizer distribution is mostly done by many other elements between retailers, distributors and from a farm community itself. b) Regarding the criteria of who is

entitled to subsidized fertilizer on agricultural land ownership, in which member governments the provision of land area not more than 25 hectares for submission. c) To get the subsidized fertilizer farmers should have proof of membership rather than a definitive plan of the Working Group in the future it is used as a reference to obtain subsidized fertilizer in teroganisir.2) In the distribution of subsidized fertilizer, in this government does not work, but many elements supporting the creation process, among others, from the Department of Trade and Industry I Need Small Medium Enterprises and Farmers Cooperative Farmers Society. a) The role of the Department of Industry and Trade is about all sorts of matters relating to the administration that support the smooth process of distribution of subsidized fertilizer. b) other parties that support rather than the distribution process is the part of the Cooperative Farm located in the region Ponorogo.c) The last element is from its own farmers' groups, this element is considered very vital because this is the last party that can feel the success or failure of subsidized fertilizer distribution program by pemerintah.3) Many of coloring factor in terms of driving factors and inhibiting the process of distribution of subsidized fertilizer. a) The one factor that can be said to be the driving force that carried out the stages of the process is the submission of fertilizer by farmers group system, it if continues to be improved will produce a system of subsidized fertilizer application well-planned. b) Socialization is a thing that can be said as a barrier rather than that process .Case of Distribution is because many people are less aware of the purpose of the proces.c) Efforts made by the government in anticipation of it is to disseminate the peasant communities in the area.

Related to the O's, the advice given is in its activities should always pay attention to communication piss of person and conditions cityzen farmer who was in the area, it is considered important because until at least the socialization of government to society depending on the communication that is run by the government to the people it means in this case the farmers which were targeted in the process of agricultural fertilizer distribution of more attention social conditions of local communities, although the process of socialization is going well and accepted by society, but this needs to be improved because of the increasing public participation in the process of distribution of subsidized fertilizer and it will more than the expedite the want another point.Hal needs to be done by the government in an effort to distribute fertilizer subsidy program is reviewing the filing of subsidized fertilizer to make it easier in terms program. Is considered important because of the size obtained by the farmers about the ease or difficulty in filing of subsidized fertilizer starting to separate measure for the success of these government programs.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb.

Puji syukur yang sebesar-besarnya kami panjatkan kepada Tuhan Allah atas karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan semaksimal mungkin. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya. Judul skripsi ini adalah “ **Mekanisme Distribusi Pupuk Bersubsidi pada masyarakat Petani Dalam Perspektif Adminstrasi Pembangunan (Studi tentang pendistribusian pupuk subsidi oleh Dinas Indagkop dan UKM Kab.Ponorogo)**”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa keterlibatan dari berbagai pihak yang berkenan membantu memberikan pemikiran, kritik, dan saran-saran, karena itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahku Suparno, dan Ibuku Suprihatin, terima kasih atas doa dan dukungannya yang dalam baik moral maupun materiil.
2. Bapak Prof.Dr.Agus Suryono ,M.S selaku Komisi pembimbing I atas masukan dan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs.Abdullah Said,M.Si selaku Komisi pembimbing II atas masukan dan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Soemartono.M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Publik atas segala ilmu yang diberikan.
6. Dinas Industri, Perdagangan dan Usaha kecil Menengah Kabupaten Ponorogo serta masyarakat tani kawasan Ponorogo terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya.
7. Teman-teman Kelas D angkatan 2006, terima kasih atas segala bantuan,kenangan, dan pengalamannya. kita takkan pernah lupa bahwa Sandung Ruwet a.k.a. S.R Crew adalah klas D.

8. Teman-teman Administrasi Publik angkatan 2006, terima kasih atas segala kenangannya.
9. Teman-teman (0352 series) Ursa Mayor 17 yang telah mendukung dalam penyelesaian karya ilmiah ini.kita adalah segalanya (Kholid, Rembol ,Uyab, Ko#dom, Somad, Zimbex,Toma, Kodok, Benjo,Bibien,Bonenk, Glocon,Rio)
10. Bapak Dr.Haryono beserta ibu yang baik hati..terima kasih atas bantuannya ,sehingga saya dapat singgah untuk belajar di Malang .
11. “Sk8 Crew Ponorogo” we always happy,wild,and brother.only sk8 can break my Heart ..“forever young..thanks for the good time,..
12. “Songgo langit “ serdadu – serdadu yang takkan lelah mencintai kehidupan,disanalah engkau ,aku, dia dapat melihat kehidupan, disanalah di AlamIndonesia
13. Orang-orang yang pernah singgah dihatiku, terima kasih atas semuanya, kalian adalah kenangan terindah yang takkan pernah aku lupakan.
14. Dan semua pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga ALLAH S.W.T. akan membalas budi baik semua pihak yang telah membantu pelaksanaan sampai dengan penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sudah berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh hasil yang terbaik namun apabila masih kurang sempurna penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi sempurnanya skripsi ini. Penulis juga memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah, itu semata-mata datang dari saya, dan jika ada yang bermanfaat itu semata-mata datang dari ALLAH.S.W.T Karena penulis menyadari bahwa penulis hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Akhir kata penulis mengharapkan banyak manfaat dari skripsi ini baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Amin

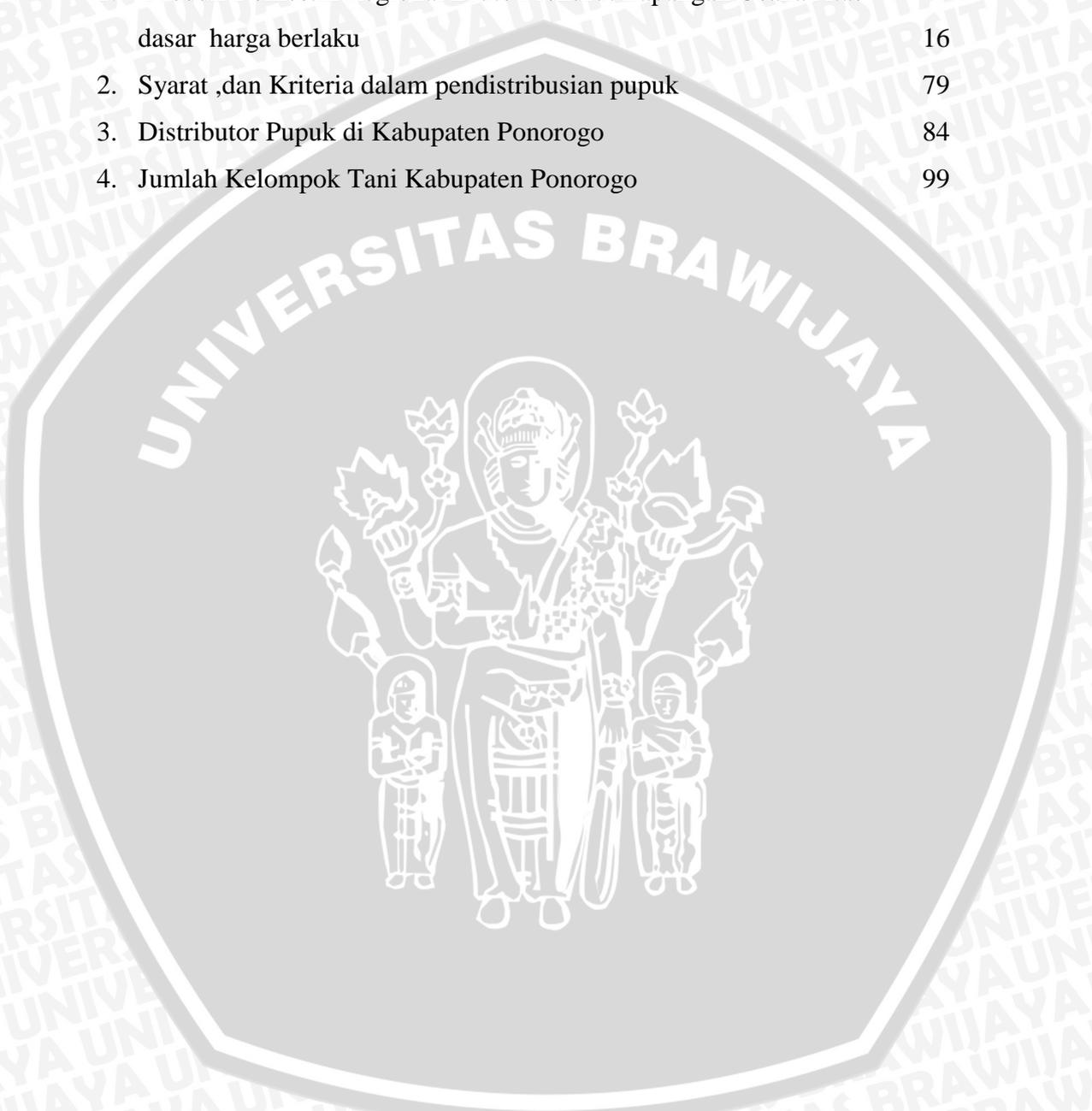
Wassalamualaikum wr. wb.

Terima Kasih

Malang, Oktober 2010
(Ihwan Dadang Setyo Prayitno)

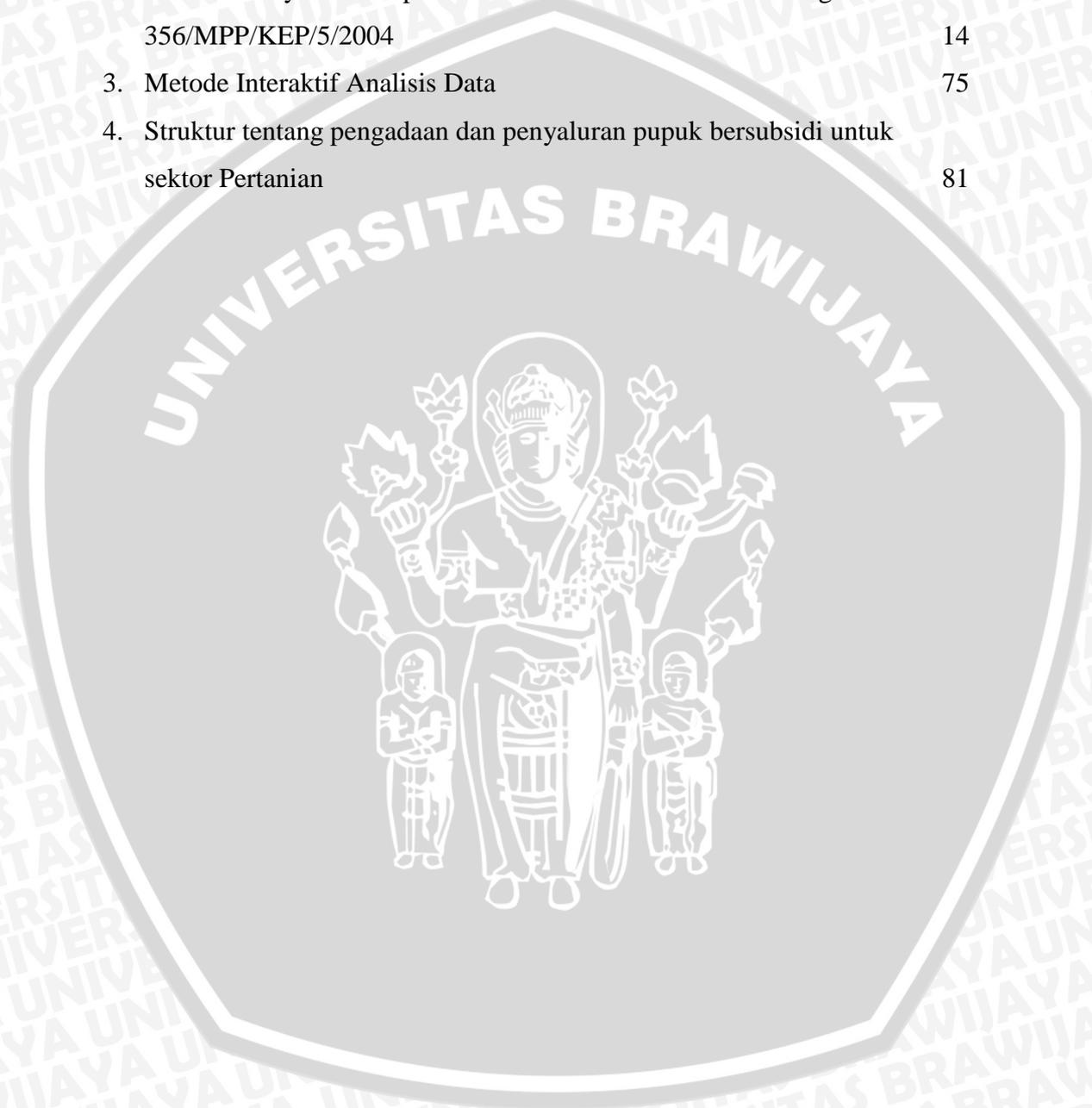
DAFTAR TABEL

	Hal.
1. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas dasar harga berlaku	16
2. Syarat ,dan Kriteria dalam pendistribusian pupuk	79
3. Distributor Pupuk di Kabupaten Ponorogo	84
4. Jumlah Kelompok Tani Kabupaten Ponorogo	99



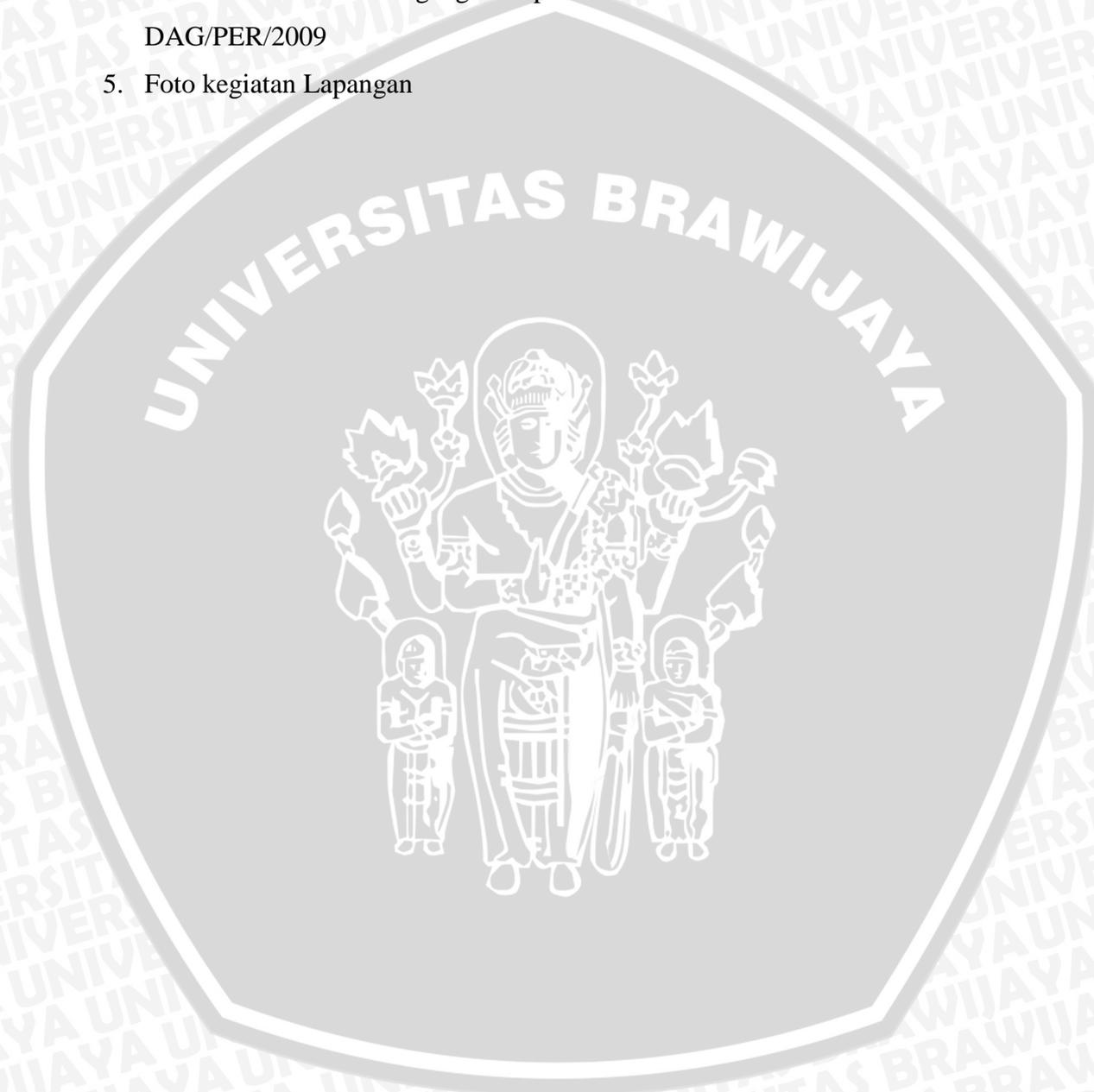
DAFTAR GAMBAR

	Hal.
1. Struktur Penyaluran Pupuk Berdasarkan SK Menteri Perindag Nomor : 378/MPP/KEP/8/1988	13
2. Struktur Penyaluran Pupuk Berdasarkan SK Menteri Perindag Nomor : 356/MPP/KEP/5/2004	14
3. Metode Interaktif Analisis Data	75
4. Struktur tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian	81



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Ijin Penelitian di Dinas Indagkop dan UKM Kabupaten ponorogo
2. Struktur organisasi Dinas Indagkop dan UKM Kabupaten Ponorogo
3. Panduan wawancara
4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor07/M-DAG/PER/2009
5. Foto kegiatan Lapangan



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang berkelanjutan dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik (Tjokrowinoto,1994:222).Pembangunan dilakukan dengan memaksimalkan potensi dan sumberdaya yang ada di sekelilingnya ,seperti sumber daya alam ,manusia ,dan teknologi untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam berbagai aspek ,baik dalam aspek ekonomi,politik, sosial, dan budaya .Untuk mencapai keberhasilan dalam setiap pelaksanaan pembangunan ternyata memerlukan adanya perencanaan yang disusun secara teliti dan sistematis sejak awal pelaksanaannya, dalam arti mampu untuk memperhitungkan segala aspek yang berkaitan dengan kelancaran proses pembangunan secara menyeluruh.

Sebagai Negara dengan tingkat ekonomi menengah Indonesia masuk ke dalam kategori Negara dunia ketiga.Pembangunan dunia ketiga selalu diawali dengan usaha peningkatan pendapatan masyarakat dengan jalan melakukan peningkatan pendapatan negara.Negara dunia ketiga sebagian merupakan Negara dengan basis perekonomian agraris ,termasuk dalam hal ini adalah Indonesia

Pembangunan yang dicita- citakan oleh bangsa Indonesia yaitu untuk menciptakan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik secara materiil maupun spirituil.Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan ,bangsa,

dan Negara untuk melaksanakan tugas yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia , memajukan kesejahteraan Umum , mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan ,perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Alam Indonesia memiliki potensi yang demikian besarnya pada sektor pertanian dan mayoritas penduduknya masih berpenghidupan dari sektor ini yaitu sekitar 63 % dari total penduduk seluruhnya , sehingga sudah sewajarnya apabila Indonesia disebut sebagai Negara agraris .Oleh karena itu sejak awal-awal pembangunan sektor pertanian telah dijadikan prioritas utama dalam pembangunan dan dikatakan sebagai sektor yang tangguh ,karena terbukti mengantarkan Indonesia menjadi Negara yang berswasembada beras pada tahun 1984 (Soekartawi,1995:2).Beberapa alasan yang mendasari pentingnya pembangunan pertanian di Indonesia adalah sebagai berikut :

- Potensi sumber daya yang besar dan beragam.
- Pangsa terhadap pendapatan nasional cukup besar.
- Besarnya pangsa terhadap ekspor nasional.
- Besarnya penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini.
- Peranan dalam penyediaan pangan masyarakat.
- Menjadi basis pertumbuhan di pedesaan .

1. Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Pertanian

Kegiatan pembangunan pertanian tahun dilaksanakan melalui tiga program, yaitu: (1) Program peningkatan ketahanan pangan, (2) Program pengembangan agribisnis, dan (3) Program peningkatan kesejahteraan petani. Operasionalisasi

program peningkatan ketahanan pangan dilakukan melalui peningkatan produksi pangan, menjaga ketersediaan pangan yang cukup aman dan halal di setiap daerah setiap saat, danantisipasi agar tidak terjadi kerawanan pangan. Operasionalisasi program pengembangan agribisnis dilakukan melalui pengembangan sentra/kawasan agribisnis komoditas unggulan. Operasionalisasi program peningkatan kesejahteraan petani dilakukan melalui pemberdayaan penyuluhan, pendampingan, penjaminan usaha, perlindungan harga gabah, kebijakan proteksi dan promosi lainnya (Departemen Pertanian, 2005c).

Studi komprehensif dari berbagai disiplin keilmuan membuktikan betapa proses perkembangan ekonomi-baik dalam arti sempit industrialisasi maupun arti luas modernisasi-yang terjadi sejak Revolusi Industri di Inggris telah menimbulkan kemerosotan peranan masyarakat tradisional (golongan petani di perdesaan) yang makin bertambah cepat. Sebagai akibatnya, ketika terjadi pertumbuhan ekonomi, peranan golongan petani semakin menciut, dan sebagai gantinya, peranan masyarakat modern semakin meningkat. Seajar dengan itu maka peranan golongan buruh industri, pedagang, pengusaha-pokoknya semua golongan masyarakat kota-juga semakin meningkat. Ditinjau dari struktur perekonomian nasional, sektor pertanian menempati posisi yang penting dalam kontribusinya terhadap PDB. Pada saat krisis, sumbangan sektor pertanian terhadap PDB mengalami peningkatan paling besar dibanding sektor lainnya. Dari segi penyerapan tenaga kerja, pada tahun 2003 sektor pertanian mampu menyerap sekitar 46 persen, paling tinggi di antara sektor-sektor lain (Yudhoyono, 2004). Disisi lain kita perlu mencermati menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional dimana mulai tahun 1969-1973 atau Pelita I kontribusi

sektor pertanian sebesar 33,69 %, sedangkan pada akhir tahun 2004 tercatat kontribusi sektor pertanian terhadap struktur perekonomian nasional sebesar 15,39% (Berita Resmi Statistik-BPS, 2004).

Sejak tanggal 1 Desember 1998, pemerintah menetapkan kebijakan penghapusan subsidi pupuk. Untuk mengkompensasi kenaikan harga pupuk akibat kebijakan tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan menaikkan harga dasar gabah kering giling dari Rp 1.000,- menjadi Rp 1.400-Rp 1.500 per kilogram; menurunkan tingkat bunga kredit KUT dari 14 persen menjadi 10,5 persen per tahun; dan menaikkan plafon kredit KUT dari Rp 1,496,- juta menjadi Rp 2 juta. Kebijakan penting lainnya yang merupakan topik bahasan dalam tulisan ini adalah kebijakan pemerintah melepaskan distribusi pupuk sesuai mekanisme pasar. Seperti diketahui bahwa selama ini distribusi pupuk di Indonesia merupakan monopoli PT. Pusri yang tergabung dalam satu *holding company* di mana Koperasi Unit Desa (KUD) terlibat dalam kegiatan distribusi pada Lini-IV.

Dengan kebijakan distribusi pupuk yang baru tersebut, setiap pelaku pasar bebas melakukan kegiatan impor dan distribusi pupuk hingga sampai ke petani. Permasalahannya adalah KUD selama ini merupakan lembaga yang terlibat dalam sistem distribusi pada Lini-IV akan menghadapi pesaing dari pelaku pasar lainnya dengan kemampuan modal dan manajemen yang relatif lebih baik dan berpengalaman. Di sisi lain, pemerintah telah menetapkan keberpihakannya terhadap KUD sebagai lembaga ekonomi yang diharapkan mampu mendorong pergerakan ekonomi rakyat, termasuk dalam kegiatan pengadaan sarana produksi pertanian di pedesaan.

Jika seandainya KUD tidak mampu bersaing, apakah hal tersebut akan dibiarkan saja oleh pengambil kebijakan, dalam hal ini pemerintah ? Jika tidak, upaya-upaya apa saja yang perlu diambil jika seandainya ada dampak negatif dari kebijakan di atas terhadap kinerja usaha KUD, khususnya dalam menjalankan fungsinya sebagai distributor pupuk dalam menopang pengadaan pangan selama ini.

2. Permasalahan Distribusi Pupuk

Pupuk merupakan salah satu sarana produksi pertanian utama untuk menghasilkan pangan utama di Indonesia, yaitu beras (gabah). Untuk dapat mengendalikan produksi gabah, pemerintah melakukan pengendalian terhadap kegiatan pengadaan dan distribusi sarana produksi pupuk. Oleh karena itu selain pengadaannya dilakukan melalui subsidi, distribusi pupuk dikendalikan melalui satu tangan yaitu melalui monopoli PT. Pusri. Dengan demikian diharapkan kemungkinan terjadinya gejolak harga dan kelangkaan pupuk dapat diantisipasi, sehingga pengadaan pangan nasional dapat dikendalikan.

Kebijakan subsidi terhadap biaya produksi merupakan upaya untuk meningkatkan produksi dan konsumsi masyarakat namun kebijakan ini masih tidak efisien jika dibandingkan dengan kondisi pasar bebas (*free trade*), karena terjadi distorsi alokasi sumberdaya yang digunakan. Kebijakan monopoli juga tidak efisien jika dibandingkan dengan kondisi pasar bebas. Hal ini disebabkan adanya *artificial scarcity* yang membuat seolah-olah produk yang dihasilkan menjadi langka, akibatnya harga produk pada pasar monopoli lebih tinggi dari harga pada pasar bebas (Handerson dan Quandt, 1980).

Tekanan lingkungan ekonomi internasional yang mengglobal dan upaya untuk meningkatkan efisiensi, mendorong pemerintah untuk menderegulasi kebijakan subsidi dan monopoli pengadaan dan distribusi pupuk ke arah mekanisme pasar. Menurut Tjiptoherijanto (1997), sistem ekonomi yang tertumpu pada mekanisme pasar yang terkendali merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan dan kebijakan yang dilakukan secara konsisten.

Penetapan kebijakan deregulasi subsidi dan monopoli distribusi pupuk dan melepaskannya pada mekanisme pasar, diduga akan memberatkan KUD yang selama ini merupakan pelaku ekonomi yang terlibat dalam kegiatan distribusi pupuk. Jika dampak kebijakan ini tidak diperhatikan, maka ada ketidak-konsistenan kebijakan, karena selama ini KUD merupakan lembaga ekonomi pedesaan yang diharapkan mampu menggerakkan ekonomi rakyat. Namun karakteristik lembaga ekonomi pedesaan ini antara lain adalah produktivitasnya rendah, modal kecil, menggunakan cara manajemen tradisional, oleh karena itu sulit bagi KUD untuk melakukan persaingan dalam arena ekonomi pasar bebas yang bersaing saat ini (Tjiptoherijanto, 1997).

Agar kebijakan tersebut tidak berdampak negatif pada KUD dan konsisten dengan kebijakan sebelumnya, yaitu memberdayakan ekonomi rakyat melalui koperasi, maka diperlukan kebijakan berikutnya yang berkaitan dengan fungsi KUD mendistribusikan pupuk kepada petani di wilayah kerjanya. Kebijakan tersebut hendaknya mampu memberdayakan KUD untuk dapat bersaing dengan pelaku pasar lainnya dalam kegiatan distribusi pupuk. Dengan demikian tidak terjadi ketidak-konsistenan kebijakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Karena pemerintah juga mempunyai fungsi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang diakibatkan oleh mekanisme pasar yang telah menyebabkan ketidakadilan dalam pembagian pendapatan (Komaruddin, 1993).

Ada anggapan, jika swasta diberikan kesempatan lebih luas, maka jangkauannya dalam memobilisasi sumberdaya ekonomi relatif lebih handal, sehingga pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan diharapkan jauh lebih meningkat. Namun banyak kasus, perusahaan-perusahaan swasta banyak yang tidak melaksanakan ketentuan upah minimum dan ada kecenderungan membentuk konglomerasi atau kartel (Fatich, 1997).

Dari uraian diatas ,ada beberapa aspek yang berkaitan dengan proses distribusi yang dilaksanakan pada penyaluran pupuk subsidi ke masyarakat.Itu ialah methode , suatu kegiatan apabila dikerjakan dengan menggunakan methode yang benar maka kedepannya hasil yang dapat tercapai akan memuaskan.Dari keenam methode manajemen tersebut ,unsur daripada methode sangat berperan penting disini.Oleh karena dalam penyaluran subsidi pupuk pada petani Pemerintah sangat memperhatikan methode apa yang digunakan agar program ini kedepannya berjalan lancar dan akan sangat membantu para petani di daerah.Methode distribusi dirasa mempunyai peranan yang vital,oleh karena dalam hal ini unsur distribusi mempunyai keterkaitan berjalan atau tidaknya program dari Pemerintah ini.

Sejumlah fakta menunjukkan bahwa keberadaan organisasi koperasi di sektor pertanian diakui atau tidak sangat membantu petani dalam proses produksi pangan baik padi maupun palawija. Keberhasilan program Bimas dan Inmas di masa lalu tidak terlepas dari peranserta koperasi/KUD sejak dari penyediaan

prasarana dan sarana produksi sampai dengan pengolahan hingga pemasaran produk.

Meskipun demikian kini terjadi perubahan seiring berlangsungnya era globalisasi dan liberalisasi ekonomi. Untuk lebih mendorong dan mempercepat pencapaian ketahanan pangan, pemerintah kini telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk penyaluran pupuk dan pengadaan beras. Pengambilan kebijakan ini dianggap perlu untuk mempermudah ketersediaan pupuk di lokasi petani dan penggunaannya dengan harga terjangkau, serta pengadaan gabah/beras yang menjamin persediaan Dalam Negeri. Diharapkan dengan kebijakan ini petani dapat meningkatkan produksi gabah mereka yang berarti pada satu sisi menjamin persediaan gabah/beras di dalam Negeri dan pada sisi lain meningkatkan income mereka. Sementara di sisi pengadaan, dengan kewenangan luas yang diberikan kepada berbagai lembaga untuk terlibat dalam pengadaan pangan akan menjamin stabilitas persediaan Dalam Negeri.

Secara umum, tujuan kebijakan yang diambil adalah baik, tetapi beberapa konsekuensi kini mulai muncul. Sebagai contoh, kebijakan penyaluran pupuk (Kepmen Perindag Nomor : 356/MPP/KEP/5/2004) memberikan kewenangan pada pihak-pihak swasta dan koperasi/KUD sebagai penyalur/pengecer pupuk ke konsumen. Berbeda dengan kebijakan sebelumnya (Kepmen Perindag Nomor : 378/MPP/KEP/8/1998), kebijakan baru ini tidak lagi memberikan kewenangan penuh kepada koperasi/KUD untuk menyalurkan pupuk, yang berarti peran koperasi/KUD dalam penyaluran pupuk kini menurun. Perubahan kebijakan ini memiliki konsekuensi dalam jangka pendek mengganggu sistem distribusi pupuk yang selanjutnya mengganggu ketersediaan pupuk bagi para petani. Kekurangan

ketersediaan pupuk akan mengganggu produksi gabah petani. Kekurangan ketersediaan pupuk dan penurunan produksi gabah merupakan dua aspek yang saling mengikat. Karena itu kekurangan pupuk sudah tentu mengancam produksi petani, dan selanjutnya kekurangan beras mengancam ketahanan pangan yang akan berlanjut pada akibat kerawanan sosial. Penurunan kuantitas produksi petani berarti juga penurunan pendapatan mereka dan menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani menurun. Secara nasional, penurunan produksi beras di satu sisi dan peningkatan permintaan beras di sisi lain akan membuka kran impor. Dalam jangka pendek impor beras berguna mengatasi kekurangan persediaan dalam negeri, tetapi dalam jangka panjang menguras sumberdaya domestik (menguras devisa) dan melemahkan stabilitas nasional.

Konsekuensi perubahan kebijakan yang mengganggu sistem distribusi pupuk akan terlihat pada ketidaklancaran distribusi pupuk itu sendiri. Pemberian kebebasan kepada berbagai pihak untuk menyalurkan pupuk di satu sisi sementara di sisi lain pupuk sendiri merupakan “input/barang publik”, akan merugikan individu masyarakat (petani) yang menggunakannya secara enam tepat. Hal ini muncul disebabkan karena terjadi monopoli dan tindakan-tindakan lainnya untuk mengambil keuntungan sendiri dan merugikan para pelaku lain. Hal ini nyata dan telah dirasakan oleh petani yang kesulitan mendapat pupuk dengan harga di atas HET (Harga Eceran Tertinggi). Di sisi lain koperasi/KUD yang terkena dampak kebijakan tersebut telah menghadapi kondisi “*idle capacity*.” Indikasi *idle capacity* koperasi juga terlihat pada penurunan jumlah koperasi yang berfungsi melayani kegiatan pengadaan pangan. Keseluruhan konsekuensi ini menunjukkan

repository.ub.ac.id

bahwa perubahan suatu kebijakan dapat menguntungkan sebagian pelaku tetapi juga merugikan pelaku lain.

Perubahan perilaku para pelaku pasar terlihat dari berubahnya keputusan-keputusan mereka dan teridentifikasi dalam aspek-aspek seperti terjadi *excess demand* dan *shortage supply* atau sebaliknya, harga pasar yang meningkat atau menurun, serta peningkatan atau penurunan fungsi kedua pelaku beserta lembaga yang membawahnya. Selalu terdapat konsekuensi dari intervensi pemerintah ke pasar melalui kebijakan yang diambil, tetapi yang terpenting adalah tujuan yang hendak dicapai. Jika tujuannya adalah peningkatan produksi untuk menjaga stabilitas

Dalam rangka pembangunan pertanian secara keseluruhan meningkatkan produktivitas dan produksi komoditi pertanian, pemerintah merasa perlu untuk menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani. Penjaminan pemerintah ini memenuhi prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu. Beberapa kebijakan pemerintah dalam penyaluran pupuk antara lain Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 378/MPP/KEP/8/1998 memberikan kewenangan penuh kepada koperasi/KUD menyalurkan pupuk hingga ke petani.

Kebimbangan dalam menentukan harga pupuk, disebabkan pula oleh faktor subsidi pupuk. Sampai sekarang ini pemerintah tetap memberikan subsidi untuk pupuk, meskipun banyak diprotes oleh pihak luar negeri. Pihak luar negeri wajar sekali mengkritik kita dengan pemberian subsidi, karena ideologi yang dipegang mereka dengan perdagangan bebas, anti subsidi dan segala hal yang

menghalangi rintangan untuk liberalisasi pasar. Meskipun begitu mereka tidak konsisten, karena sampai sekarang para petaninya masih tetap disubsidi

Subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada konsumen tentunya dengan tujuan untuk membantu petani dalam meringankan biaya produksi, sehingga terbantu untuk giat berproduksi karena keuntungan yang diperoleh sangatlah wajar. Apabila keuntungan yang diperoleh memuaskan, maka tingkat kesejahteraan dapat meningkat dan sebagai indikator keberhasilan pembangunan.

Tujuan pemberian subsidi yang sangat mulia, tetapi dalam realisasinya banyak mengalami penyimpangan. Hal ini disebabkan karena faktor kelembagaan dalam perpupukan di Indonesia. Jika dilihat dari teori ekonomi khususnya teori ekonomi mikro, maka struktur pasar produksi pupuk adalah oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang dikuasai oleh beberapa penjual. Seandainya dari masing-masing penjual mengadakan kerja sama dalam produksi dan penetapan harga, maka perilakunya berubah menjadi pasar monopoli. Pasar monopoli yang terkenal cirinya *price maker*, maka penetapan harganya dapat merugikan konsumen.

Struktur pasar oligopoli ditunjukkan oleh jumlah produsen pupuk sampai saat ini sebanyak 6 (enam) perusahaan. Produksi pupuk di Indonesia dilakukan oleh PT Pupuk Kaltim (4 pabrik), PT Pupuk Sriwijaya(4 pabrik), PT Pupuk Iskandar muda, PT Pupuk Kujang , PT Petrokimia Gresik dan PT ASEAN Aceh Fertilizer (masing-masing 1 pabrik).

Subsidi pupuk selama ini diberikan kepada pihak produsen, sementara pemerintah menentukan HET (Harga Eceran Tertinggi). Transparansi dalam produksi dan biaya produksi pupuk diragukan kebenarannya, sehingga harga yang

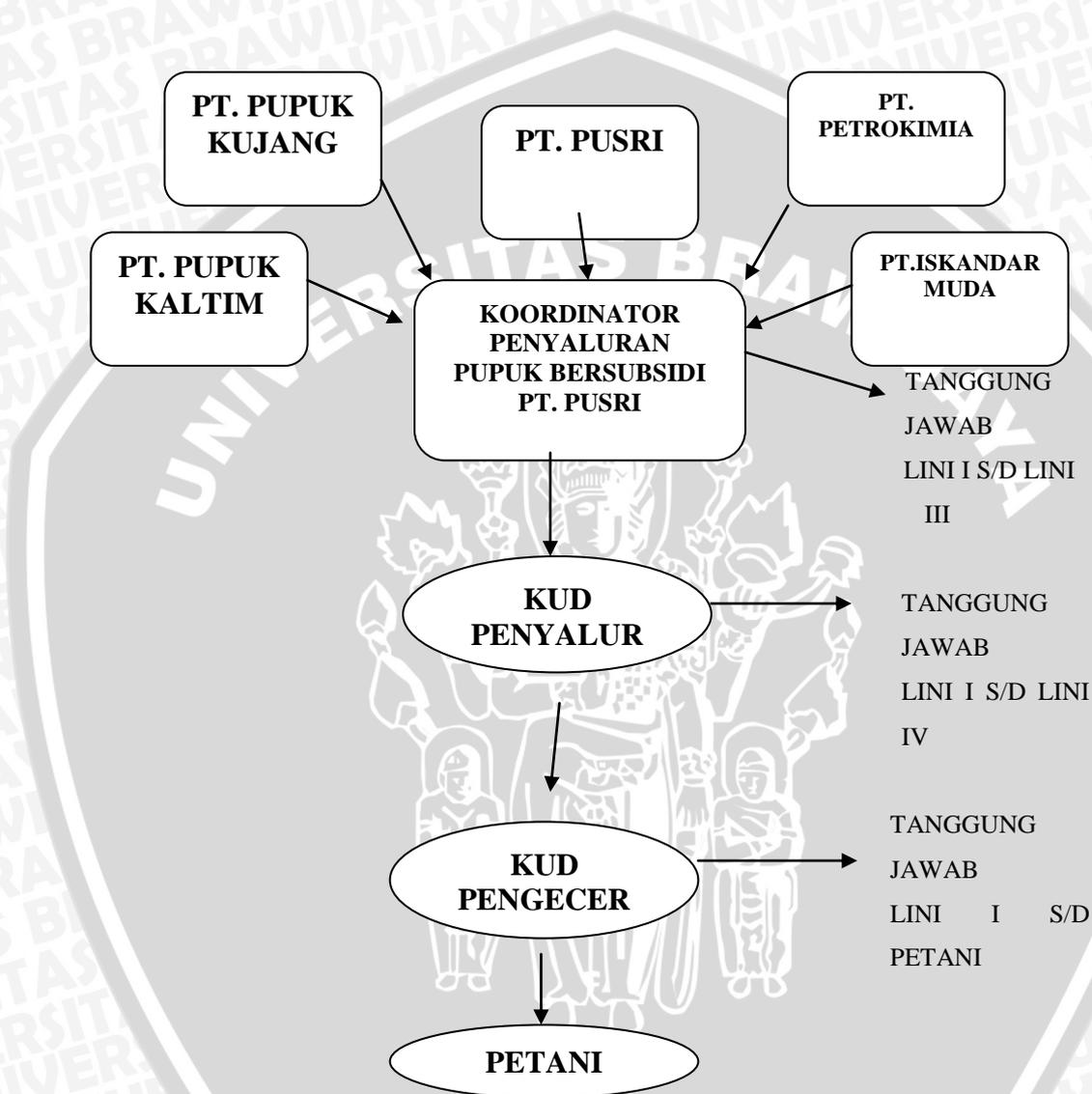
ditetapkan produsen dapat lebih tinggi dari semestinya. Saat ini pola distribusi dan penjualan pupuk dilakukan oleh PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) sebagai suatu *holding company* dari seluruh BUMN pupuk di tanah air. Pola distribusi pupuk dari Lini I (Pabrik-Pelabuhan) ke Lini II (Pelabuhan-UPP) dan ke Lini III (Distributor Kabupaten) dilaksanakan oleh PT Pusri. Dalam pelaksanaan distribusi dan penjualan pupuk, PT Pusri bermitra dengan penyalur yang terdiri dari koperasi, BUMN dan swasta lainnya. PT Pusri juga melakukan penjualan kepada penyalur di Lini II/UPP dan lini III /kabupaten. Sedangkan penjualan dari lini III ke lini IV/kecamatan dilakukan oleh penyalur, dan penjualan kepada petani dilakukan oleh pengecer di lini IV. Tetapi dalam kondisi tertentu, PT Pusri dapat menjual langsung ke pengecer dan kelompok tani.



Gambar I.

Struktur Penyaluran Pupuk Berdasarkan SK Menteri

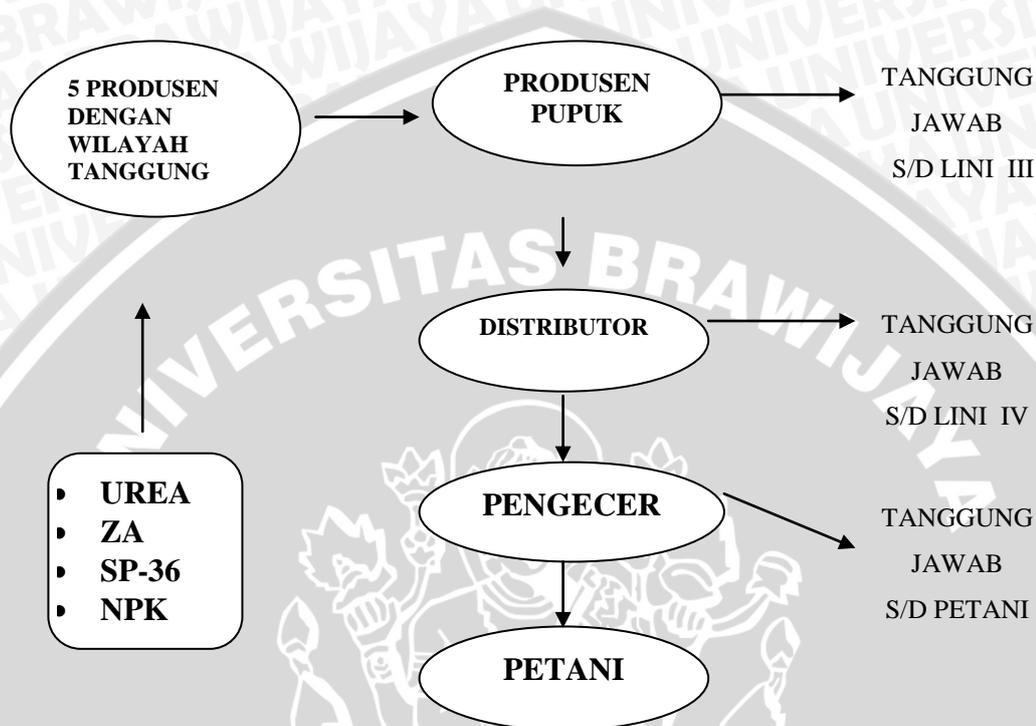
Perindag Nomor : 378/MPP/KEP/8/1998



*Sumber : Dinas Indagkop dan UKM th 2009

Gambar II.

Struktur Penyaluran Pupuk Berdasarkan SK Menteri
Perindag Nomor : 356/MPP/KEP/5/2004



*Sumber : Dinas Indagkop dan UKM th 2009

Arifin (2004) menyatakan kelembagaan pupuk di Indonesia sangatlah primitif. Dari paparan diatas dapat dikatakan bahwa kinerja dan keragaman pasar (*market performance*) komoditas pupuk di beberapa tempat bersifat monopoli/oligopoli karena privilis para distributor dan penyalur dalam menentukan harga. Hal ini berakibat harga yang harus dibayar oleh petani jauh lebih tinggi dari harga pabrik. Terlebih lagi, sistem distribusi pupuk terasa amat kaku dan cenderung mengikuti pola komando yang amat jauh dari prinsip-prinsip persaingan yang sehat.

Lemahnya kelembagaan perpupukan berdampak sering terjadinya kelangkaan pupuk pada saat petani membutuhkan untuk pemupukan. Para penimbun pupuk dengan mudah melakukan aksinya, sehingga harga pupuk dapat melambung demikian tinggi. Kalau keadaan ini yang terjadi, subsidi pupuk bukanlah dinikmati oleh para petani, akan tetapi oleh para pelaku pasar dan pihak lainnya yang terkait

Dengan diterapkannya otonomi daerah di Indonesia , maka daerah menjadi lebih leluasa untuk mengatur dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki guna mendukung pelaksanaan pembangunan. Pembangunan daerah pada era otonomi seperti saat ini diarahkan untuk mampu mengembangkan dan menyelaraskan laju pertumbuhan antara daerah satu dengan daerah yang lain ,serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah .Oleh karena itu dalam melaksanakan pembangunan tersebut pemerintah daerah harus dapat mengupayakan pendayagunaan potensi daerah yang dimiliki dengan mengisinya dengan program pembangunan , sehingga menghasilkan alternatif pembangunan yang terbaik bagi daerah tersebut .Demikian pula dengan Kabupaten Ponorogo , dimana mayoritas penduduknya masih bekerja di bidang pertanian dan bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo sektor pertanian masih merupakan sector andalan perekonomiannya , sehingga sudah selayaknya apabila sektor pertanian dianggap sebagai salah satu sektor yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ponorogo dan perlu mendapat perhatian lebih dari Pemerintah .Dari beberapa sektor pembangunan ,ada tiga sektor utama dalam perekonomian Kabupaten Ponorogo yang memberikan kontribusi besar terhadap perhatian khusus.

Tabel I.

Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga
Berlaku

No	SEKTOR / SUB SEKTOR	2006	2007	2008
1.	PERTANIAN	588.592.675	648.768.061	709.883.107
2.	Pertambangan dan Penggalian	15.490.619	17.663.369	19.330.790
3.	Industri Pengolahan	134.909.299	162.011.556	186.436.697
4.	Listrik ,Gas, dan Air bersih	13.786.234	16.373.614	18.567.679
5.	Bangunan (konstruksi)	171.225.414	198.431.744	221.588.728
6.	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	439.794.050	485.902.214	533.034.729
7.	Transportasi dan komunikasi	112.557.597	127.665.801	147.734.865
8.	Keuangan ,Persewaan, dan Jasa Perusahaan	94.051.691	103.255.014	115.346.176
9.	Jasa- Jasa	181.393.639	209.723.432	226.060.888
	Produk Domestik dan Regional Bruto	1.751.783.218	1.969.795.805	2.177.973.658

Sumber BAPEDA dan BPS Kabupaten Ponorogo

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan sumbangan terbesar bagi PDRB Kabupaten Ponorogo hingga tahun 2008 yaitu sebesar Rp.709.883.107.000. Sektor pertanian terutama pertanian tanaman pangan merupakan sektor yang sangat penting dan vital bagi kebutuhan masyarakat, dimana kebutuhan akan pangan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Sektor pertanian dipandang sebagai salah satu wadah penampung tenaga kerja dan diharapkan dapat memberikan sumbangan yang cukup besar dalam usaha memperoleh devisa melalui ekspor.

Kabupaten Ponorogo yang memiliki luas wilayah 274.356 km² yang terbagi menjadi 22 kecamatan yang mana tiap-tiap wilayah kecamatan memiliki luas wilayah pertanian yang berbeda-beda, dengan kondisi tersebut tentunya memerlukan suatu perencanaan yang lebih lanjut tentang konsumsi kebutuhan akan pupuk pada daerah tersebut. Hal ini diperlukan agar proses kegiatan masyarakat petani pada umumnya yang sering mengeluhkan akan ketersediaan pupuk pada waktu musim tanam tiba. Atau kesimpang siuran akan distribusi pupuk yang diperlukan oleh wilayah tertentu. Misalkan saja wilayah A seharusnya hanya membutuhkan pupuk sebesar 8 ton tetapi malah diberikan kuota yang lebih besar yaitu 10 ton, sedangkan daerah lainnya yang seharusnya membutuhkan kuota pupuk 6 ton malah hanya mendapat jatah 4 ton. Tentunya dalam hal ini perlu menilik kembali akan program pupuk subsidi pemerintah yang sering kurang koordinasi tentang banyaknya kuota pupuk yang dibutuhkan oleh wilayah tertentu hanya apabila hal ini tidak segera diperbaiki maka akan mengganggu produktifitas pertanian di wilayah yang bersangkutan.

Pembangunan daerah sebagai perwujudan dari pembangunan nasional diarahkan untuk mampu mengembangkan dan menyelaraskan laju pertumbuhan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah melalui pembangunan yang serasi dan terpadu serta saling mendukung. Di dalam pembangunan daerah, pemerintah daerah mengupayakan optimalisasi dalam upaya pembangunan masyarakat dan kegiatan di dalamnya yang mendukung tercapainya pembangunan yang ingin tercapai dalam hal ini memfokuskan dalam kegiatan pertanian. Dimana di masyarakat sektor pertanian memiliki dampak yang dirasa sangat penting, karena hampir sebagian besar masyarakat menggantungkan kehidupannya pada sektor ini baik langsung maupun tidak langsung.

Jika melihat pembangunan yang sekarang ini terjadi beberapa kesalahan mekanisme pembangunan khususnya dalam sektor pertanian, ini terlihat dari beberapa kesalahan pemerintah daerah yang dalam hal ini sebagai ujung tombak dalam pembangunan di daerah. Petani yang dalam hal ini sebagai *customer* sebagai seseorang yang berhak mendapat pelayanan yang berhubungan dengan dunia pertanian sering putus asa atau bahkan kebingungan terhadap kebijakan Pemerintah yang berhubungan dengan program pupuk bersubsidi yang notabennya dikhususkan pada petani – petani yang mempunyai lahan sedikit atau petani – petani yang tidak mampu. Adapun kasus-kasus terhadap penyaluran pupuk subsidi dapat dilihat dari hal-hal berikut :

- Kurangnya informasi tentang pendistribusian pupuk yang diperuntukkan untuk masyarakat petani yang berhak mendapatkan subsidi pupuk oleh pemerintah .
- Seringkali produktifitas petani mengalami penurunan diakibatkan karena sulitnya mendapat pupuk yang seharusnya diperoleh disaat lahan pertanian memerlukan pupuk yang dibutuhkan utamanya pada saat musim tanam telah datang.

Untuk itulah dirasa penting menganalisis kembali perihal kebijakan distribusi pupuk bersubsidi oleh pemerintah daerah yang diperuntukkan bagi masyarakat petani di daerah-daerah khususnya di kawasan kabupaten Ponorogo. Oleh karena itulah analisis distribusi pupuk subsidi menjadi sangat penting keberadaannya guna mengahsilkan pertumbuhan sektor –sektor di daerah dan pemerataan di daerah dan pemerataan pembangunan daerah agar mencapai hasil yang optimal.

Dari uraian latar belakang tersebut ,maka dalam penelitian penulis memberi judul **“Mekanisme Distribusi Pupuk Bersubsidi pada Masyarakat Petani dalam Perspektif Administrasi Pembangunan“**

B. PERUMUSAN MASALAH

Suatu mekanisme tentang distribusi khususnya pupuk harus dibuat secara real dengan memperhatikan tingkat konsumsi akan kebutuhan pupuk pada suatu wilayah ,sehingga perencanaan akan distribusi dapat berjalan dengan baik. Untuk itu diperlukan adanya informasi yang lengkap tentang luas wilayah dan jumlah kebutuhan akan pupuk yang dibutuhkan oleh suatu wilayah ,dikhawatirkan apabila pelaksanaan distribusi yang seakan tidak tepat dan dapat mengganggu

produktifitas para petani disekitarnya yang berakibat menurunnya tingkat pendapatan masyarakat petani yang notabnya sebagai salah satu sektor yang banyak ditekuni oleh masyarakat.

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan maka perumusan masalah yang diambil adalah :

1. Bagaimana mekanisme distribusi pupuk pertanian di Kabupaten Ponorogo bagi petani yang memperoleh distribusi Pupuk ?
2. Apa faktor penghambat dan pendorong daripada proses pendistribusian pupuk subsidi?
3. Bagaimanakah peran dari pihak –pihak terkait dalam upaya pendistribusian pupuk sampai ke tangan petani?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan mengenai mekanisme distribusi pupuk yang ada di Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menggambarkan peran dari pihak –pihak terkait dalam upaya pendistribusian pupuk sampai ke tangan petani.
3. Untuk menggambarkan faktor penghambat dan pendorong daripada proses pendistribusian pupuk subsidi.

D. KONTRIBUSI PENELITIAN

1. Dengan skripsi ini terselesaikan maka dapat dijadikan wahana bagi peneliti untuk mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh di jenjang kuliah terutama tentang perencanaan pembangunan.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam hal pengoptimalan potensi yang ada di Kabupaten Ponorogo khususnya sektor pertanian.
3. Bermanfaat dalam pengembangan ilmu Administrasi Negara khususnya studi Perencanaan Pembangunan serta memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan sektor pertanian.

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mengetahui secara jelas garis besar apa yang akan diuraikan dalam skripsi ini, maka sistematika penulisannya dibagi dalam bab yang merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Untuk lebih jelasnya sistematika tersebut akan penulis uraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan kontribusi penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini mengemukakan landasan teori yang melandasi penelitian ini, yang merupakan dasar atau landasan atau dalam pembahasan lebih lanjut, yaitu mengenai pengertian Distribusi, unsur-unsur distribusi, manfaat distribusi, jenis distribusi, analisis pertanian, pengertian pertanian, wilayah pertanian, dan pendayagunaan potensi daerah.

BAB III METODE PENELITIAN

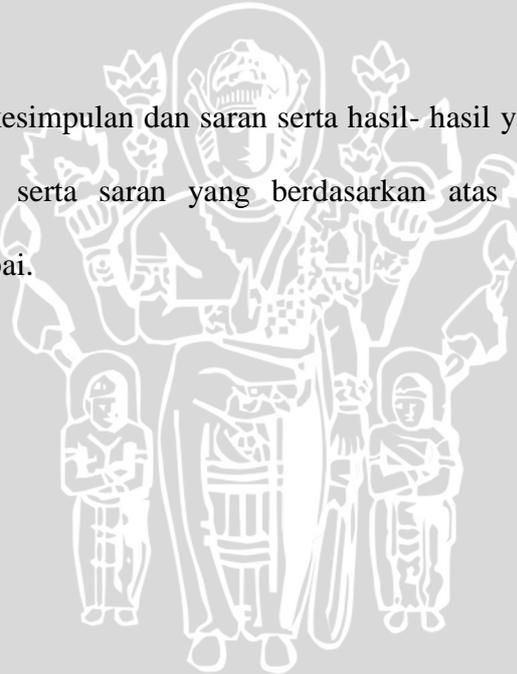
Bab ini akan menyajikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Uraian meliputi : jenis penelitian, lokasi, dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menyajikan pembahasan dari karya tulis ini, mulai dari penyajian data mengenai gambaran umum dan konsumsi lahan terhadap pemanfaatan pupuk yang ada di Kabupaten Ponorogo, diskripsi objek penelitian, analisa dan interpretasinya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran serta hasil-hasil yang telah dianalisa pada bab terdahulu, serta saran yang berdasarkan atas hasil analisa dan pembahasan yang dicapai.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Mekanisme

1. Pengertian Mekanisme

Kata mekanisme berasal dari kata “mechanism” yang berarti penggunaan kata yang berhubungan dengan mesin, sedangkan dari pengertiannya mekanisme mempunyai pengertian penggunaan mesin; alat-alat dari mesin; cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dsb) yang saling bekerja seperti mesin (kalau yg satu bergerak, yg lain turut bergerak): untuk pembaharuan di segala bidang dalam upaya peningkatan, pembangunan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1996 :476)

B. Konsep Distribusi

2. Pengertian Distribusi

Kata distribusi berasal dari bahasa latin “*distribuere*” yang artinya membagikan, dan dari bahasa inggris “*distribution*” yang berarti menyalurkan. Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia (1996 :365) distribusi diartikan sebagai :

- a. Pembagian barang keperluan sehari-hari kepada penduduk atau pegawai anggota tentara, polisi, atau sebagainya.
- b. Penyaluran barang kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Sedangkan pendistribusian diartikan sebagai “pembagian, penyebaran ke tempat-tempat secara merata”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa proses distribusi adalah suatu kegiatan yang melakukan pembagian ,penyebaran, atau penyaluran suatu barang baik itu barang kebutuhan sehari –hari atau barang – barang pokok atau barang hasil produksi lainnya kepada beberapa orang atau tempat secara merata untuk tujuan tertentu.

Suatu sistem distribusi yang handal dapat tercipta dan berjalan dengan baik , cepat, efisien, dan aman apabila perencanaan kebutuhan ,pengadaan dan system penyimpanan terselenggara dengan baik agar system distribusi yang handal itu tercipta.Diperlukan kerjasama yang erat antara satuan –satuan pengguna alat atau barang tertentu dengan para petugas penyimpanan (Siagian,1992:262).Kerjasama yang dimaksud dalam Siagian (1992: 262- 263) akan mudah terbina dan terpelihara dengan baik apabila :

- Penggunaan alat atau barang menyampaikan kebutuhan dengan jelas , dalam arti barang apa yang dibutuhkan , dalam jumlah apa , dimana diperlukan dan kapan diperlukan.Untuk memperlancar pemrosesan semua permintaan yang datang dari berbagai permintaan dalam organisasi disediakan formulir permintaan barang untuk disampaikan kepada petugas gudang penyimpanan melalui suatu mekanisme dan prosedur yang telah diketahui bersama.
- Terdapat kecekatan petugas untuk memproses permintaan yang diterimanya dan penyampaian atau mengirimkannya kepada satuan kerja yang memintanya dengan cepat dan aman.
- Keseriusannya itu berarti bahwa harus ada suatu system distribusi yang tidak berkait-kait akan tetapi ,tetap menjamin bahwa mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan diatati oleh semua pihak yang berkepentingan.

Menurut W.J Staton (1991:91) distribusi fisik terdiri dari semua kegiatan yang bertalian dengan pemindahan produk- produk yang tepat , dalam waktu dan pada waktu yang tepat.Ada beberapa macam saluran distribusi diantaranya ialah :

a. Merencanakan aturan dari distribusi.

Startegi sebuah saluran pemasaran distribusi adalah dengan merencanakan semua unsure yang terdapat dalam Marketing Mix (Bauran Pemasaran).

Pertama menjelaskan apa yang menjadi tujuan pemasaran tersebut ?

Selanjutnya , menentukan apa yang dipasarkan ,harganya , dan perencanaan promosinya.masing- masing elemne tersebut mempunyai elemen tersendiri atau dua elemen saja.

b. Menyeleksi tipe saluran yang dipergunakan .

Penggunaan tipe saluran yang dipergunakan amat bergantung pada kebutuhan juga bergantung pada tipe perantara..Hal ini juga bergantung pada tipe produk yang dipasarkan.

c. Merencanakan intensitas distribusinya.

Apakah intensive distribution ,apakah selective distribution , atau eclisive distribution.Ini bergantung pada barang yang kan dipasarkan.Misalnya, barang-barang kebutuhan sehari- hari lebih baik menggunakan intensive distribution.

d. Memilih penempatan saluran spesifik.

Apakah menggunakan brand perantara ataukah perusahaan atau juga kedua-duanya.Selanjutnya bagaimana penempatan (outletny)

3. Tipe Distribusi

Tingkatan saluran pemasaran atau tipe saluran distribusi, pada dasarnya ada dua macam, Menurut W.J Staton (1991:91) yaitu :

- a. Saluran yang langsung (direct distribution) atau A zero level chanel .

Penjual menjual langsung produknya kepada konsumen.

Ada tiga cara : - penjualan dari rumah ke rumah

- lewat pos

- lewat toko- toko perusahaan

- b. Saluran yang tidak langsung (inditect distribution)

4. Macam distribusi

Menurut Williams .J. Staton membedakan saluran distribusi barang konsumsi, barang industri , dan jasa sebagai berikut :

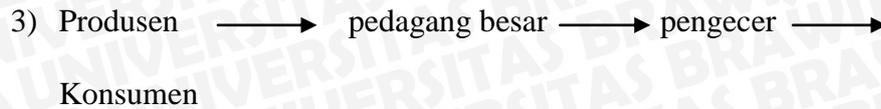
- a. Saluran distribusi barang konsumsi

- 1) Produsen → Konsumen.

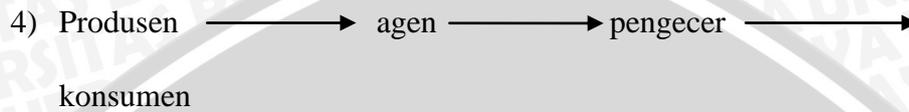
Produsen menggunakan saluran langsung , dengan menjualnya dari rumah ke rumah atau melalui pos. Pada perusahaan penerbitan buku dapat menggunakan cara penjualan dari sekolah ke sekolah.

- 2) Produsen → Pengecer → konsumen

Banyak pengecer besar bertindak sebgai perantara sekaligus sebagai penyalur industry.



Di dalam pasar konsumen mereka merupakan grosir, atau pedagang besar, dan sekaligus pengecer, sedang dalam pasar industry.



Produsen juga menggunakan perantara agen untuk mencapai para pengecer besar maupun pengecer kecil di pasar.

Misalnya :Produsen makanan menggunakan broker untuk memasuki kue atau makanannya ke pengecer besar (*super market*) atau pengecer kecil (toko –toko kue)



Untuk mencapai pengecer kecil, produsen sering menggunakan perantara agen dengan menggunakan pedagang besar untuk menyalurkannya ke para pengecer kecil.

b. Saluran distribusi barang industri.



Saluran distribusi ini dilakukan untuk produk industry berat yang harganya relative mahal dan mempunyai struktur saluran yang lain.

Misalnya :barang-barang instalansi,generator, dan lain –lain.

2) Produsen → Distributor industry → pemakai

Untuk produk –produk alat- alat kantor ,operating,supliematerials,dan lain-lain produsen menggunakan distributorindustridalam menyalurkan barangnya ke pasar.

3) Produsen → agen → pemakai

Untuk suatu produk baru atau memasuki pasar baru, penjual menggunakan agen atau tenaga penjual sendiri.

4) Produsen → agen → distributor industry → pemakai

Produsen tidak bisa menjual barangnya dengan menggunakan agen untuk disalurkan langsungkepada pemakai, tapi menggunakan jasa distributor industry untuk dijual kepada pemakai.

c. Saluran distribusi Jasa

1) Produsen → konsumen

Karena jasa adalah barang yang tidak berwujud , maka proses produksi dan aktifitas penjualanya membutuhkan kontak langsung antara produsen dengan konsumen .Tipe saluran langsung ini banyak

dipergunakan oleh jasa- jasa professional, seperti dokter ,pengacara, asuransi, dan lain-lain.

2) Produsen → agen → konsumen

Penjualan jas sering menggunakan agen sebagai penghubung antar produsen dan konsumen ,seperti travel,sewamenyewa, media periklanan, asuransi dan lain- lain.

Dari keterangan diatas maka pendistribusian pupuk termasuk dalam saluran distribusi barang konsumsi.

“ Produsen → pedagang besar → pengecer →
Konsumen “

C. Pembangunan Pertanian

“Pembangunan pertanian dapat didefinisikan sebagai suatu proses perubahan sosial. Implementasinya tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan status dan kesejahteraan petani semata, tetapi sekaligus juga dimaksudkan untuk mengembangkan potensi sumberdaya manusia baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya, lingkungan, maupun melalui perbaikan (improvement), pertumbuhan (growth) dan perubahan (change) (Iqbal dan Sudaryanto, 2008).”

Dalam sejarah perekonomian Indonesia sejak Pelita I hingga akhir pemerintahan Orde Reformasi, pentingnya pembangunan pertanian seringkali didengung dengungkan, namun dalam kenyataannya tetap saja pemberdayaan

petani kurang diperhatikan. Menurut Iqbal dan Sudaryanto kondisi pertanian saat ini diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan petani masih rendah baik secara nominal maupun secara relatif dibandingkan dengan sektor lain.
2. Usaha pertanian yang ada didominasi oleh cirri-ciri : (a) skala kecil, (b) modal terbatas, (c) teknologi sederhana, (d) sangat dipengaruhi musim, (e) wilayah pasarnya lokal, (f) umumnya berusaha dengan tenaga kerjakeuarga sehingga menyebabkan terjadinya involusi pertanian (pengangguran tersembunyi), (g) akses terhadap kredit, teknologi dan pasar sangat rendah, (h) Pasar komoditi pertanian sifatnya mono/oligopsoni sehingga terjadi eksploitasi harga pada petani.
3. Pendekatan parsial yang bertumpu pada peningkatan produktifitas usahatani yang tidak terkait dengan agroindustri. Hal ini menunjukkan fondasi dasar agribisnis belum terbentuk dengan kokoh sehingga system dan usaha agribisnis belum berkembang seperti yang diharapkan, yang terjadi kegiatan agribisnis masih bertumpu pada kegiatan usahatani.
4. Pembangunan pertanian yang ada kurang terkait dengan pembangunan pedesaan.
5. Kurang memperhatikan aspek keunggulan komparatif yang dimiliki wilayah. Pembangunan agribisnis yang ada masih belum didasarkan kepada kawasan unggulan.

6. Kurang mampu bersaing di pasaran, sehingga membanjirnya impor khususnya komoditas hortikultura.
7. Terdapat senjang produktivitas dan mutu yang cukup besar sehingga daya saing produk pertanian Indonesia masih mempunyai peluang yang sangat besar untuk ditingkatkan.
8. Pangsa pasar ekspor produk pertanian Indonesia masih kecil dan sementara kapasitas dan potensi yang dimilikinya lebih besar.
9. Kegiatan agroindustri masih belum berkembang. Produk –produk perkebunan semenjak zaman Belanda masih berorientasi pada ekspor komoditas primer (mentah)
10. Terjadinya degradasi kualitas sumberdaya pertanian akibat pemanfaatan yang tidak mengikuti pola-pola pemanfaatan yang berkelanjutan .
11. Masih lemahnya kelembagaan usaha dan kelembagaan petani. Usaha agribisnis skala rumahtangga, skala kecil dan agribisnis skala besar belum terikat dalam kerjasama yang saling membutuhkan , saling memperkuat dan saling menguntungkan. Yang terjadi adalah penguasaan pasar oleh kelompok usaha yang kuat sehingga terjadi distribusi margin keuntungan yang timpang (*skewed*) yang merugikan petani.
12. Lemahnya peran lembaga penelitian, sehingga temuan atau inovasi benih/ bibit unggul sangat terbatas
13. Lemahnya peran lembaga penyuluhan sebagai lembaga transfer teknologi kepada petani, setelah era otonomi daerah.

14. Kurangnya pemerintah memberdayakan stakeholder seperti perguruan tinggi, LSM, dalam pembangunan pertanian.
15. Lemahnya dukungan kebijakan makro ekonomi baik fiscal maupun moneter seperti kemudahan kredit bagi petani, pembangunan irigasi maupun pasar, dll

Selain hal tersebut beberapa paparan mengenai pertanian yang menindikasikan bahwa sektor inilah yang menjadi tulang punggung dari sekian banyak masyarakat kita. Tentu hal itu tidak lepas dari pengamatan dan analisis pertanian menurut pengertian dari beberapa ahli. Pembangunan pertanian yang adil dan merata adalah tujuan dari paparan tentang pembangunan pertanian yang sehat dan dapat secara nyata dinikmati oleh kelompok yang benar – benar terjun dalam dunia pertanian. Bicara tentang pembangunan, berikut adalah paparan tentang pembangunan pertanian menurut :

“Secara teoritis arah pembangunan secara umum adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial (*social welfare*) yang harus memenuhi empat komponen tujuan utama, yakni: pertumbuhan, pemerataan, kelestarian, hak asasi manusia. Oleh karena itu dalam pembangunan pertanian tujuan utama ini dicoba akan diwujudkan sesuai dengan potensi dan peluangnya. Berdasarkan identifikasi masalah dan isu pembangunan pertanian sesuai dengan tuntutan demokratisasi dan globalisasi tersebut, maka dapat dibuat arah pembangunan pertanian pada masa datang.. Arah pembangunan pertanian tersebut dirumuskan dalam bentuk visi, misi, tujuan dan strategi pembangunan pertanian. (Iqbal dan Sudaryanto, 2008).”

1. Visi

Visi pembangunan pertanian adalah membangun petani melalui bisnis pertanian yang modern, efisien, dan lestari yang terpadu dengan pembangunan wilayah. Ciri-ciri dari visi menurut Iqbal dan Sudaryanto adalah :

- a. Membangun petani mengandung pengertian prioritas pembangunan pertanian harus mendahulukan kesejahteraan petani dalam arti luas sehingga mampu menumbuhkan kembangkan partisipasi petani dan mampu meningkatkan keadaan sosial-ekonomi petani melalui peningkatan akses terhadap teknologi, modal, dan pasar.
- b. Bisnis pertanian mengandung pengertian pertanian harus dikembangkan dalam suatu sistem agribisnis pertanian mulai dari bisnis input produksi, hasil produksi pertanian, deversifikasi usaha pertanian, serta bisnis hasil olahannya yang mampu akses ke pasar internasional. Melalui aktifitas agribisnis pertanian yang lebih luas ini diharapkan mampu lebih meningkatkan peran pertanian terhadap pembangunan nasional baik terhadap penyerapan tenaga kerja, pendapatan nasional, perolehan devisa, maupun peningkatan gizi masyarakat
- c. Modern mengandung pengertian menggunakan teknologi yang dinamis dan spesifik lokasi pengembangan sesuai dengan tuntutan zaman.
- d. Efisien mengandung pengertian mampu berdaya saing di pasar internasional yang dicirikan pada pengembangan yang didasarkan sumberdaya yang mempunyai keunggulan komparatif dan berkualitas tinggi

- e. Lestari mengandung pengertian menggunakan sumberdaya yang optimal dan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumberdaya pertanian.
- f. Terpadu dengan pembangunan wilayah mengandung pengertian pembangunan pertanian harus didukung oleh pembangunan wilayah baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sosial ekonomi kemasyarakatan.

2. Misi

Berdasarkan visi pembangunan tersebut, maka misi pembangunan pertanian menurut (Iqbal dan Sudaryanto, 2008).”dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi dan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan komoditas unggulan yang berdaya saing yang terorganisasi oleh organisasi ekonomi petani dalam system agribisnis
- b. Memodernisasi sektor pertanian sebagai aktifitas bisnis berspektrum luas mulai dari bisnis input produksi, deversifikasi usaha pertanian, penanganan pasca panen, serta bisnis hasil olahannya yang mampu akses ke pasar internasional melalui inovasi teknologi spesifik lokasi dan ramah lingkungan
- c. Memfasilitasi dan mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia baik aparat pemerintah, maupun pelaku agribisnis khususnya petani melalui pengetahuan dan ketrampilan petani pada setiap pusat pertumbuhan agribisnis melalui sekolah pertanian lapang dengan melibatkan perguruan tinggi dan libang-litbang pertanian

- d. Memfasilitasi dan mendorong berkembangnya usaha-usaha agroindustri hulu maupun pengolahan hasil dengan prioritas skala kecil di setiap wilayah
- e. Memfasilitasi dan mendorong keterpaduan pembangunan agribisnis dengan pembangunan wilayah baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sosial ekonomi kemasyarakatan.
- f. Memfasilitasi dan mendorong citra produk-produk pertanian Indonesia melalui promosi di pasar internasional

3. Tujuan

Berdasarkan tujuan pembangunan tersebut, maka tujuan pembangunan pertanian menurut (Iqbal dan Sudaryanto, 2008).”dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesejahteraan petani terutama kelompok masyarakat yang mata pencahariannya berkaitan langsung dengan sumberdaya pertanian.
- b. Meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitif produk agribisnis baik produk primer maupun olahan, sehingga mampu berdaya saing di pasar internasional
- c. Meningkatkan posisi tawar petani melalui penguatan kelembagaan petani dan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani sehingga mampu meningkatkan berpartisipasi dan aksesibilitas terhadap inovasi teknologi, perkreditan, informasi pasar, kelestarian sumberdaya dalam pengelolaan sumberdaya pertanian.

- d. Meningkatkan kesempatan kerja di wilayah melalui pengembangan agroindustri skala kecil
- e. Mewujudkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya local
- f. Menjadikan sektor pertanian sebagai pusat pertumbuhan khususnya pada wilayah-wilayah berbasiskan sumberdaya pertanian
- g. Meningkatkan layanan informasi teknologi, perkreditan, sarana produksi dan prasarana pertanian kepada petani
- h. Menjaga dan meningkatkan kualitas sumberdaya pertanian

4. Strategi Dasar

Berdasarkan strategi dasar pembangunan tersebut, maka strategi dasar pembangunan pertanian menurut (Iqbal dan Sudaryanto, 2008).”dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Pembangunan pertanian perlu diarahkan pada pengembangan komoditas unggulan berdasarkan keunggulan komparatif melalui pendekatan kawasan yang terintegrasi dengan pembangunan pedesaan.
- b. Pembangunan pertanian harus mendahulukan kesejahteraan petani dalam arti luas dengan menumbuh kembangkan partisipasi petani melalui system kelembagaan yang mandiri sehingga petani dapat akses terhadap teknologi, modal, dan pasar
- c. Peningkatan dan pengembangan inovasi teknologi untuk menghasilkan produktivitas dan kualitas produk usatani dan agroindustri spesifik lokasi

perlu dikembangkan untuk meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitif komoditas perikanan Indonesia.

- d. Peningkatan nilai tambah pertanian melalui pengembangan agroindustri skala kecil di pedesaan dengan mengembangkan usaha-usaha agroindustri rumah tangga dengan menitik beratkan peran wanita.
- e. Peningkatan peran fasilitasi pemerintah dalam mempromosikan produk-produk pertanian di pasar internasional.
- f. Mengembangkan system transfer pengetahuan dan ketrampilan petani pada setiap pusat pertumbuhan agribisnis melalui sekolah pertanian lapang dengan system klinik agribisnis
- g. Perlu adanya pola kemitraan (*contract farming*) yang saling menguntungkan antara kelembagaan petani dengan agribisnis skala besar dengan system pengawasan yang ketat dari pemerintah
- h. Perlu adanya perlindungan petani kecil melalui peraturan pemerintah khususnya yang berkaitan dengan perdagangan internasional komoditas pertanian.
- i. Peningkatan dukungan kebijakan makro ekonomi baik fiskal maupun moneter seperti kemudahan kredit bagi petani, pembangunan irigasi maupun pasar, dll
- j. Peningkatan peran serta perguruan tinggi dalam pembangunan agribisnis

Menurut Sudaryanto *et al.* (2005), pendekatan pembangunan pertanian selama pemerintahan Orde Baru dilaksanakan dengan pendekatan komoditas. Pendekatan ini dicirikan oleh pelaksanaan pembangunan pertanian berdasarkan

pengembangan komoditas secara parsial (sendiri-sendiri) dan lebih berorientasi pada peningkatan produksi dibanding peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Namun pendekatan komoditas ini mempunyai beberapa kelemahan mendasar, yaitu:

- tidak memperhatikan keunggulan komparatif tiap komoditas,
- tidak memperhatikan panduan horizontal, vertikal dan spatial berbagai kegiatan ekonomi, dan
- kurang memperhatikan aspirasi dan pendapatan petani.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka partisipasi dan kemampuan wirausaha petani merupakan faktor kunci keberhasilan pembangunan pertanian.

Revitalisasi pertanian diartikan sebagai kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual, melalui peningkatan kinerja sektor pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain. Sejalan dengan hal ini, Sudaryanto dan Munif (2005) menyatakan bahwa revitalisasi pertanian dimaksudkan untuk menggalang komitmen dan kerjasama seluruh *stakeholder* dan mengubah paradigma pola pikir masyarakat dalam melihat pertanian tidak hanya sekedar penghasil komoditas untuk dikonsumsi. Pertanian harus dilihat sebagai sektor yang multi-fungsi dan sumber kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia

“Syarat-syarat pembangunan pertanian di banyak Negara dan menggolongkannya menjadi syarat- syarat mutlak dan syarat penunjang bagi tercapainya pembangunan pertanian. Kalau saja syarat tersebut tidak ada maka terhentilah pembangunan pertanian , pertanian akan terus berjalan akan tetapi dalam kondisi yang statis. Lima syarat yang tidak boleh

tidak dan harus ada dalam pembangunan pertanian antara lain (Iqbal dan Sudaryanto, 2008).”

- Adanya pasar untuk hasil – hasil pertanian.
- Teknologi yang senantiasa berkembang.
- Tersedianya bahan – bahan dan alat-alat produksi local.
- Adanya perangsang produksi bagi petani.
- Tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinyu.

Tidak ada satu Negara pun di dunia ini dimana pemerintah tidak memainkan peran dalam perekonomian. Bahkan Negara dimana system kapitalisme merupakan dasar perekonomian, seperti halnya AS, kini pemerintah besar peranya dalam perekonomian. Campur tangan pemerintah dalam pertanian ada yang berakibat baik dan ada juga yang berakibat kurang baik. Tetapi kita tidak akan mendapatkan batas- batas campur tangan pemerintah yang ideal.

Masalahnya bukanlah banyak atau sedikitnya campur tangan pemerintah tetapi bagaimana dan dalam bidang apa pemerintah dapat membantu mendorong warga masyarakatnya untuk mencapai efisiensi tertinggi dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Adapun tujuan umum kebijaksanaan pertanian kita adalah memajukan pertanian, mengusahakan agar pertanian lebih produktif, produksi, dan efisiensi produksi naik akibatnya tingkat penghidupan petani lebih tinggi dan kesejahteraan yang lebih sempurna. Untuk mencapai tujuan – tujuan ini pemerintah di pusat dan daerah mengeluarkan peraturan- peraturan tertentu, ada yang berbentuk undang-undang, Peraturan-peraturan pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan lain-lain. Peraturan – peraturan tersebut pada dasarnya

dapat dibagi dua yaitu kebijaksanaan- kebijaksanaan yang bersifat pengaturan (*regulating policy*) dan pembagian pendapatan yang lebih adil dan merata (*distributive policy*).Kebijaksanaan yang bersifat pengaturan misalnya peraturan reyoneering dalam perdagangan / distribusi pupuk sedangkan contoh peraturan yang sifatnya mengatur pendapatan adalah penentuan harga barang kebutuhan masyarakat.

“Pembangunan Pertanian di Indonesia tetap dianggap terpenting dari keseluruhan pembangunan ekonomi, apalagi semenjak sektor pertanian ini menjadi penyelamat perekonomian nasional karena justru pertumbuhannya meningkat, sementara sektor lain pertumbuhannya negatif. Beberapa alasan yang mendasari pentingnya pertanian di Indonesia : “

- (1) potensi sumberdaya yang besar dan beragam,
 - (2) pangsa terhadap pendapatan nasional cukup besar,
 - (3) besarnya penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini dan
 - (4) menjadi basis pertumbuhan di pedesaan
- (Iqbal dan Sudaryanto, 2008).”

D. Pembangunan Administrasi

1. Administrasi Pembangunan dan Pembangunan Administrasi

“..Administrasi Pembangunan mencakup dua pengertian ,yaitu (1) administrasi.dan (2) pembangunan.Telah umum diketahui bahwa yang dimaksud dengan adminisitrasi ialah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya

.Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai “rangkaiian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang telah ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building).(Siagian, 2003:h.131-192) “

Apabila definisi sederhana diatas disimak secara cermat ,akan muncul ke permukaan paling sedikit tujuh ide pokok .*Pertama:* pembangunan merupakan suatu proses .Berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap- tahap yang di satu pihak bersifat independen akan tetapi di pihak lain merupakan “bagian “dari sesuatu yang tanpa akhir (*never ending*).Banyak cara yang dapat digunakan untuk menentukan pertahapan tersebut,seperti berdasarkan jangka waktu ,biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh.*Kedua:* pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan .Dengna perkataan lain ,jika dalam rangka kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara kegiatan yang kelihatannya seperti pembangunan,akan tetapi sebenarnya ditetapkan secara sadar dan hanya terjadi secara sporadic atau incidental, kegiatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembangunan.*Ketiga:*Pembangunan dilakukan secara terencana , baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang, dan jangka pendek.Dan seperti dimaklumi merencana berrarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu di masa depan .

Keempat: Rencana pembangunanmengandung makna pertumbuhan dan perubahan.Pertumbuhan dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan suatu Negara bangsa untuk berkembang dan tidak sekedar mampu mempertahankan

kemerdekaan, kedaulatan, dan eksistensinya. Perubahan mengandung arti bahwa suatu bangsa Negara harus bersikap antisipatif dan proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda dari satu jangka waktu ke jangka waktu yang lain, terlepas apakah situasi yang berbeda itu dapat diprediksikan sebelumnya atau tidak. Dengan kata lain, suatu Negara bangsa yang sedang membangun tidak akan puas jika hanya mampu mempertahankan *status quo* yang ada. **Kelima :** Pembangunan mengarah kepada modernitas. Modernitas di sini diartikan antara lain sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik daripada sebelumnya, cara berfikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel. Walaupun demikian, perlu diingat bahwa konsep modernitas tidak identik dengan "cara hidup gaya barat". Setiap negara bangsa yang modern harus tetap mempertahankan jati dirinya yang bersumber dari nilai-nilai yang dipandang luhur oleh Negara bangsa yang bersangkutan. Bahwa ada aspek-aspek nilai tersebut yang memerlukan penyesuaian karena tuntutan zaman, itu pun harus diakui dan dijadikan masukan dalam merumuskan strategi pembangun yang akan ditempuh. **Keenam :** Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan *per defisi* bersifat multidimensional. Artinya, Modernitas tersebut mencakup seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dapat menjangkau dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan dan keamanan. **Ketujuh:** Semua hal yang telah disinggung diatas ditunjukkan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga negara bangsa yang bersangkutan semakin kukuh fonasinya dan semakin mantap keberadaannya sehingga menjadi Negara bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia karena mampu

menciptakan situasi yang membuatnya berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara bangsa lain .

Dari pembahasan tersebut di atas kita sampai pada batasan pengertian atau definisi kerja dari Administrasi Pembangunan ,yaitu “seluruh usaha yang telah dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh ,berkembang,dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya “.

2. Aspek-aspek Pembangunan Administrasi

Dalam Pembangunan Administrasi dikenal berbagai aspek yang mempengaruhinya diantar aspek tersebut ialah aspek ekonomi dan sosial.Berikut ini aspek ekonomi dan aspek sosial menurut Sondang .P Siagian.

a.) Aspek Ekonomi

Ketika berbagai Negara baru memperoleh kembali kemerdekaannya ,apakah melalui perang kemerdekaan atau jalam damai di meja perundingan,kemerdekaan tersebut bukan saja menyangkut bidang politik ,akan tetap[I juga menyangkut bidang – bidang kehidupan dan penghidupan yang lain .Salah satu implikasi dari persepsi demikian ialah bahwa suatu negara bangsa bebas untuk menentukan dan memilih sendiri cara- cara yang ingin ditempuhnya dalam upaya mencapai tujuan negara bangsa yang bersangkutan.

Terlepas dari cara dan pendekatan yang digunakan ,berbagai tindakan yang diambil termasuk kebijaksanaan dan prioritas pembangunanya ,dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh warga masyarakatnya.Itulah sebabnya berkembang pandangan yang menyatakan bahwa suatu negara modern merupakan suatu negara kesejahteraan (*welfare state*) .Meskipun di

banyak negara industry maju konsep “negara kesejahteraan “ tidak lagi menonjo seperti halnya di masa- lalu karena biaya yang sangat besar yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjamin kesejahteraan para warganya.(Siagian ,2003)

Siapun mengakui bahwa pembangunan merupakan kegiatan yang rumit karena sifatnya yang multifaset dan multidimensional .Karakteristik demikian merupakan tuntutan kehidupan berbangsa dan bernegara .Itulah sebabnya bidang-bidang yang menjadi obyek pembangunan termasuk bidang politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan , social budaya ,dan administrasi pemerintahan negara.

Akan tetapi karena faktor keterbatasan yang dihadapi oleh suatu negara bangsa seperti keterbatasan dana ,keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang sesuai dengan tuntutan pembangunan ,keterbatasan daya , dan keterbatasan waktu.Kemampuan yang dimiliki tidak memungkinkan penyelenggaraan pembangunan dilakukan secara simultan dengan intensitas yang sama.

Tuntutan dalam penentuan prioritas pembangunan bagi negara- negara yang sedang membangun pada umumnya menunjuk pada pembangunan di bidang ekonomi .Tuntutan demikian mudah dipahami dan diterima karena memang kenyataan menunjukkan bahwa keterbelakangan negara- negara tersebut paling terlihat dalam bidang ekonomi.seperti dimaklumi ,berbagai ciri negara terbelakang atau sedang berkembang dalam bidang ekonomi antara lain(Siagian . 2003) :

- 1) Banyaknya rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan absolute.memang benar bahwa berbagai negara menggunakan criteria

yang berbeda tentang batas kemiskinan tersebut. Dewasa ini banyak negara yang menggunakan kriteria bank Dunia sebagai patokan, yaitu apabila seseorang berpenghasilan sampai dengan tiga ratus dolar Amerika Serikat setiap tahunnya, yang bersangkutan dikategorikan sebagai orang yang hidup di bawah garis kemiskinan.

- 2) Di lain pihak, sejumlah kecil warga negara yang dengan standart internasional sekalipun tergolong sebagai orang kaya raya, terutama mereka yang menjadi usahawan di tingkat konglomerat bahkan ada di antar mereka yang menguasai perusahaan yang bersifat oligopoi.
- 3) Produk Domestik Kotor yang rendah antara lain disebabkan oleh produktifitas nasional yang rendah sebagai salah satu konsekwensi dari sumber daya manusia yang tidak terampil.
- 4) Tingkat pendidikan rakyat yang belum tinggi dan bahkan banyak diantar penduduk yang masih buta huruf. seperti dimalkumi, jika pendidikan rata-rata warga masyarakat dalam satu negara adalah lulusan sekolah dasar, negara tersebut digolongkan sebagai negara terbelakang. Jika pendidikan warga sudah mencapai lulusan sekolah menengah pertama, negara dikategorikan sebagai negara berkembang. Suatu negara disebut negara maju apabila pendidikan warganya rata-rata sudah mencapai lulusan sekolah menengah atas. Meskipun pendidikan merupakan bidang di luar ekonomi, hal ini perlu diperhatikan karena berkaitan langsung dengan tersedia tidaknya tenaga kerja terampil.
- 5) Perekonomian yang masih tradisional dalam arti berkisar pada kegiatan pertanian. Tingkat produktifitas pertanian pun pada umumnya rendah

antara lain karena : (a) teknik bertani yang sudah usang , (b) penggunaan pupuk, pestisida dan insektisida yang rendah, baik karena petani yang tidak mengetahui cara- cara menggunakannya dengan tepat maupun karena ketidakmapuan para petani membelinya ,dan (c) rendahnya pengetahuan petani tentang pertanian modern sehingga mereka sering “terpukau “ hanya pada satu jenis komoditi tertentu seperti padi dan belum mengetahui pentingnya teknik yang lebih mutakhir seperti difersifikasi dan intensifikasi.

b.) Strategi Pembangunan Administrasi

1.) Fungsi – fungsi Pemerintah terhadap warganya

Dalam perkembangannya ,setiap negara mengalami berbagai perubahan.Perubahan tersebut telah berakibat pada pemberian empat predikat yang kesemuanya mengejawantahkan dalam peningkatan peranan pemerintah dalam mengemudikan perjalanan negara yang bersangkutan.Empat prediksi tersebut ialah negara sebagai negara politik , negara sebagai negara hukum, negara sebagai negara kesejahteraan , dan negara sebagai negara administrative.(Siagian , 2003.h-134-139)

Negara Sebagai Negara Administratif (*Administrative State*)

Dinamika masyarakat akan terus berlanjut antara lain karena makin terbukanya akses terhadap pendidikan ,baik formal maupun informal bagi banyak warga negara.Pendidikan diinterpretasikan dalam arti yang seluas –luasnya , yang berate pendidikan tidaka hanya dalam arti pemberantasan buta huruf, berbagai pelatihan dan berbagai srata pendidikan formal mulai dari sekolah dasar sampai

pada srata yang paling tinggi. Juga tidak hanya berarti pendidikan seumur hidup, akan tetapi mencakup pendidikan dalam bidang- bidang kehidupan seperti pendidikan politik dan lain-lain. Kesemuanya itu diarahkan pada peningkatan kecerdasan bangsa sehingga para warganya menjadi “ manusia modern”.

Disoroti khusus dari sudut pandang demikian, negara mendapat predikat lain yaitu sebagai negara administrative (*administrative state*) .dengan predikat tersebut, timbul aksentuasi baru dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Artinya, semua fungsi- fungsi pemerintahan selaku pemegang kekuasaan yang didelegasikan oleh rakyat kepadanya seperti fungsi politik, fungsi diplomasi, fungsi penegak hukum dan lain-lain. akan tetapi disamping semua fungsi tersebut, muncul ke permukaan pada tingkat yang dapat dikatakan menonjol dua fungsi baru, yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Sekilas tentang fungsi pengaturan. Fungsi pengaturan (*regulatory functions*) mutlak terselenggara dengan efektif karena kepada suatu pemerintahan negara diberi wewenang untuk melaksanakan berbagai peraturan perundang-undangan yang ditentukan oleh lembaga legislative melalui berbagai ketentuan pelaksanaan dan kebijaksanaan. Berbagai ketentuan pelaksanaan dan kebijaksanaan tersebut dapat merupakan pemberian dan perluasan kesempatan bagi warga masyarakat melalui kegiatan –kegiatan tertentu akan tetapi dapat pula berupa pembatasan kalau diyakini bahwa pembatasan tersebut adalah untuk kepentingan rakyat sebagai keseluruhan. Sekedar sebagai contoh, berbagai peluang dan kesempatan tersebut dapat dilihat dalam kehidupan politik, misalnya mendirikan partai politik baru; dalam kehidupan ekonomi dalam bentuk kesempatan berusaha, baik kepada wirausahawan nasional maupun investor asing. Di bidang pendidikan dengan

wajib belajar bagi anak-anak hingga mereka menyelesaikan pendidikan sampai dengan tingkat sekolah menengah pertama dan lain sebagainya.

Salah satu fungsi pengaturan yang diselenggarakan oleh pemerintah ialah perizinan. Di masyarakat manapun, selalu ada berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh para warga negara yang harus memperoleh izin terlebih dahulu dari aparat pemerintah yang secara fungsional bertanggung jawab untuk pengaturan kegiatan tersebut. Seorang pengusaha, misalnya yang ingin mendirikan dan mengelola badan usaha tertentu harus memiliki izin usaha yang menentukan, antara lain bentuk badan usaha, pemilikan, dan kegiatan usaha.

Sekilas tentang Fungsi pelayanan (service functions). Dalam suatu negara administratif, pemerintah dengan seluruh jajarannya biasa dikenal sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Dalam bahasa yang sangat sederhana peranan tersebut diharapkan terwujud dalam pemberian berbagai jenis pelayanan yang diperlukan oleh seluruh warga masyarakat. (Siagian, 2003, h-134-139)

Telah umum diketahui bahwa pemerintah suatu negara di tingkat nasional terdiri dari berbagai satuan kerja yang dikenal dengan berbagai nomenklatur seperti kementerian, departemen, direktorat jenderal, badan, biro dan lain sebagainya. Terlepas dari sistem pemerintahan negara yang diterapkan, keseluruhan jajaran pemerintahan negara tersebut merupakan suatu birokrasi pemerintahan yang juga dikenal dengan istilah "*civil service*"

Tergantung dari berbagai faktor, seperti luas wilayah kekuasaan negara, sistem perekonomian yang berlaku, sifat geografis negara, jumlah penduduk dan

berbagai faktor lainnya ,tentunya besaran birokrasi pemerintahan berbeda dari satu negara ke negara lain.Yang jelas ialah bahwa diantara berbagai satuan kerja yang terdapat dalam lingkungan pemerintahan , selalu terdapat pembagian tugas yang pada umumnya didasarkan pada prinsip fungsionalisasi.Disoroti khusus dari segi pemberian layana kepada masyarakat, fungsionalisasi berarti bahwa setiap instansi pemerintah berperan selaku penanggung jawab utama atas terselenggaranya tertentu yang tentu saja mutlak perlu bekerja secara berkoordinasi dengan instansi lain.Berarti setiap instansi pemerintah mempunyai “kelompok pelanggan”(*clientele group*). Kepuasan “kelompok pelanggan” inilah yang harus dijamin oleh birokrasi pemerintah .Contoh- contohnya antara lain ialah :

- (a) kelompok masyarakat yang memerlukan pelayanan di bidang pendidikan dan pengajaran dilayani oleh instansi terkait secara fungsional menangani bidang pendidikan dan pengajaran ,(b) kelompok masyarakat yang termasuk kelompok produktif dan mencari nafkah dengan bekerja bagi organisasi atau perusahaan atau orang lain menjadi “pelanggan” bagi instansi yang mengurus ketenagakerjaan ,(c) warga masyarakat yang ingin meningkatkan kesehatan atau pengobatan menjadi “pelanggan “dari instansi yang menangani kesehatan rakyat secara nasional ,(d) para industriawan dan ushawan ,baik dari sector riil atau formal maupun informal,menjadi pelanggan dari instansi yang menangani industry dan perdagangan, (e) pelayan kepada petani dan nelayan merupakan tanggung jawab instansi yang bergerak di bidang pertanian dan perikanan, dan (f) warga masyarakat yang merasa keamanannya terganggu berhak mendapat pelayanan dalam bentuk perlindungan dari polisi. Demikian seterusnya.

Negara sebagai Negara Hukum (*Legal state*)

Telah disinggung dimuka bahwa sebagai konsekuensi dari dinamika masyarakat ,antara lain dikarenakan tingkat pendidikannya semkain tinggi ,para warganya semakin sadar akan pentingnya perolehan hak dan pentingnya penunaian kewajibannya kepada negara dan pemerintah meskipun gejala umum menunjukkan bahwa biasanya perolehan hak lebih menonjol ketimbang penunaian kewajiban.

Banyak hak yang ingin diperoleh oleh masyarakat , seperti perlindungan atas jiwa dan harta , perlakuan yang tidak diskriminatif di mata hukum, penyelesaian konflik atau masalah melalui jalur hukum, tidak tercabutnya hak-hak sebagai warga negara serta tidak diperlakukan semena- mena oleh siapapun juga , termasuk oleh pemerintah atau penguasa.

Sejarah telah mencatat dua hal penting yang menambah predikat negara yaitu disamping sebagai negara politik , juga sebagai negara hukum,yaitu ;(1) diciptakannya “Magna Charta “ di Inggris yang kemudian dianut oleh semua negara demokratis di dunia , dan (2) timbulnya kosep “*rule of law*”.Perkembangan ini penting untuk dicatat karena tidak jarang dalam berbagai negara diterapkan “*rule of man*“.Dalam kondisi dimana “*rule of man* “yang berlaku ,keinginan dan kepentingan penguasalah yang didahulukan dengan,kalau perlu , mengabaikan kepentingan rakyat banyak.(Siagian . 2003.h.136-137)

Negara sebagai Negara Kesejahteraan (*Welfare state*)

Sebagaimana halnya sebagai salah satu organisasi, negara pun didirikan untuk mencapai tujuan –tujuan tertentu .sering terdengar ungkapan yang mengatakan bahwa tujuan merupakan bintang penuntun bagi organisasi.Untuk mempermudah pemahaman pentingnya tujuan ,para pakar mengatakan bahwa tujuan dapat dikategorikan menjadi tujuan akhir dan tujuan yang dapat dikatakan tujuan dalam jangka waktu sedang, dan jangka pendek.Ciri- ciri tujuan akhir ialah ;(a) bersifat idealistic, (b) jangkauan waktunya tidak terbatas, (c)dinyatakan secara kualitatif, dan (d)masih abstrak.dengan cirri-ciri demikian ,mungkin saja para anggota organisasi belum tentu atau bahkan tidak memahami maknanya yang konkre.akan tetapi meskipun demikian ,tiga hal fundamental yang perlu diperhatikan ,yaitu (a) tujuan diterima sebagai sesuatu yang wajar untuk dicapai ,(b) tidak perlu dipersoalkan siapa saja yang menentukannya dan (c) semua komponen masyarakat berkewajiban untuk memberikan kontribusinya dalam pencapaian tujuan tersebut.

“Dalam perjalannya , suatu negara pasti ingin meraih berbagai jenis dan bentuk kemajuan .untuk mengetahui kemajuan apa yang ingin dicapai , jenis apa, jumlah sarana ,prasarana, daya dan daya apa yang dibutuhkan , kendala apa yang perlu diatasi , peluang apa yang perlu dimanfaatkan serta tantangan apa yang harus dihadapi, tujuan akhir biasanya diterjemahkan menjadi tujuan atau yang sering dikenal sebagai sasaran yang cirri- cirinya ialah (a) praktis (b) kurun waktu pencapaiannya ditentukan (c) dinyatakan secara kuantitatif ,dan (d) konkret.(Siagian .2003,h.137-138) “

Salah satu tujuan yang ingin dicapai ialah peningkatan kesejahteraan seluruh warga negara, tidak hanya dalam arti materiil, akan tetapi juga dalam arti semua bidang kehidupan karena secara langsung menyangkut harkat martabat manusia. Demikian pentingnya tujuan tersebut, hingga bentuk-bentuk kesejahteraan yang ingin dicapai sering dicantumkan dalam pasal-pasal tertentu dari undang-undang dasar negara. Misalnya keadilan sosial, yang berarti kesenjangan sosial ekonomi sekecil mungkin karena memang sulit atau dihilangkan sama sekali, peningkatan kecerdasan bangsa, perolehan pekerjaan yang layak, jaminan adanya penghasilan yang wajar, jaminan terpeliharanya anak-anak yatim piatu, jaminan tidak terlantarnya para janda dan orang-orang lanjut usia, pelayanan kesehatan yang memuaskan, terhindarnya rakyat dari kelaparan, serta berbagai bentuk jaminan sosial.

c.) Sasaran Pembangunan Administrasi

“Pembahasan tentang aspek kelembagaan sebagai salah satu sasaran pembangunan administrasi dengan sengaja hanya menyoroti organisasi di lingkungan eksekutif pemerintah negara, dan tidak termasuk aspek kelembagaan legislatif dan juga tidak yudikatif. Empat hal yang akan dibahas dalam kaitannya dengan sasaran pembangunan administrasi ialah (a) prinsip organisasi, (b) pentingnya pendekatan kesisteman (c) tipologi struktur organisasi, dan (d) mekanisme dan prosedur kerja. (Siagian, 2003)

Prinsip-prinsip organisasi

Titik tolak yang kiranya dapat dipergunakan untuk mencapai sasaran pembangunan administrasi dilihat dari aspek kelembagaannya ialah pemahaman

repository.ub.ac.id

tentang prinsip –prinsip organisasi dan penerapannya. sepuluh prinsip yang menonjol. Menurut Sondang P. Siagian prinsip- prinsip tersebut ialah :

- 1) Kejelasan tujuan. Siapa pun akan mengakui bahwa suatu organisasi termasuk negara didirikan untuk mencapai tujuan tertentu. Para pakar pada umumnya menekankan bahwa : (a) tujuan merupakan “bintang penuntun “yang memberi arah pada semua kegiatan yang akan dilaksanakan (b) tidak perlu dipersoalkan siapa yang menentukan tujuan tersebut ,(c) penting menumbuhkan persepsi dari semua pihak tentang makna hakiki dari tujuan meskipun belum terdapat pemahaman secara mendetail karena sifatnya yang idealistic , jangkauan waktu yang jauh ke depan , dinyatakan secara kualitatif dan bentuknya pun masih abstrak
- 2) Kejelasan misi. Misi merupakan langkah- langkah utama yang harus diemban dalam rangka pencapaian tujuan . Pada gilirannya kejelasan misi akan mempermudah manajemen untuk menyatakan visinya , menentukan strategi yang akan ditempuh, menyusun rencana yang akan diperlukan , serta menentukan program kerja semua satuan kerja dalam organisasi untuk kemudian dilaksanakan dengan baik.
- 3) Fungsionalisasi. Kenyataan menunjukkan bahwa organisasi pemerintahan merupakan organisasi yang besar. Besarnya organisasi tersebut berangkat dari banyaknya fungsi yang harus diselenggarakan, baik dalam arti pemberian pelayanan kepada masyarakat, pengaturan maupun pembangunan.
- 4) Pembagian tugas. Karena banyaknya fungsi yang harus diselenggarakan oleh pemerintah dengan seluruh jajarannya , salah satu konsekuensinya

penerapan prinsip fungsioanlisasi ialah kejelasan dalam pembagian tugas.

- 5) Departementalissi. Salah satu cara yang dapat digunakan dalam pembagian tugas ialah apa yang dikenal dengan istilah “departementalisasi”. Artinya semua tugas yang harus dilaksanakan dan dikelompokkan ke dalam “departemen “.Empat pendekatan dalam menggunakan cara ini ialah : (a) pendekatan fungsional ,(b) pendekatan Produk,(c)pendekatan pelanggan ,(d) pendekatan proses.
- 6) Keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab. Merupakan hal yang manusia apabila dalam kehidupan organisasinya ,seseorang cenderung memperbesar wewenangnya dan memperkecil tanggung jawabnya.Meskipun sikap demikian tidak dapat dibenarkan dalam sudut pandang etika dan administrative,adanya kecenderungan tersebut harus dipahami.
- 7) Kesatuan arah .Telah ditekankan dimuka bahwa dengan kejelasan tujuan ,segala sesuatu yang kemudian terjadi dalam organisasi harus diarahkan kepada pencapaian tujuan tersebut.Penerapan prinsi ini antara lain berarti bahwa efisiensi ,efektifitas dan produktifitas kerja mutlak perlu ditingkatkan yang berarti adanya upaya agar tidak ada kegiatan yang mubazir dan langkah –langkah operasioanal yang diambil bukan untuk kepentingan individu atau kelompok melainkan demi kepentingan organisasi sebagai keseluruhan.
- 8) Kesatuan komando.Prinsip ini biasanya dikaitkan dengan sumber perintah di satu pihak dan jalur tanggung jawab di pihak lain.artinya

seorang pelaksana tugas tertentu, tanpa membedakan apakah tugas itu bersifat manajerial atau teknis operasional, seyogianya hanya menerima perintah dari satu sumber.

- 9) Kejelasan kebijaksanaan tentang pola pengambilan keputusan. telah dimaklumi bahwa terdapat dua pola pengambilan keputusan, yaitu pola sentralisasi dan pola desentralisasi. Jika suatu organisasi menggunakan pola sentralisasi berarti bahwa semua keputusan diambil oleh para pejabat pimpinan puncak dalam organisasi yang bersangkutan dan satuan kerja serta para manajer tingkat bawah hanya berperan selaku pelaksana.
- 10) Rentan kendali. Dengan motivasi kuat, loyalitas yang dapat diandalkan, disiplin kerja yang tinggi, rasa tanggung jawab yang besar, dedikasi dan rasa pengabdian yang mendalam sekalipun pengawasan tetap diperlukan. Dasar pemikiran tentang pentingnya pengawasan ialah karena diakui bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan pasti mempunyai keterbatasan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan. Karena itu tidak dapat luput dari kemungkinan berbuat khilaf dan kesalahan.

Hal lain yang kiranya perlu mendapat penekanan ialah bahwa pengelolaan organisasi dengan pendekatan kesisteman akan sangat mempermudah pelaksanaan koordinasi yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas kerja. Pengalaman menunjukkan bahwa jauh lebih mudah untuk mengatakan koordinasi ini penting ketimbang untuk menerapkannya. Dua alasan pokok ialah (a) mutlaknyanya interaksi dan interdependensi tidak selalu disadari oleh para pelaksana, dan (b) sering timbul ke permukaan apa yang sering disebut sebagai "*territorial imperactive*" yang berarti adanya anggapan bahwa karena sudah

dinyatakan dalam uraian pekerjaan satuan pekerja yang bersangkutan, bidang tugas tertentu sepenuhnya merupakan tanggung jawab para pelaksananya dan tidak boleh dimasuki oleh satuan kerja lain yang manapun juga.

Tipologi struktur Organisasi

Pengenalan berbagai tipologi struktur organisasi sangat penting. Dengan pengenalan tersebut. Cirri-cirinya dalam arti kekuatan dan kelemahannya diketahuidan dengan demikian mempermudah penentuan pilihan struktur yang paling tepat untuk digunakan.

Menurut Sondang P Siagian Teori organisasi klasik mengetengahkan berbagai tipe organisasi yaitu organisasi lini , organisasi lini dan staf, organisasi fungsional, organisasi matriks , dan organisasi kepanitiaan.

Organisasi Lini. Tipe struktur ini tepat digunakan bagi organisasi yang karakteristiknya ialah : (a) kecil, (b) jumlah karyawannya sedikit (c) produk yang dihasilkan berupa barang dan jasa , tidak beraneka ragam (d) proses pengelolaan input ke output relatif sederhana, (e) pengetahuan dan ketrampilan para pelaksana sangat bervariasi dan tidak sedikit yang spesialisistik, dan (f) diberlakukan prinsip satu langkah ke bawah (*one step down*) dalam hubungan antara atasan dan bawahan. (Siagian . 2003)

Tipe organisasi fungsional. Untuk mengatasi kelemahan penggunaan tipe organisasi lini dan staf, dewasa ini terdapat kecenderungan kuat untuk mengganti organisasi yang bentuknya piramidak dengan tipe yang lebih datar. Tujuan pokoknya ialah : (a) mengurangi lapisan kerawanan, (b) kejelasan fungsi- fungsi yang harus diselenggarakan oleh organisasi, (c) menghilangkan dikotomi antar pelaksana tugas pokok dan tugas penunjang , (d) membuat organisasi lebih

menjadi hidup, (e)mempermudah interaksi dan interdependensi melalui koordinasi.(Siagian . 2003)

*Organisasi Matriks.*Tipe ini relative baru .Akan tetapi meskipun demikian penggunaannya cepat meluas ,terutama dalam organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan.day tarik penggunaan tipe ini terletak pada dua hal ,yaitu (a) digambarkannya secara jelas kaitan antara produk dan proses pengolahannya,dan (b) mempermudah koordinasi antara penganggung jawab produk dengan penanggung jawab proeses. .(Siagian . 2003)

Organisasi Kepanitiaan(Adhocracy). Tipe ini banyak digunakan di dalam dan di luar birokrasi pemerintahan.Penggunaanya memang dapat dibenarkan apabila : (a) ada tugas tertentu yang perlu penanganan secara *ad hoc (khusus)* ,(b)penyelesaian tugas dimaksudkan memerlukan pendekatan lintas sektoral ,(c)manajemen puncak perlu penyelesaian tugas dilakukan oleh tenaga ahli , (d)tugas tersebut harus selesai dalam jangka waktu tertentu,(e)penyelesaian tugas memerlukan pendekatan yang fleksibel ,(f) tugas tersebut merupakan tugas yang baru yang belum jekas lembaga satuan kerja yang akan menanganinya dalam organisasi . .(Siagian . 2003)

Kejelasan Mekanisme dan Prosedur Kerja

Pentingnya kejelasan mekanisme dan prosedur kerja berkaitan erat dengan pengelolaan suatu organisasi dengan pendekatan kesisteman yang telah dibahas di muka .dikatakan demikian karena tiga alasan pokok .

Pertama.Mekanisme dan prosedur kerja merupakan “peraturan permainan”yang harus diataati dalam penyelesaian tugas lintas sektoral dan multidimensional.karena ini menyangkut interaksi , interdependensi,dan

koordinasi antar instansi disamping berlaku secara internal dalam lingkungan satu-satuan kerja. .(Siagian . 2003)

Kedua.Kebenaran pandangan ini juga terlihat dari teori organisasi yang mengatakan bahwa dalam menjalankan roda suatu organisasi, harus terjawab pertanyaan – pertanyaan : (a) siapa yang melakukan kegiatan apa, (b)siapa bertanggung jawab kepada siapa ,(c)siapa berinteraksi dengan siapa,(d) jaringan informasi apa yang terdapat dalam organisasi, dan (e) saluran komunikasi apa yang tersedia bagi siapa dan untuk kepentingan apa. .(Siagian . 2003)

Ketiga.Kejelasan mekanisme dan prosedur kerja berkaitan erat dengan transparansi dan ketertiban pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi dan kegiatan termasuk dalam hal penegakan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku,perumusan dan penentuan kebijaksanaan, penegakan disiplin masyarakatdalam melakukan pemungutan dana dari masyarakat serta penggunaanya , dan dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat luas. .(Siagian . 2003)

d.) Pembangunan Administrasi dan Reformasi Administrasi

Asumsi dasar yang digunakan dalam membahas pentingnya pembangunan administrasi dalam rangka pembangunan nasional ialah bahwa karena demikian dominanya peranan dan fungsi pemerintah dalam keseluruhan kegiatan penyelenggaraan pembangunan nasional, maka pembangunan administrasi mutlak perlu dilakukan.Keberhasilan pembangunan nasional pada tingkat yang signifikan ditentukan oleh mampu tidaknya pemerintah dengan seluruh jajarannya memainkan peranan dan fungsinya yang bermuara pada pelaksanaan yang efisien dan efektif.(Siagian.2000,h.151)

1.) Langkah- langkah dalam Pembangunan Administrasi

Telah umum diketahui bahwa cirri- cirri kegiatan pembangunan ialah dilaksanakan secara sadar , komprehensif,terencana ,bertahap, dan berkesinambungan.Telah dimaklumi juga bahwa pembangunan nasional diarahkan pada pencapaian tujuan akhir bangsa yang bagaimanapun dirumuskan dan ditujukan pada peningkatan kesejahteraan keseluruhan masyarakat.Penyelenggaraannya memerlukan suatu sistem administrasi yang andal dalam arti mampu mengambil Sembilan langkah secara tepat,diantaranya ialah (a) penumbuhan motivasi,(b) perimusan dan pengambilan keputusan politik,(c) peletakan dasar hukum,(d) perumusan rencana pembangunan nasuoanal,(e) merinci rencana menjadi program kerja ,(f) penentuan proyek – proyek pembangunan ,(g)implementasi kegiatan pembangunan ,(h)penilaian hasil- hasil yang dicapai ,serta ((i) pencapaian dan penggunaan suatu sistem umpan balik. .(Siagian .2000 .h,151-157)

2.) Paradigma Baru Administrasi

Pembangunan Nasional menuntut aparatur pemerintah memainkan peranan yang dominan.Untuk itu ,para pakar administrasi pembangunan telah mengembangkan sejumlah paradigma baru administrasi negara.Memang harus diakui bahwa paradigam tersebut merupakan kondisi yang ideal dan oleh tidak serta terpenuhi.akan tetapi tidak ada pilihan lain kecuali berupaya untuk mewujudkannya.Paradigma baru administrasi menurut sudut pandang Sondang P. siagian ialah sebagai berikut

Aparatur yang Berdaya Guna

Paradigma ini sesungguhnya merupakan salah satu paradigam klasik akan tetapi ternyata relevan bagi setiap jenis organisasi , termasuk organisasi pemerintahan, baik dalam rangka pelaksanaan kegiatan rutin apabila dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Bahkan daya guna atau efisiensi merupakan salah satu prinsip manajemen yang harus selalu dipegang teguh oleh semua pihak. Disoroti khusus dari sudut administrasi pembangunan, alasan fundamental untuk mengatakan demikian ialah karena pemerintah selalu dihadapkan kepada situasi kelangkaan karena keterbatasan kemampuan penyediaan dana ,sarana,prasarana,sumber daya manusia yang ahli,terampil ,dan waktu.

Aparatur yang Berhasil Guna

Aparatur yang berhasil guna atau efektif berrati mampu memanfaatkan dana ,sarana,prasarana,dan sumber daya manusia yang telah ditentukan atau dialokasikan dengan hasil yang optimal.dalam waktu tertentu yang telah ditentukan pula.Pengertian tersebut menunjukkan bahwa efektifitas kerja merupakan saudara kembar dari efisiensi.

“Salah satu implikasi dari paradigam ini dalam praktek ialah bahwa agar mampu bekerja secara efektif, bukan hanya penting menyadari keterbatasan yang dihadapi, akan tetapi juga etos kerja yang menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan, selalu diperlukan konsep baru dan ide baru.konsep dan ide baru hanya akan timbul jika para pelaksana berfikir dan bertindak secara inovatif.Hasilnya ialah cara berfikir baru , cara bertindak baru,metode kerja baru,dan pendekatan technical yang baru pula.Alasan berfikirnya ialah bahwa dalam pelaksanaan tugas , selalu ada tempat untuk

perbaikan dan peningkatan.dengan perkataan lain “cara kerja terbaik tidak pernah mencukupi”..(Siagian . 2003),h.151).

Perlu ditekankan bahwa permasalahan produktifitas bukan sama- sama karena keterbatasan,melainkan berkaitan dengan banyaknya variable yang turut menentukan..Faktor-faktor tersebut antara lain;(a) latar belakang hidup para pelaksana ,(b) kemampuan , baik dari arti fisik maupun mental ,(c) tipe kepribadian yang bersangkutan ,(d) persepsi tentang kehidupan organisasional,(e)sistem dan peringkat nilai yang dianut ,(f) motifasi berkarya,dan (g) penugasan oleh organisasi yang tepat dalam arti sesuai dengan pengetahuan ,ketrampilan,bakat,minat, dan pengalaman tenaga yang bersangkutan.(Siagian2003.h.161)

Aparatur yang Bersih

Telah diketahui bahwa suatu pemerintahan yang demokratis tidak pernah menginginkan adanya paratur yang tidak bersih.Apakah dinyatakan secara eksplisit atau sekedar implisit, mewujudkan aparatur yang bersih merupakan baian integral dari kebijaksanaan umum yang ditempuh oleh pemerintah suatu negaradalam menjalankan roda pemerintahan.

“Menurut Sondang P.Siagian harus diakui bahwa betapapun gencarnya upaya yang dilakukan dalam menciptakan aparatur yang bersih, patologi birokrasi selalu ada dalam pemerintahan manapun.Patologi birokrasi pada dasarnya dapat dikategorikan dalam lima kelompok,yaitu:

- Patologi yang timbul karena persepsi yang ditumbuh dan dikembangkan oleh kelompok pimpinan bahwa masyarakatmenerima adanya”jarak kekuasaan”(power distance) antara mereka dengan rakyat.

- Patologi karena orientasi kekuasaan bukan karena orientasi pelayanan.
- Patologi karena ketidakmampuan kelompok pimpinan menerapkan gaya manajerial yang situasional.
- Patologi karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan dan ketrampilan para pelaksana.
- Patologi karena terjadinya primordialisme, kroniisme, dan nepotisme.
- Patologi karena tindakan para anggota birokrasi yang mengabaikan norma-norma etika yang ada.
- Patologi karena dilanggarnya peraturan perundang-undangan.
- Patologi karena dekatnya para birokrat dengan para pengusaha yang berakibat pada kolusi.
- Patologi yang mengemuka karena perilaku disfungsional para anggota birokrasi, dan
- Patologi karena budaya birokrasi yang tidak kondusif dalam penciptaan, penumbuhan, dan pemeliharaan etos kerja yang tercermin dalam loyalitas kepada negara, disiplin kerja, kerajinan, dan ketekunan.”

(Siagian.2003,h.161-162)

Oleh karena itu ,untuk memenuhi kebutuhan tersebut di lingkungan pemerintahan mutlak terjadi peningkatan profesionalisme, dan pengetahuan serta ketrampilan yang spesifik antar lain melalui pendidikan dan pelatihan sebagai instrument pemutakhiran.Telah umum diketahui bahwa yang dimaksud dengan profesioalisme ialah keandalan dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu yang tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami.

Aparatur yang Tanggap

Tidak dapat dipungkiri bahwa karena dinamika masyarakat dan berkat kemajuan yang dicapai oleh suatu negara bangsa melalui pembangunan dalam berbagi segi kehidupan dan penghidupan, akan timbul berbagai aspirasi baru, harapan baru, kebutuhan baru, dan tuntutan baru. Terhadap semua inilah dibutuhkan aparatur yang responsive dan tanggap. Tidak tanggap berarti kekecewaan rakyat yang pada gilirannya mungkin berakibat pada timbulnya 'krisis kepercayaan pada pemerintah'.

Suatu krisis dapat dianalogikan dengan virus penyakit yang apabila tidak dapat diobati dengan cepat dan tepat, akan berkembang biak sedemikian rupa sehingga mengobatinya akan menjadi lebih sulit. Demikian juga halnya dengan krisis yang tidak cepat diatasi akan melahirkan krisis baru yang apabila tidak diatasi dengan segera tidak mustahil menimbulkan keresahan di masyarakat apabila terjadi.

Aparatur yang Antisipatif dan Proaktif

Kenyataan hidup yang pasti akan dihadapi ialah terjadinya perubahan. Artinya aparatur pemerintah akan menghadapi lingkungan yang dinamis. Perubahan yang terjadi dapat relative lambat, akan tetapi juga mungkin terjadi dengan cepat. Mungkin pula tanpa gejala atau gejala lemah dan mungkin juga gejala yang kuat.

Aparatur yang antisipatif dan proaktif adalah yang mampu mengenali sifat, jenis, dan bentuk perubahan yang terjadi, dan mengantisipasinya secara dini. Artinya, tidak menunggu sampai terjadi sesuatu yang baru yang memberikan reaksi yang dianggap perlu. Jika cara demikian yang ditempuh, mengatasi gejala

yang akan timbul akan menjadi makin sulit apalagi jika sempat membawa “korban” apakah dalam arti jiwa manusia, harta, benda, atau disintegrasi sosial.

Antisipasi yang tepat biasanya disertai dengan sikap yang proaktif. bersikap proaktif tidak hanya berarti mampu mendeteksi gejala-gejala perubahan yang timbul. Bukan juga hanya berarti mampu menampung akibat perubahan tersebut. yang lebih mendasar ialah kemampuan mempengaruhi arah perubahan sehingga mendukung terpeliharanya kepentingan nasional.

Aparatur yang Mempunyai Visi

Visi adalah pernyataan tentang kondisi masa depan yang diinginkan. Visi biasanya dinyatakan secara formal tetapi umum dalam arti tidak rinci. Manajer puncaklah yang biasanya menentukan visi yang dimaksud. Akan tetapi visi harus menjadi milik semua orang dalam organisasi dan untuk itu perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah sebagai berikut.

- Melakukan sosialisasi sehingga semua anggota organisasi memahami makna yang hakiki dari visi tersebut yang pada gilirannya akan menumbuhkan komitmen untuk menumbuhkannya.
- Perumusan misi dalam arti menentukan dan mengambil langkah-langkah utama yang diperlukan.
- Merumuskan dan menentukan strategi yang dianggap paling tepat baik dalam arti strategi akbar, strategi dasar, strategi fungsional, maupun strategi operasional.
- Melakukan penilaian untuk menemukan faktor-faktor keberhasilan dan kekurangan berhasil atau bahkan mungkin kegagalan.

- Menjadikan hasil penilaian sebagai bahan umpan balik bagi seluruh upaya pencapaian tujuan.

(Siagian.2003.h,166-167)

Kesemuanya itu berarti bahwa aparatur pemerintah harus berorientasi ke masa depan .Orientasi masa depan tidak berarti mengabaikan sejarah karena masa kini adalah prosuk masa lalu.Dalam menyelenggarakan pembangunan, aparatur pemerintah perlu memahami sejarah dan mampu belajar daripadanya agar- faktor –faktor keberhasilan dapat dimanfaatkan dan dikembangkan dan pada waktu yang bersamaan kesalahan yang mungkin pernah dilakukan tidak terulang lagi.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto (1990:309) bahwa: penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Menurut Arikunto (2001:48) bahwa Penelitian dengan format deskriptif bertujuan menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variable yang timbul di masyarakat yang menjadi obyek penelitian itu. Kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi, maupun variable tertentu. “Dengan kata lain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk memperoleh makna yang mendalam tentang suatu fenomena dengan jalan mengumpulkan fakta-fakta dan keterangan yang berhubungan dengan fokus dan tujuan penelitian.

Untuk melaksanakan penelitian dengan pendekatan kualitatif, seorang peneliti harus memperhatikan ciri-ciri yang mencakup latar alamiah, manusia sebagai alat atau instrument, metode kualitatif, analisa deskriptif lebih mementingkan proses daripada hasil, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, desain yang bersifat sementara serta hasil penelitian yang dirundingkan dan disepakati bersama.

Sedangkan data yang dikumpulkan berupa kata –kata ,gambar dan bukan angka-angka ,hal ini dijabarkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.Selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan –kutipan untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut (Moloeng ,2002 :4 – 8)

Dengan demikian dalam penelitian ini jenis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan proses distribusi Pupuk Subsidi yang diperuntukan bagi masyarakat petani di kawasan Kabupaten Ponorogo.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam sebuah penelitian kualitatif bertujuan untuk :

- Membatasi studi, dalam hal ini fokus akan membatasi bidang inkuiri.
- Memenuhi kriteria inklusi –eksklusi atau memasukan – mengeluarkan (*inclusion- exclusion criteria*) suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan .Sehingga dengan penetapan fokus yang jelas dan mantap , seorang peneliti dapat membantu keputusan yang tepat tentang data mana yang perlu dimasukan dan dikumpulkan dari data – data yang sedang dikumpulkan (Moloeng,2002:63).

Oleh karena itu penetapan fokus penelitian berperan sangat penting dalam menentukan batas penelitian .Dengan bimbingan dan arahan suatu fokus, seorang peneliti akan tahu data mana yang relevan atau tidak.

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan maka fokus penelitian yang dapat ditetapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Mekanisme Dalam Distribusi Pupuk subsidi pada masyarakat petani daerah khususnya kawasan Kabupaten Ponorogo secara umum diantaranya meliputi :
 - a) Sosialisasi program Pupuk Bersubsidi.
 - b) Kriteria pendistribusian pupuk subsidi di Kawasan Ponorogo.
 - c) Mekanisme pendistribusian pupuk di Kabupaten Ponorogo.
 - d) Proses distribusi pupuk subsidi bagi masyarakat pertanian.
2. Peran pihak – pihak yang terkait dalam pendistribusian pupuk :
 - a) Pihak Dinas Indagkop dan UKM.
 - b) Pihak koperasi tani.
 - c) Kelompok masyarakat tani.
3. Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi dalam proses distribusi pupuk bersubsidi pemerintah bagi masyarakat tani khususnya Kabupaten Ponorogo.
 - a) Faktor pendorong.
 - b) Faktor penghambat.
 - c) Upaya yang dilakukan.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti menentukan lokasi di Kabupaten Ponorogo. Alasan yang

mendasari ialah mengingat sektor pertanian masih merupakan sektor andalan perekonomian Kabupaten Ponorogo , sehingga sudah selayaknya apabila sektor pertanian dianggap sebagai salah satu sektor yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ponorogo dan perlu mendapat perhatian khusus.

Sedangkan yang dimaksud dengan situs penelitian ialah tempat dimana peneliti menangkap fenomena sesungguhnya dari objek yang diteliti. Dengan demikian yang menjadi situs dalam penelitian ini adalah :

1. Dinas Indagkop dan UKM Kabupaten Ponorogo.
2. Koperasi- koperasi tani Kabupaten Ponorogo.
3. Masyarakat tani Kabupaten Ponorogo.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya , atau membaca tentang hal- hal yang berkenaan dengan topic yang diteliti. Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moeloeng, 2002:112-117) yang dimaksud dengan sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah “ kata – kata dan tindakan ,selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain .” Dengan demikian secara garis besar sumber data yang dimaksud dibedakan atas orang yang memberikan sumber data berupa kata- kata tindakan (informan), tempat berkenaan terjadinya peristiwa yang diteliti maupun dokumen sebagai sumber data dalam bentuk tertulis. Untuk itu jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dilapangan atau pada saat penelitian. Peneliti mengambil dari orang-orang yang paling mengetahui permasalahan yang ada sesuai dengan fokus penelitian, yaitu

- a) Kepala / Staff Dinas Industri Perdagangan dan UKM.
- b) Anggota Koperasi tani .
- c) Masyarakat Tani .

2. Data Sekunder.

Data Sekunder ialah data yang tidak diperoleh secara langsung di lapangan .data ini diperoleh peneliti dari pihak kedua ,ketiga dan seterusnya, yang berupa dokumen , arsip, laporan, catatan, dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data.

Pengertian teknik pengumpulan data menurut Arikunto adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang cara tersebut menunjuk pada suatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya.

Untuk memperoleh sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka prosedur pengumpulan data yang dilakukan melalui teknik-teknik sebagai berikut:

a. Wawancara (Interwiev)

Yaitu pengumpulan data dimana peneliti secara langsung mengajukan pertanyaan terhadap nara sumber untuk memperoleh data atau informasi yang

berkaitan dengan kajian penelitian, dalam wawancara tersebut persoalan yang ditanyakan adalah seputar permasalahan yang berkaitan dengan proses pembentukan peraturan desa. Selain itu dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan teknik wawancara seperti yang ditulis H.B Sutopo (1988:24). Beliau menulis bahwa wawancara dapat dilakukan secara informal untuk menanyakan pendapat responden tentang suatu peristiwa tertentu. Dalam hal-hal tertentu peneliti juga dapat menanyakan pandangan responden tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar peneliti lebih jauh. Masih menurut beliau, interview informal ini dapat dikemukakan pada waktu dan konteks yang dianggap tepat untuk mendapatkan data yang punya kedalaman dan dapat dilakukan berkali-kali sesuai dengan keperluan peneliti terhadap kejelasan masalah yang diteliti

b. Dokumentasi

Yaitu merupakan suatu cara untuk memperoleh data dengan melakukan pencatatan sumber-sumber data yang ada pada lokasi penelitian. Data ini merupakan data sekunder dan data-data pada umumnya sudah ada, yaitu : arsip-arsip, dokumen atau surat keputusan. Bisa juga dengan cara membaca, mempelajari dan menyalin dari buku-buku literatur serta bahan-bahan tertulis dalam melakukan pencatatan dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang disimpan atau ada dalam instansi terkait dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian

c. Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki langsung di lapangan guna

mendapatkan data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan, dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi ke kantor desa setempat

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian yang menggunakan metode deskriptif maka instrumen yang paling penting adalah peneliti sendiri. Adapun instrumen lain yang digunakan adalah

1. Catatan Lapangan (field note)

Catatan lapangan ini adalah dibuat setelah peneliti mengadakan pengamatan atau wawancara. Catatan ini merupakan hasil dari penelitian, yang di dengar, dilihat, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi data dalam penelitian kualitatif.

2. Pedoman Wawancara (interview)

Merupakan serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang memfokuskan pada permasalahan penelitian yang digunakan sebagai pedoman bagi peneliti dalam melakukan wawancara dengan informan.

3. Peneliti Sendiri

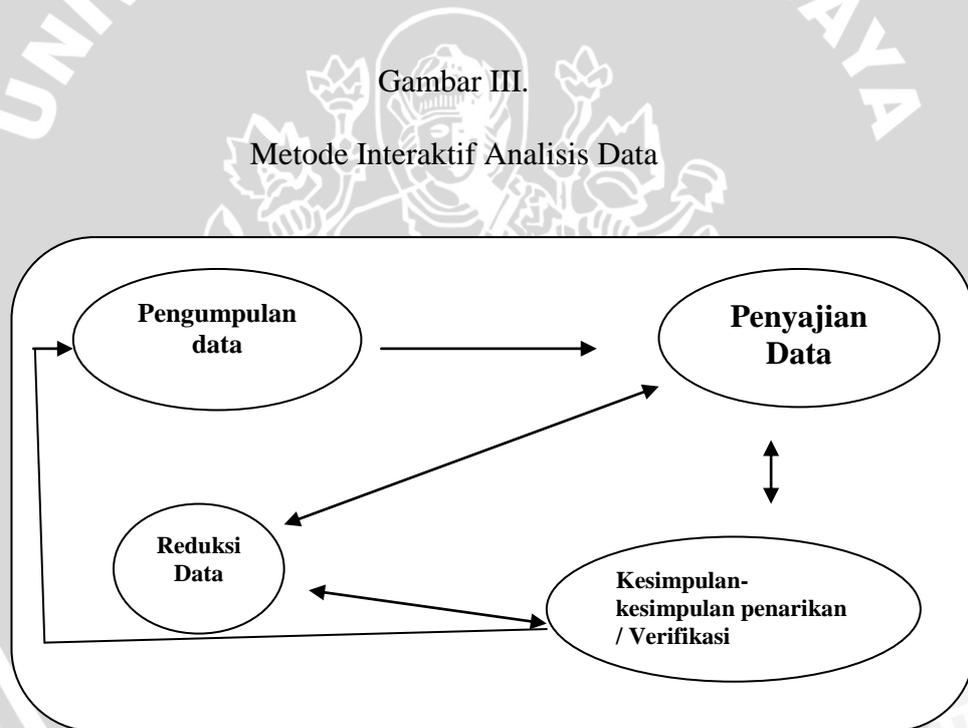
Dimana peneliti sendiri yang dijadikan instrumen, karena peneliti sekaligus sebagai perencana, pelaksana dan pengumpul data.

G. Analisis Data

Tujuan dari analisis data adalah untuk meringkas atau menyederhanakan data agar lebih berarti dan dapat di interpretasikan. Sesuai dengan jenis penelitian deskriptif, maka penelitian ini analisis datanya menggunakan metode analisis kualitatif yang dimulai dengan membaca, mempelajari, dan menelaah data yang telah dikumpulkan. Setelah data dikumpulkan, maka diadakan penyusunan,

pengolahan, dan interpretasi data dan diambil kesimpulan sementara. Analisis data menurut Moleong (2000: 103) merupakan proses mengorganisasikan dan menyuratkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang dirasakan oleh data. Analisis data kualitatif terdiri dari 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun alur kegiatan analisis kualitatif dijelaskan sebagai berikut :

Komponen- komponen analisis data tersebut kemudian oleh Miles dan Huberman disebut sebagai “Model Interaktif“ yang digambarkan sebagai berikut :



Sumber : Miles dan Huberman (1992:1)

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “ kasar “ yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan data. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Reduksi data bukanlah hal yang

terpisah dari analisa.. pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang di kode, mana yang dibuang, pola-pola mana yang diringkas dari sejumlah bagian yang tersebar, cerita-cerita apa yang berkembang, semuanya itu merupakan pilihan analisa. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi

2. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan penyajian data, kita dapat memahami apa yang sedang terjadi apa yang harus dilakukan. Hal ini digunakan untuk memudahkan bagi peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan gambar dan teks atau kumpulan kalimat.

3. Penyimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan dari penelitian sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data yang utuh selama penelitian berlangsung. Dari hasil data yang dikumpulkan dan dianalisa itu dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mengking sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran analisis dalam menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan. Tehnik yang digunakan untuk memverifikasi adalah ketekunan, pengamatan, kecukupan refrensial dan pengecekan ulang. Diatas telah dikemukakan tiga hal utama yaitu, reduksi data, penyampaian data

serta penyimpulan dan verifikasi sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut “analisis”. Teknik ini penulis gunakan untuk menjaga validitas data sehingga hasil penelitian diharapkan mampu bisa menjadi lebih baik dan optimal .



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fokus Penelitian

1. Mekanisme Dalam Distribusi Pupuk subsidi pada masyarakat petani daerah khususnya kawasan Kabupaten Ponorogo diantaranya :

a. Sosialisasi Program Subsidi Pupuk

Dalam proses sosialisasi ini dilakukan oleh pihak dari Dinas Indagkop dan UKM ,pihak koperasi terkait dan tidak lupa juga dari pihak pengecer yang secara tidak langsung menerangkan akan bagaimana proses subsidi pupuk kepada pihak petani pada saat yang bersangkutan yaitu petani mengambil jumlah pupuk yang dibutuhkannya.tidak jarang program sosialisasi pupuk bersubsidi ini juga disosialisasikan antar petani sendiri ketika bercengkrama di ladang bersama.Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Parwadi selaku bagian data dari Dinas Indagkop dan UKM,beliau menyatakan bahwa :

“.....Sosialisasi yang telah kami lakukan mengenai hal pupuk bersubsidi ini telah dapat kami katakan sebagian besar dapat berjalan dengan baik ,hal itu dapat terlihat dari animo masyarkat yang terus menerus bertanya kepada koperasi selaku pihak pengecer tentang persyaratan pengajuan untuk mendapatkan subsidi pupuk tersebut.salah satunya ialah petani yang bersangkutan harus terdaftar di kelompok petani yang bersangkutan sebagai awal untuk pembentukan RDKK (Rencana Definitf Kelompok Kerja)”(Sumber : wawancara; Kamis 10 Juni 2010,pukul 09.15 WIB)

Selain sebagai tugas pihak yang berkewenangan dalam proses distribusi ini yaitu dari pihak Dinas Indagkop dan UKM serta dari pihak koperasi tani secara tidak disadari dari pihak dalam yaitu petani sendiri melaukan upaya sosialisasi yang masih dibilang sepatah –patah.meskipun demikian hal ini sangat menggembarakan dari sudut pandang pihak Dinas Indagkop dan UKM bahwasanya program yang mereka upayakan telah sedikit banyak terdengar oleh masyarakat petani meskipun dapat dikatakan masih belum seutuhnya.Hal senada juga diungkapkan oleh pihak dari koperasi tani ,Bapak Suparlan.Beliau menyatakan bahwa :

“.....Saya mengamati program ini dari pertama saya mengajukan diri sebagai pengecer,memang dapat dikatakan bahwa program ini bertujuan baik dan dapat dikatakan sangat membantu dari pihak petani kecil atau petani yang mempunyai lahan yang tidak begitu luas.....” (Sumber: wawancara , Selasa 7 Juni 2010, pukul 13.30 WIB)

b. Krikteria pendistribusian pupuk subsidi di Kawasan Ponorogo.

Sistem pendistribusian pupuk di kawasan Ponorogo apabila dilihat lebih lanjut dapat ditemui ada karakteristik pendistribusian ialah pendistribusian pada pupuk bersubsidi dan pada pupuk non subsidi.Tentu dalam hal ini masyarakatlah yang dalam hal ini petani yang lebih mengetahui kelebihan dan kekurangan dari kedua tipe karakteristik pendistribusian tersebut.

Pupuk bersubsidi sekarang ini diberikan pemerintah melalui subsidi harga gas kepada industri pupuk. Subsidi harga gas kepada industri pupuk tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menjamin ketersediaan pupuk bagi petani dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah yaitu Harga Eceran

Tertinggi (HET). Sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 106/Kpts/SR.130/2/2004 tentang kebutuhan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dan Nomor 64/Kpts/SR.130/3/2005 tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat pengecer resmi.

Tabel II.
Syarat ,dan Kriteria dalam pendistribusian pupuk

No	Golongan pupuk	Syarat permintaan	Syarat pengajuan	Macam pupuk
1.	Pupuk non subsidi	Pemilikan lahan >25 ha.	Umum	Umum
2.	Pupuk bersubsidi	Pemilikan lahan < 25 ha.	RDKK	Urea, SP-36, ZA dan NPK

Sumber ; Dinas Inadgkop dan UKM th 2009

Jenis-jenis pupuk yang disubsidi sesuai Kepmen tersebut adalah pupuk Urea, SP-36, ZA dan NPK dengan komposisi 15 : 15 : 15 dan diberi label “Pupuk Bersubsidi Pemerintah.” Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah adalah : Pupuk Urea Rp. 1.050,- per kg; Pupuk ZA Rp. 950,- per kg; Pupuk SP-36 Rp. 1.400,- per kg; dan Pupuk NPK 1.600,- per kg. Jenis pupuk bersubsidi ini disediakan untuk pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan atau Hijauan Makanan Ternak. Perkebunan yang dimaksudkan disini adalah usaha milik sendiri atau bukan, dengan luasan tidak melebihi 25 hektar dan tidak membutuhkan izin usaha perkebunan.

Pupuk bersubsidi bukan diperuntukan bagi perusahaan perkebunan, perusahaan tanaman pangan, perusahaan hortikultura dan perusahaan peternakan. Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Sulistyono, SH, selaku kepala Dinas Indagkop dan UKM mengenai hal tersebut :

“.....Dalam kriteria yang ditentukan tentang wilayah pertanian yang berhak mendapatkan jatah pupuk bersubsidi selain yang bersangkutan dalam hal ini petani juga ada beberapa ketentuan yang lain diantaranya ialah ketentuan luas wilayah pertanian yang dikategorikan menjadi sasaran penyaluran pupuk bersubsidi. Hal ini dirasa sangat penting karena banyak diantara para petani yang memiliki lahan yang tidak selayaknya masuk dalam kriteria mendapat subsidi justru mereka mendapatkannya. Tetapi berbalik dengan petani yang seharusnya mendapatkan ketentuan subsidi justru tidak mendapatkan. Tolak ukur yang dijadikan ketentuan berhak tidaknya mendapat subsidi dalam hal ini dapat dilihat dari luas wilayah pertanian. Ukurannya ialah tidak melebihi 25 hektar...” (Sumber: wawancara, Senin 7 Juni 2010, pukul 15.00 WIB)

Hal yang berlainan juga diungkapkan oleh bapak Harjo Kusman. Beliau menyatakan bahwa:

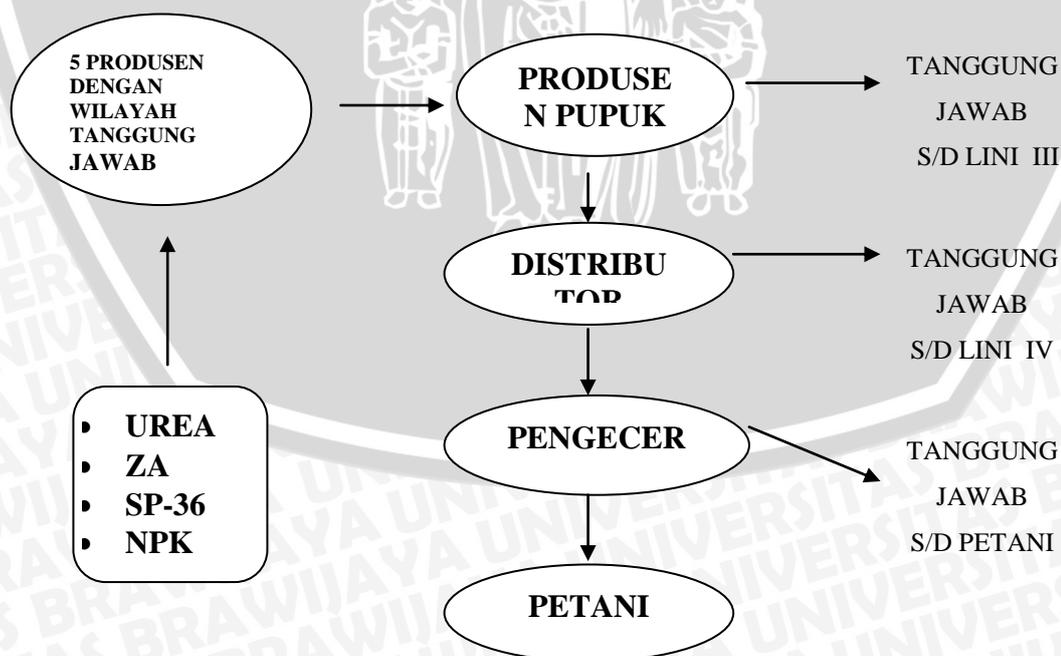
“.....mulai dari beberapa musim tanam yang lalu kami mendapatkan program dari pemerintah (pupuk bersubsidi) yakni ketentuan pengambilan pupuk di masing-masing koperasi yang telah ditentukan, dengan menyertakan ketrengan, luas wilayah dan masa tanam.....” (Sumber: wawancara, Senin 7 Juni 2010, pukul 15.30 WIB)

Terlepas dari hal tersebut kiranya pemerintah dalam hal ini dinas yang membawahi dalam proses pendistribusian pupuk bersubsidi lebih cermat lagi dalam pengolahan data di beberapa daerah persebaran pupuk bersubsidi di Ponorogo. Dalam penentuan Kriteria penerimaan pupuk bersubsidi tersebut telah jelas dipaparkan bahwa prioritas dari pendistribusiannya ialah mengutamakan dari golongan petani kecil dikarenakan kesulitan mereka yang untuk mendapatkan pupuk dapat dikatakan kalah bersaing dengan petani –petani besar dengan modal besar. Tetapi tidak menutup kemungkinan pemerintah juga memperhatikan nasib daripada petani kecil yang *single* di luar dari keanggotaan kelompok petani

c. Mekanisme pendistribusian pupuk di Kabupaten Ponorogo.

Gambar IV.

Struktur tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian



*Sumber : Dinas Indagkop dan UKM th 2009

Keterangan :

- Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik masing –masing produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk impor.
- Lini II adalah lokasi gudang produsen di wilayah ibukota provinsi dan unit pengantongan pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan.
- Lini III adalah lokasi gudang produsen dan distributor di wilayah kabupaten atau kota yang ditunjuk.
- Lini IV adalah lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah kecamatan dan atau desa yang ditunjuk sebagai pengecer.

Dalam proses pendistribusian pupuk pada para petani Kabupaten Ponorogo menggunakan mekanisme yang telah ada diatas sebagai mekanisme resmi yang digunakan dalam pendistribusian pada masyarakat tani.dengan hal –hal yang menyangkut kelancaran pada setiap lininya ada perlunya dikaji lebih lanjut tentang pihak –pihak yang berkewenangan diantaranya ialah Produsen ,Distributor ,pengecer dan tidak lupa kelompok tani .Beberapa aspek inilah yang nantinya akan menentukan lancar tidaknya proses distribusi pupuk pertanian,seperti yang dikemukakan oleh Bapak Sulisty, SH. Kepala Dinas Indagkop dan UKM.beliau menyatakan bahwa:

“.....Setelah melihat struktur mekanisme yang kita jalankan tersebut ,kedepannya diharapkan setiap lini baik itu dari produsen, distributor, pengecer dan terakhir kelompok tani dapat mengoptimalkan kinerjanya, karena apapun yang telah kami lakukan apabila tidak adanya kerjasama antar lini akan sia- sia saja.....” (Sumber: wawancara , Senin 7 Juni 2010, pukul 09.30 WIB)

Adapun dalam pendistribusian ke lapangan berbagai aspek yang berkaitan diantaranya Produsen ,Distributor ,pengecer dan kelompok tani perlu menyatukan gagasan dan misi agar supaya berjalannya distribusi ini dapat dengan lancar .Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini dinas yang terkait tidak dengan mudah menentukan pihak mana atau agen agen yang berhak berkecimpung dalam proses pendistribusian pupuk secara resmi,berikut ini adalah gambaran dan syarat bagaimana komponen tersebut dapat dipenuhi :

1. Produsen

Tanggung jawab sampai dengan lini III, dalam hal ini produsen wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari lini I sampai dengan lini III di wilayah tanggung jawabnya. Selain hal tersebut produsen juga wajib menyampaikan rencana pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk periode 3 (tiga)bulan ke depan di setiap wilayah tanggung jawabnya kepada direktur jenderal perdagangan dalam negeri , departemen perdagangan.

Diantara sekian Produsen Pupuk pertanian diantaranya ialah PT Pupuk Iskandar Muda , PT Pupuk Sriwijaya, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kaltim,.Dari uraian produsen pupuk diatas wilayah kabupaten Ponorogo berada di bawah lingkup PT Petrokimia Gresik dalam persebaran pupuk bagi petani.Hal tersebut menandakan bahwa setiap daerah telah mendapat jatah persebaran yang jelas dari pemerintah pusat khususnya yang menangani bidang pertanian .Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Sulistyono,SH ,Kepala Dinas Indagkop dan UKM, beliau meyakini bahwa :

“....Dalam bidang produsen pupuk khususnya pupuk pertanian daerah kabupaten Ponorogo berada di bawah wewenang PT Petrokimia Gresik....” (Sumber: wawancara , Senin 7 Juni 2010, pukul 09.30 WIB)

2. Distributor Pupuk

Tanggung jawab sampai dengan lini IV,dalam hal ini penunjukan sebagai distributor adalah perusahaan perorangan ataupun badan usaha , baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsen untuk melakukan pembelian , penyimpanan, penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam pertanian besar di wilayah tanggung jawabnya untuk dijual kepada petani atau kelompok tani melalui pengecer yang ditunjuknya.Seperti keterangan dari Bapak Sulistyio ,SH Kepala Dinas Indagkop dan UKM ,beliau menyatakan bahwa:

“....Dalam pendistribusian pupuk yang dalam hal ini distributor,pihak pemerintah sendiri menunjuk beberapa Agen ataupun badan usaha yang dirasa pemerintah Kabupaten mempunyai kemampuan untuk dijadikan distributor pupuk pertanian,.kalau tidak salah ada 5 atau 6 distributor resmi dari pihak pemerintah kabupaten Ponorogo.....” (Sumber: wawancara , Senin 7 Juni 2010, pukul 09.30 WIB)

Tabel V.

Distributor Pupuk di Kabupaten Ponorogo

NO	NAMA DISTRIBUTOR	JENIS PUPUK	ALAMAT
1.	UD. SUGEH WARAS	Pupuk Urea, SP-36, Superphos, ZA ,NPK	Jl. Jendral Sudirman ,Ponorogo.

		dan Organik	
2.	UD. PANDAWA JAYA MAKMUR	Pupuk Urea, SP-36, Superphos, ZA ,NPK dan Organik	Desa Campur Rejo ,Sambit ,Ponorogo
3.	UD.SABAR SUBUR	Pupuk Urea, SP-36, Superphos, ZA ,NPK dan Organik	Desa Ngunut, Babadan Ponorogo
4.	UD.SINAR MULIA	Pupuk Urea, SP-36, Superphos, ZA ,NPK dan Organik.	Desa Mlilir Ponorogo
5.	UD. BUANA KARYA	Pupuk Urea, SP-36, Superphos, ZA ,NPK dan Organik.	Jl Terate Ponorogo
6.	UD. RUMINI	Pupuk Urea.	Desa Njuruk , Sawoo. Ponorogo

*Sumber : Dinas Indagkop dan UKM th 2009

a) Persyaratan dan penunjukan sebagai Distributor

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 Tentang Perubahan atas peraturan menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Tentang bagaimana persyaratan menjadi Distributor yang kedepannya diharapkan

tugas dari distributor yang benar akan tercipta proses distribusi yang sehat ialah sebagai berikut :

- 1) Distributor dapat berbentuk usaha perorangan atau badan usaha yang baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
- 2) Bergerak dalam bidang usaha Perdagangan Umum.
- 3) Memiliki kantor dan pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha perdagangan di tempat kedudukannya.
- 4) Memiliki syarat- syarat umum untuk menjalankan kegiatan perdagangan antara lain surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP),Tanda Daftar Perusahaan (TDP),Surat Izin Tempat Usaha (SITU),dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 5) Distributor wajib memiliki /menguasai sarana gudang dan alat transportasi yang dapat menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Wilayah Tanggung Jawabnya.
- 6) Mempunyai jaringan Distribusi di wilayah tanggung jawabnya yang ditetapkan oleh Produsen.
- 7) Distributor wajib menunjuk minimal 2 (dua) pengecer di setiap Kecamatan / Desa yang merupakan daerah sentra produksi pertanian di wilayah tanggung jawabnya.
- 8) Memiliki permodalan yang cukup dan disepakati oleh Produsen.
- 9) Memiliki persyaratan lain yang ditetapkan oleh Produsen.
- 10) Mempunyai surat rekomendasi sebagai Distributor pupuk dari Dinas Perindag / Kota setempat.

Hal yang demikian juga diungkapkan oleh bapak Suparlan, salah satu agen distributor resmi yang ditunjuk oleh pemerintah dalam upaya pendistribusian pupuk. Beliau menyatakan bahwa :

“.....Dalam melakukan distribusi yang dalam hal ini berkaitan dengan pupuk kami selaku distributor selalu berkoordinasi dengan pihak dari dinas- dinas terkait dan para produsen serta pengecer sebagai pihak dibawah kami ,karena hal tersebut sangat penting apabila ada beberapa hal yang kiranya dapat kami usahakan selaku sebagai distributor”

(Sumber: wawancara , Selasa 7 Juni 2010, pukul 13..30 WIB)

b) Tugas dan Tanggung Jawab Distributor

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 Tentang Perubahan atas peraturan menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Terlepas dari persyaratan sesuatu badan usaha atau orang yang berkeinginan menjadi distributor ada beberapa ketentuan lain yang harus dipatuhi oleh seseorang distributor ,

- 1) Distributor bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi dari lini III sampai lini IV di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah ,harga ,tempat, waktu dan Mutu.

- 2) Distributor bertanggung jawab agar pupuk Bersubsidi sesuai dengan jumlah dan jenisnya sampai dan diterima oleh pengecer sesuai nama ,alamat, dan wilayah tanggung jawabnya yang diajukan pada saat pembelian .
- 3) Distributor menyalurkan Pupuk Bersubsidi hanya kepada Pengecer yang ditunjuk sesuai dengan harga yang ditetapkan Produsen.
- 4) Distributor melaksanakan sendiri kegiatan pembelian dan penyaluran Pupuk Bersubsidi,oleh karenanya :
 - Distributor tidak dibenarkan melaksanakan penjualan Pupuk Bersubsidi kepada pedagang dan/atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai pengecer dari Distributor yang bersangkutan; dan
 - Distributor tidak dibenarkan memberikan kuasa untuk pembelian Pupuk Bersubsidi kepada pihak lain , kecuali kepada petugas Distributor yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Surat Kuasa dari Pengurus /Manajer Distributor yang bersangkutan.
- 5) Distributor berperan aktif membantu Produsen melaksanakan penyuluhan dan promosi.
- 6) Distributor bersama – sama dengan produsen melakukan pembinaan,pengawasan, dan penilaian terhadap kinerja pengecer dalam melaksanakan penjualan Pupuk Bersubsidi kepada petani dan/Kelompok Tani di wilayah tanggung jawabnya serta melaporkan hasil pengawasan dan penilaiannya tersebut kepada produsen yang menjualnya.
- 7) Distributor wajib memasang papan nama dengan ukuran 1 x 1,5 m sebagai distributor pupuk yang resmi di wilayah tanggung jawabnya.

- 8) Distributor melaksanakan koordinasi secara periodic dengan instansi terkait di wilayah tanggung jawabnya.
- 9) Distributor wajib menyampaikan laporan penyaluran dan persediaan pupuk di gudang yang dikelolanya ,secara periodik setiap akhir bulan kepada produsen dengan tembusan kepada instansi terkait sesuai bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam lampiran X peraturan ini.
- 10) Distributor menetapkan lingkup wilayah tanggung jawab dalam penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Pengecer yang ditunjuknya.
- 11) Distributor wajib menyampaikan daftar pengecer kepada produsen dan Kepala Dinas Kabupaten /Kota setempat yang membidangi perdagangan setiap akhir tahun.

Hal yang demikian juga diungkapkan oleh Bapak Suparlan, salah satu agen distributor resmi yang ditunjuk oleh pemerintah dalam menyikapi tugas dan tanggung jawab distributor, beliau menyatakan bahwa:

“.....Kami selaku distributor resmi yang ditunjuk oleh pemerintah berupaya memnuhi segala yang diwajibkan oleh ketentuan resmi yang dikeluarkan pemerintah, seperti pemasangan papan nama sebagai distributor resmi ,penyampaian data pengecer resmi yang mengambil pupuk dari toko kami kepada pemerintah.....” (Sumber: wawancara , Selasa 7 Juni 2010, pukul 13..30 WIB)

c) **Ketentuan Umum Pembuatan kontrak/ surat perjanjian jual beli (SPJJ) pupuk Bersubsidi antar produsen dengan distributor.**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 Tentang Perubahan atas peraturan menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Dalam penyalurannya, pengecer mengajukan kontrak pada produsen bahwasanya yang bersangkutan dengan ketentuan yang telah dipenuhi bersedia menjadi pengecer pupuk bersubsidi. Kedepannya mengenai hal yang menyangkut tentang hubungan kontrak tersebut biasanya ada pada pihak distributor yang lebih mempunyai kewenangan apakah akan tetap memakai jasa pengecer tersebut atau tidak memperpanjang kontraknya tergantung pada kinerja pengecer yang bersangkutan.

- 1) Kontrak / surat perjanjian jual beli (SPJJ) pupuk bersubsidi antar produsen dengan Distributor untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Perpanjangan kontrak dapat dilaksanakan, apabila menurut penilaian Produsen bahwa Distributor tersebut memperlihatkan kinerja yang baik.
- 2) Pada dasarnya alokasi Pupuk Bersubsidi dari Produsen ke Distributor yang akan dituangkan dalam kontrak /SPJB Pupuk Bersubsidi berpedoman kepada rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi di wilayah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Produsen dengan memperlihatkan alokasi Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

- 3) Dalam kontrak /SPJJ ditetapkan harga penyerahan pupuk dari Produsen kepada Distributor dan harga jual pupuk paling tinggi dari Distributor ke pengecer.
- 4) Dalam kontrak /SPJJ ditetapkan wilayah tanggung jawab penyalur Pupuk Bersubsidi dari Distributor dengan menyebutkan wilayah kabupaten /Kota dan /Kecamatan yang berada dalam lokasi wilayah tanggung jawab Produsen yang bersangkutan.
- 5) Alokasi penyaluran pupuk selama 1 (satu) tahun sesuai masa kontrak /SPJJ disebutkan secara rinci dalam alokasi bulanan per jenis pupuk.
- 6) Kontrak/ SPJJ Pupuk Bersubsidi harus memuat sanksi bagi Distributor yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang berlaku.
- 7) Pencantuman ketentuan sanksi dalam Kontrak/ SPJB antar Produsen dengan Distributor dapat berupa peringatan tertulis ,penghentian pemberian alokasi Pupuk Bersubsidi dan/ pemutusan hubungan kerja /kontrak dengan Distributor yang bersangkutan.
- 8) Bentuk atau format susunan kontrak/SPJB dibuat sesuai ketentuan yang berlaku umum dalam setiap pembuatan perjanjian.

Hal kontrak antara produsen dan distributor telah diatur pada peraturan pemerintah yang dalam hal ini dibawah langsung oleh dinas industri dan perdagangan,hal –hal yang menyangkut dalam isi kontrak tersebut diantaranya ialah ketentuan antara distributor dengan produsen pupuk yang menyangkut tentang penentuan lama kontrak dan sanksi –sanksi yang berhak diterima oleh

distributor apabila menyalahi dari ketentuan isi kontrak yang ada. Lebih lanjut berikut adalah komentar dari bapak Suparlan selaku distributor resmi, beliau menyatakan bahwa:

”.....Sebagai distributor resmi memang banyak peraturan yang harus kami lalui, seperti mengenai isi kontrak perjanjian. Namun ini kami rasa sangat penting dikarenakan dengan mengathui hal yang demikian kami dapat terhindar dari sanksi yang dapat kami teriama semisalnya kami tidak mengathui ketentuan mana saja yang harus kami penuhi sebagai upaya menjadi distributor yang resmi dan benar.....” (Sumber: wawancara, Selasa 7 Juni 2010, pukul 13..30 WIB)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Sulistyo, SH Kepala Dinas Indagkop dan UKM, yang ditemui di tempat berbeda, beliau menyampikan bahwa:

“.....Mengenai beberapa hal yang mesti dipenuhi oleh seorang distributor entah itu tugas dan tanggung jawab, serta ketentuan kontrak yang harus diurus dengan pihak produsen. Kesemuanya mengandung artian bahwa dalam proses distribusi ini kita memang membutuhkan pihak dari produsen yang memang mau bekerja sama dengan kami dengan bersih dan benar, agar supaya kedepannya hal –hal yang tidak diinginkan dapat kami hindari bersama.....” (Sumber: wawancara, Senin 7 Juni 2010, pukul 09.30 WIB)

3. Pengecer

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 Tentang Perubahan atas peraturan menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang pengadaan dan

penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Pengecer resmi yang selanjutnya disebut dengan pengecer adalah perseorangan kelompok tani, dan badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan yang berkedudukan di kecamatan atau desa yang ditunjuk oleh distributor dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya secara langsung hanya kepada petani atau kelompok tani.

Dengan menitikberatkan pada orientasi kelompok tani maka secara tidak langsung dalam hal pendistribusian pupuk pertanian kelompok tani menjadi salah satu hal yang mendukung dalam upaya pendistribusian pupuk secara benar dan terarah. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sulistyono, SH, Kepala Dinas Indagkop dan UKM, beliau menyatakan bahwa :

“.....Kita sangat merasa terbantu dengan adanya kelompok tani yang telah ada di dalam masyarakat. dengan adanya kelompok tani tersebut akan memudahkan program- program kita yang bersangkutan dengan dunia pertanian. seperti halnya dengan pendistribusian pupuk misalnya.....”

(Sumber: wawancara , Senin 7 Juni 2010, pukul 09.30 WIB)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Teguh selaku dari pihak pengecer, yang ditemui di tempat berbeda, beliau menyampaikan bahwa:

“.....Sebagai seorang pengecer kami selalu berkoordinasi dengan distributor kami , yaag mana dalam hal ini kepada distributorlah kami mempunyai data – data kelompok tani yang hendak kami datangi.....” (Sumber: wawancara ,

Senin 7 Juni 2010, pukul 09.30 WIB)

a) Persyaratan Penunjukan sebagai Pengecer

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 Tentang Perubahan atas peraturan menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Pengecer dapat berbentuk usaha perorangan ,kelompok tani ,dan badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang memiliki Surat izin usaha Perdagangan (SIUP) dan tanda daftar perusahaan (TDP).

- 1) Bergerak dalam bidang usaha Perdagangan Umum.
- 2) Memiliki pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha atau mengelola perusahaannya.
- 3) Memiliki atau menguasai sarana untuk penyaluran Pupuk Bersubsidi guna menjamin kelancaran penyaluran Pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya masing-masing.
- 4) Memiliki permodalan yang cukup dan disepakati oleh Distributor.
- 5) Memiliki persyaratan lain yang ditetapkan oleh Distributor.

Sebagai seorang pengecer ada beberapa ketentuan yang dikeluarkan oleh pihak – pihak yang berkepentingan dalam hal distribusi pupuk bersubsidi dalam hal ini pihak dinas Industri dan Perdagangan.Ketentuan yang dimaksud adalah beberapa persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh pihak pengecer resmi . hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Sulistyono ,SH selaku kepala Dinas Indagkop dan UKM .Beliau menyatakan bahwa :

“.....Persyaratan yang dikeluarkan memamngsecara tegas mengatur tentang ketentuan dari pihak pengecer itu sendiri dan bagaimana tugas serta ketentuan lain yang selayaknya dipenuhi oleh yang berkepentingan.....”

(Sumber: wawancara , Senin 7 Juni 2010, pukul 09.30 WIB)

b. Ketentuan Umum Pembuatan Kontrak / surat Perjanjian jual beli (SPJB) pupuk bersubsidi antara Distributor dengan Pengecer.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 Tentang Perubahan atas peraturan menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Dalam penyalurannya ,pengecer mengajukan kontrak pada produsen bahwasanya yang bersangkutan dengan ketentuan yang telah dipenuhi bersedia menjadi pengecer pupuk bersubsidi.kedepanya mengenai hal yang menyangkut tentang hubungan kontrak tersebut biasanya ada pada pihak distributor yang lebih mempunyai kewenangan apakah akan tetap memakai jasa pengecer tersebut atau tidak memperpanjang kontrak nya tergantung pada kinerja pengecer yang bersangkutan.

- Kontrak / Surat Perjanjian jual beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antar Distributor dengan Pengecer dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun,Perpanjangan kontrak dapat dilaksanakan ,apabila menurut Distributor bahwa Pengecer tersebut memperlihatkan kinerja yang baik.
- Pada dasarnya alokasi Pupuk Bersubsidi dari distributor kepada pengecer yang akan dituangkan dalam kontrak/ SPJB Pupuk Bersubsidi berpedoman kepada rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi di wilayah

yang menjadi tanggung jawab masing-masing Distributor dengan memperhatikan alokasi Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh produsen.

- Dalam kontrak /SPJB ditetapkan harga penyerahan pupuk dari distributor kepada pengecer serata jaminan dan kewajiban Pengecer untuk menjual secara tunai pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/Kelompok Tani di gudang Pengecer sesuai HET dalam kemasan 50 kg atau 20 kg.
- Dalam kontrak /SPJB ditetapkan wilayah tanggung jawab penyaluran Pupuk Bersubsidi dari pengecer dengan menyebutkan wilayah kecamatan dan /Desa yang berada dalam lokasi wilayah tanggung jawab Distributor yang bersangkutan.
- Alokasi pupuk selama 1 (satu) tahun sesuai masa kontrak /SPJB disebutkan secara rinci dalam alokasi bulanan per jenis pupuk.
- Kontrak/SPJB Pupuk Bersubsidi harus memuat sanksi bagi pengecer yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyaluran Pupuk bersubsidi yang berlaku.
- Pencantuman ketentuan sanksi dalam kontrak /SPJB antar distributor dengan pengecer dapat berupa peringatan tertulis ,penghentian ,pemberian alokasi Pupuk Bersubsidi dan/ pemutusan hubungan kerja /kontrak dengan Pengecer yang bersangkutan
- Bentuk atau format susunan kontrak/SPJB dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum dalam setiap pembuatan perjanjian.

Hal mengenai kontrak antara pengecer dan distributor telah diatur pada peraturan pemerintah yang dalam hal ini dibawah langsung oleh dinas industri dan perdagangan,hal –hal yang menyangkut dalam isi kontrak tersebut

diantaranya ialah ketentuan antara pengecer dengan produsen pupuk yang menyangkut tentang penentuan lama kontrak dan sanksi –sanksi yang berhak diterima oleh pengecer apabila menyalahi dari ketentuan isi kontrak yang ada. Lebih lanjut berikut adalah komentar dari bapak Eko selaku pengecer, beliau menyatakan bahwa:

‘.....memang ada beberapa hal yang mesti kami penuhi ,tetapi kesemuanya tersebut hanya menyangkut administratifnya saja, mengenai hal yang menyangkut lapangan kami berkoordinasi dengan pihak distributor tentang wilayah yang menjadi daerah operasi kami karena ada beberapa kasus di lapangan ada beberapa pihak dari pengecer sama –sama memiliki wilayah operasi yang sama .hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi dengan pihak distributor yang bersangkutan’(Sumber: wawancara , Rabu 9 Juni 2010, pukul 11.30 WIB)

4. Kelompok Tani

Definisi kelompok Tani menurut peraturan menteri Pertanian NO/66/Permentan / OT.140/ 12 /2006 (Deptan) tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi (HET)pupuk bersubsidi untuk sector pertanian .Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktifitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada suatu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati atau Wali kota atau pejabat tani yang ditunjuk.

Kelompok tani ini berfungsi untuk mengoordinir dan mendata setiap petani yang ada di setiap desa atau daerah. Cara yang ditempuh Dinas - Dinas terkait untuk mengajak petani bergabung dalam kelompok tani yang ada di setiap kota.

1. Memberikan pengertian dan penyuluhan bagi petani mandiri atau individu untuk bergabung dengan kelompok tani .dengan menjabarkan kelebihan dan kemudahan jika bergabung dengan kelompok tani .(misalnya, dijelaskan kemudahan dalam pengambilan kredit usaha tani , kemudahan dalam pembelian bibit, dan lain sebagainya).
2. Memberikan peraturan yang tegas bagi petani individu, untuk pembelian pupuk diharuskan membuat Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan nama kelompok tani.
3. Kemudahan bagi petani jika Organisme Pengganggu tanaman (OPT) ataupun bencana alam , lebih mudah untuk didata dan secara tepat sasaran dapat ditangani secara langsung.

Dengan menitikberatkan pada orientasi kelompok tani maka secara tidak langsung dalam hal pendistribusian pupuk pertanian kelompok tani menjadi salah satu hal yang mendukung dalam upaya pendistribusian pupuk secara benar dan terarah. Seperti yang Disampaikan oleh Bapak Sulisty,SH ,Kepala Dinas Indagkop dan UKM, beliau meyakini bahwa :

“Kita sangat merasa terbantu dengan adanya kelompok tani yang telah ada di dalam masyarakat.dengan adanya kelompok tani tersebut

akan memudahkan program- program kita yang bersinggungan dengan dunia pertanian.seperti halnya dengan pendistribusian pupuk misalnya.....” (Sumber: wawancara , Senin 7 Juni 2010, pukul 09.30 WIB)

Memang dalam hal ini dengan adanya Kelompok Tani memudahkan dinas –dinas terkait dalam memantau pembangunan pertanian khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Tabel .III.

Jumlah Kelompok Tani Kabupaten Ponorogo

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELOMPOK	KELOMPOK TANI		KONTAK TANI (dalam sebulan)	REGU PEMBASMI HAMA / (orang)
			DEWASA / (orang)	JUMLAH / (orang)		
1.	Ngrayun	9	10	21	12 X	15
2.	Slahung	15	16	21	13 X	16
3.	Bungkal	18	16	24	18 X	15
4.	Sambit	20	24	27	12 X	17
5.	Sawoo	23	16	30	14 X	18
6.	Sooko	25	18	31	14 X	18
7.	Pulung	20	23	23	14 X	12
8.	Mlarak	9	22	22	16 X	11

9.	Siman	17	33	35	11 X	17
10.	Jetis	9	21	24	18 X	13
11.	Balong	12	27	30	12 X	15
12.	Kauman	10	28	31	14 X	19
13.	Jambon	10	34	34	19 X	13
14.	Badegan	20	31	32	16 X	21
15.	Sampung	9	29	35	11 X	24
16.	Sukorejo	11	18	20	17 X	11
17.	Ponorogo	18	26	28	12 X	24
18.	Babadan	14	31	34	21 X	22
19.	Jenangan	15	32	37	21 X	24
20.	Ngebel	7	25	27	11 X	17
21.	Pudak	14	14	16	9 X	12

*Sumber : Dinas Indagkop dan UKM th 2009

d. Proses Distribusi Pupuk Subsidi Bagi Masyarakat Pertanian.

Pada tahap inilah pihak –pihak yang terkait dalam hal pendistribusian pupuk bersubsidi memberikan secara langsung sosialisasi ataupun kegiatan distribusi yang diperuntukan bagi para petani yang telah memenuhi beberapa ketentuan diantaranya ialah

- Pihak yang bersangkutan yang dalam hal ini petani telah mengajukan beberapa ketentuan syarat yaitu telah terdaftar sebagai salah satu anggota daripada kelompok tani yang ada di kabupaten Ponorogo.

- Selanjutnya setelah yang bersangkutan benar-benar terdaftar sebagai salah satu anggota kelompok tani, data tersebut diajukan untuk pengisian RDKK (Rencana Definitif Kelompok Kerja) yang mana fungsi daripada program tersebut ialah agar supaya didalam pengambilan sejumlah besar pupuk yang dibutuhkan oleh masyarakat agar dapat sampai dengan benar tanpa adanya permasalahan yang timbul kedepannya.
- Setelah kesemuanya dapat dilalui kemudian petani dapat mengambil sejumlah pupuk bersubsidi dengan jumlah yang ditentukan yaitu tidak kurang dari 200 kg per petani.

Dapat dikatakan bagian ini adalah bagian terakhir daripada proses pendistribusian pupuk bersubsidi yang diperuntukan untuk kalangan petani. Sukses tidaknya program daripada pemerintah terlihat dari tanggapan masyarakat tani itu sendiri dalam menanggapi program tersebut. Hal senada juga diungkapkan Bapak Sulistyoso, SH selaku kepala Dinas Indagkop dan UKM. Beliau menyatakan bahwa :

“.....Memang telah kami ungkapkan bahwa betapa pentingnya proses pada tahap ini. Karena ini merupakan proses terakhir dari rangkaian proses distribusi yang dijalankan guna penyaluran pupuk bersubsidi dapat berjalan dengan lancar, mengenai sukses ataupun tidak program tersebut dapat kami sepenuhnya mempercayakan sosialisasi yang telah kami lakukan baik oleh kami sendiri dan oleh koperasi pertanian yang telah mendapat program sosialisasi dari pihak kami.....” (Sumber: wawancara, Senin 7 Juni 2010, pukul 09.30 WIB)

Hal yang senada juga diungkapkan oleh bapak Suparlan selaku pihak pengecer dari koperasi tani di salah satu kawasan Ponorogo, beliau menyatakan bahwa :

“..... Pada tahap inilah kami yang berwenang sebagai salah satu penyalur pupuk bersubsidi melakukan kegiatan sosialisasi serta penyaluran langsung kepada para petani di daerah, berbagai respon ditunjukkan oleh para petani dan kelompok tani khususnya mengenai penyaluran pupuk bersubsidi itu sendiri dan persyaratan untuk mendapatkannya, tetapi masih banyak juga kita temui beberapa petani di daerah yang kurang paham atas program pemerintah tersebut.....” (Sumber: wawancara , Rabu 9 Juni 2010, pukul 11.30 WIB)

2. Peran pihak – pihak yang terkait dalam pendistribusian pupuk :

d) Pihak Dinas Indagkop dan UKM Kabupaten Ponorogo

Dalam hal ini salah satu lembaga yang menangani dalam Proses distribusi Pupuk ialah Dinas Indagkop dan UKM kabupaten Ponorogo. di dalam lembaga inilah segala sesuatu yang berkaitan dengan awal kegiatan distribusi pupuk khususnya kawasan pertanian di Ponorogo diawasi dan dibuat sedemikian rupa sehingga masyarakat yang berkepentingan dalam hal ini petani dapat memperoleh pupuk yang memang dibutuhkan untuk proses pertaniannya, tetapi seolah lupa dengan berbagai kelemahan yang timbul kedepannya dengan program yang dibawah oleh dinas ini. RDKK adalah satu program yang menangani seluk beluk tentang distribusi pupuk pertanian. Tetapi masyarakat seakan kurang memahami

akan program tersebut lebih lanjut. Terbukti dengan masih banyaknya petani yang belum terdaftar atau kurang menganggap penting daripada program tersebut.

Bapak Parwadi, bagian Data Dinas Indagkop dan UKM “.....Memang diakui dari pihak kami bahwasanya banyak dari masyarakat yang kurang memahami daripada program yang telah dicanangkan tersebut. Padahal apabila menilik lebih lanjut dari efek ataupun keuntungan yang dapat diperoleh apabila program tersebut dapat nyata dipahami oleh masyarakat petani.....” (Sumber : wawancara; Kamis 10 Juni 2010, pukul 09.15 WIB)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Harjo Kusman sebagai salah satu warga masyarakat yang berprofesi sebagai petani yang ditemui di tempat berbeda, beliau menyampikan bahwa:

“.....Sebagai seorang petani kecil yang ada dalam benak pikirannya hanya apabila waktunya tanam ya tanam sebaliknya apabila datang waktunya panen ya panen, soal lembaga yang yang menangani proses pupuk (distribusi pupuk)itu saya sebagai masyarakat hanya bisa pasrah.....” (Sumber : Wawancara; Rabu, 9 juni 2010, pukul 15.00 WIB)

Secara lebih lanjut kewenangan dan peran dari dinas ini adalah untuk memperjelas daripada program pupuk bersubsidi kepada setiap lini dan sosialisasinya pada masyarakat mengenai pengajuan pupuk .

Berdasarkan peraturan Bupati Ponorogo nomor 57 Tahun 2008 tentang uraian tugas dan fungsi serta Susunan Organisasi Dinas Industri ,Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari :

- Kepala Dinas ;
- Sekretaris ;
- Bidang Industri ;
- Bidang Perdagangan ;
- Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- Bidang Pengelolaan Pasar;
- Unit Pelaksana Tekhnis Dinas ; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.

- Sekretaris dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- Bidang dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas dan secara teknis administrative mendapatkan pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- Bagan susunan Organisasi Dinas Industri , Perdagangan ,Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

1) **Kedudukan ,Tugas, Fungsi dan Kewenangan**

Berdasarkan peraturan Bupati Ponorogo nomor 57 Tahun 2008 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Industri ,Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari :

- Dinas Industri, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan Unsur pelaksana otonomi Daerah di bidang Industri ,perdagangan koperasi ,usaha kecil dan menengah serta pengelolaan

pasar yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

- Dinas Industri ,Perdagangan ,Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang industri,perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah serta pengelolaan pasar.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),Dinas Industri ,Perdagangan ,koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi :

- perumusan kebijakan teknis di bidang industri , perdagangan , koperasi, usaha kecil dan menengah serta pengelolaan pasar.
- penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang industri , perdagangan , koperasi ,usaha kecil dan menengah serta pengelolaan pasar.
- pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang industri ,perdagangan koperasi,usaha kecil dan menengah serta pengelolaan pasar.
- Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas
- pelaksanaan koordinasi dengan lembaga pemerintah /swasta yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang industri ,perdagangan koperasi,usaha kecil dan menengah serta pengelolaan pasar,dan
- pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

➤ Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang perdagangan meliputi perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri dan perlindungan konsumen. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- Melaksanakan analisa data ,bimbingan dan pelaksanaan urusan perizinan.
- Pelaksanaan bimbingan teknis kepada pengusaha tentang metrologi.
- Pelaksanan bimbingan teknis usaha pengembangan ekspor – import daerah dan kegiatan perdagangan luar negeri.
- Pelaksanan program kerjasama antar perusahaan serta pengembangan promosi.
- Pelaksanaan kegiatan program pengembangan pendaftaran dan pengawasan perusahaan.
- Pemberian informasi pada perusahaan tentang wajib daftar perusahaan.
- Pemantauan penyediaan dan penyaluran barang dan jasa,
- Pelaksanaan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan penyaluran barang dan jasa.
- Pemantuan petunjuk teknis di bidang bimbingan usaha,sarana perdagangan metrology,ekspor – import ,promosi, pendaftaran

perusahaan, pengawasan dan pengeadaan penyaluran serta perlindungan konsumen.

- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan; dan
- Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ,Dinas Industri, Perdagangan ,Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai kewenangan :

➤ Bidang Perindustrian

- Perizinan
 - Pelaksanaan penerbitan tanda daftar industri dan IUI skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - Pelaksanaan penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh Pemerintah dan Provinsi.
 - Pelaksanaan penerbitan izin usaha kawasan Industri.
- Perumusan penetapan bidang usaha industri prioritas kabupaten.
- Fasilitas pengembangan usah dalam rangka pengembangan IKM;
- Perumusan penetapan perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha di kabupaten.

- Perumusan rencana jangka panjang pembangunan industri di kabupaten.
- Promosi produk industri Kabupaten ;
- Teknologi
 - Pelaksanaan penelitian , pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.
 - fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian , pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri ;
 - Sosialisasi hasil penelitian , pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.
- Standarisasi
 - Fasilitasi dan pengawsan terhadap penerapan standart yang akan dikembangkan di kabupaten;
 - Kerjasama bidang standarisasi.
- Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Perumusan standart kompetensi SDM industri dan aparatur Pembina industri di Kabupaten.
 - Koordinasi dan fasilitasi diklat SDM industri dan aparatur Pembina industri di Kabupaten.
- Kerjasama Industri
 - Fasilitasi kemitraan antar industri kecil , menengah ,dan industri besar serta sector ekonomi lainnya.
 - Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha.

- Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri , kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri.

- Pembinaan asosiasi industri /dewan tingkat Kabupaten.
- Koordinasi dan fasilitasi pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyedia sarana dan prasarana (jalan ,air, listrik,telepon,unit pengelolaan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi).
- Pengumpulan ,analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat kabupaten dan pelaporan kepada Provinsi.

➤ Bidang Perdagangan

Perdagangan Dalam Negeri

- Pelaksanaan perizinan usaha perdagangan.
- Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin /pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi.
- Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaksanaan perizinan perdagangan barang kategori dalam pengawasan.
- Pengawasan ,pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan.

- dukungan pelaksanaan , pembinaan dan pengawasan monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan ,pedalaman dan terpencil.
- Pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan perizinan dan rekomendasi skala tertentu , monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/took modern dan gudang)dan sarana penunjang perdagangan (jasa permanen, konvensi ,dan seminar dagang) skala local.
- Pembinaan ,pengawasan ,monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilitas harga.
- Pembinaan, pengawasan , monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri.
- Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di kabupaten.
- Sosialisasi ,informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen.
- Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen .
- Pembinaan dan pemberdayaan motivator dan mediator perlindungan konsumen.
- Perumusan usulan pembentukan BPSK di kabupaten kepada pemerintah berkoordinasi dengan Provinsi dan fasilitasi operasional BPSK.
- Pendaftaran dan pengembangan LPKSM.

- Kooedinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.
 - Evaluasi dan implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen.
 - Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa.
 - Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa.
 - Pembinaan dan pemberdayaan PPBJ;
 - Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK ;
- Metrologi Legal
- Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari Pemerintah yang didasarkan rekomendasi Provinsi.
 - Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi .
 - Fasilitasi standart ukuran dan laboratorium metrologi legal.
 - Pelayanan tera dan tera ulang UTTP setelah melalui penilaian standart ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh Pemerintah.
 - Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi lokal.
 - Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI .
 - Pembinaan operasional repartir UTTP.
 - Pengawasan dan penyidikan tindak pidanan UUML.
- Bidang Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah

Kelembagaan Koperasi

Berdasarkan peraturan Bupati Ponorogo nomor 57 Tahun 2008 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Industri ,Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari :

- Fasilitasi pelaksanaan dan pembentukan ,penggabungan , dan peleburan ,serta pembubaran koperasi;
 - Pengesahan pembentukan ,penggabungan dan peleburan , serta pemubaran koperasi.
 - Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi.
 - Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan AD yang menyangkut penggabungan , pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi.
 - Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat kabupaten sesuai dengan pedoman pemerintah di tingkat kabupaten .
 - Pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi ;
 - Fasillitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi
- Pemberdayaan Koperasi

Berdasarkan peraturan Bupati Ponorogo nomor 57 Tahun 2008 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Industri ,Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari :

- Fasilitasi penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat kabupaten sesuai dengan kebijakan Pemerintah;

- Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP;
- Pembinaan KSP dan USP;
- Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP ;
- Pelaksanaan pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP yang tidak melaksanakan kewajibannya ;
- Pelaksanaan pengembangan ilkim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi.

➤ **Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah**

Berdasarkan peraturan Bupati Ponorogo nomor 57 Tahun 2008 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Industri ,Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari :

- Pembinaan dan pengembangan usaha kecil ,meliputi :
 - Produksi;
 - Pemasaran;
 - Sumber daya Manusia ;
 - Teknologi.
- Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM ,meliputi :
 - Kredit perbankan;
 - Penjaminan dana bukan Bank ;
 - Penjaminan dari dana penghasilan sebagai laba BUMN ;

- Hibah ;
- Jenis pembiayaan lain .

Pengawasan, monitoring dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah.

b.Pihak Koperasi Tani

Selain sebagai ujung tombak yang dalam hal ini adalah mengenai proses distribusi pupuk bersubsidi oleh pemerintah kepada pihak masyarakat petani di daerah, Koperasi tani juga berfungsi sebagai pengecer daripada pendistribusian pupuk bersubsidi tersebut kepada masyarakat melalui kelompok tani yang tersebar di masyarakat. Dengan adanya koperasi tani inilah pihak pemerintah merasa sangat terbantu. Lebih lanjut dengan melihat kembali fungsi daripada koperasi tani yang mana berkewajiban menyalurkan pupuk bersubsidi sampai kepada kelompok tani atau petani itu sendiri sesuai dengan peraturan pemerintah tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian NOMOR -21/M-DAG/PER/6/2008. Bahwasanya didalam ketentuan tersebut terlihat jelas bahwa tugas daripada koperasi tani yang dalam hal ini berperan ganda sebagai pengecer ialah menjamin distribusi pupuk sampai pada tangan petani. Hal senada juga diungkapkan bapak teguh selaku dari pihak koperasi tani yang bersangkutan. Beliau menyatakan bahwa :

“.....Sebagai seorang pengecer kami selalu berkoordinasi dengan distributor kami , yang mana dalam hal ini kepada distributorlah kami mempunyai data – data kelompok tani yang hendak kami datang.....” (Sumber: wawancara , Senin 7 Juni 2010, pukul 09.30 WIB)

c. Kelompok Masyarakat Tani

Dari kesemua pihak dirasa pihak inilah yang mempunyai presentase andil yang cukup berpengaruh dalam proses distribusi pupuk di kalangan masyarakat, mengapa dikatakan demikian dikarenakan pada tahap pihak inilah program pemerintah mengenai distribusi pupuk bersubsidi dapat sampai kepada pihak yang bersangkutan yaitu para petani dengan tindakan yang lebih lanjut yaitu sosialisasinya mengenai program yang bersangkutan. Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Sulistyono, SH. selaku kepala Dinas Indagkop dan UKM. Beliau menyatakan bahwa :

“.....Kita sangat merasa terbantu dengan adanya kelompok tani yang telah ada di dalam masyarakat. dengan adanya kelompok tani tersebut akan memudahkan program- program kita yang bersangkutan dengan dunia pertanian. seperti halnya dengan pendistribusian pupuk misalnya.....”

(Sumber: wawancara , Senin 7 Juni 2010, pukul 09.30 WIB)

Memang dalam hal ini dengan adanya Kelompok Tani memudahkan dinas – dinas terkait dalam memantau pembangunan pertanian khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Harjo Kusman selaku masyarakat tani yang ada di Kabupaten Ponorogo, beliau menyatakan bahwa :

“.....Kami selaku masyarakat tani merasa sangat terbantu dengan adanya program dari pemerintah tersebut. Kami harapkan dengan berjalannya program tersebut maka musim- musim tanam kedepan kami selaku petani dapat dengan mudah mendapatkan pupuk yang seyogyanya

mesti kamu dapatkan untuk kegiatan pemupukan tanaman kami....” (Sumber : Wawancara; Rabu, 9 juni 2010,pukul 15.00 WIB)

3. Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi dalam proses distribusi pupuk bersubsidi pemerintah bagi masyarakat tani khususnya Kabupaten Ponorogo.

d) Faktor pendorong

1) Pengadaan Pupuk dengan sistem RDKK

Dengan tibanya musim tanam para petani seakan memprioritaskan pupuk kedalam kebutuhan yang primer. Entah itu didapatkan dengan berbagai cara dan dengan berbagai harga. Tentu hal ini merupakan permasalahan tersendiri bagi peredaran pupuk. Bukan lagi hal yang mengherankan apabila mendapati di beberapa wilayah di Ponorogo bahwasanya pupuk yang diprioritaskan bagi petani secara mengherankan menghilang dari peredaran. Atau jangan – jangan memang pupuk tersebut tersedia bebas namun dengan melewati birokrasi dari pihak yang terkait yang terlalu panjang maka secara kasat mata terbentuk opini di masyarakat bahwa pupuk tersebut seperti menghilang dari peredaran.

Dalam prosedur memperoleh pupuk pertanian masyarakat pertanian harus mengupayakan adanya suatu kelompok petani yang memudahkan bagi dinas – dinas terkait dalam pendistribusian pupuk tersebut. Petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian melalui musyawarah menyusun Rencana Definitif Kelompok (RDK) yang merupakan rencana kerja usahatani dari kelompok tani untuk satu periode 1 (satu) tahun berisi rincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usahatani. RDK hendaknya dijabarkan lebih lanjut oleh kelompok tani dalam suatu Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)

yang merupakan alat perumusan untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi dan alat mesin pertanian, baik yang berdasarkan kredit/permodalan usahatani bagi anggota kelompok tani yang memerlukan maupun dari swadana petani. Pesanan berupa RDKK yang disusun melalui musyawarah anggota kelompok tani hendaknya disampaikan kepada Gabungan kelompok tani, Perusahaan Mitra (distributor pupuk dan benih) serta Perbankan (khusus untuk keperluan kredit) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musim Tanam, sehingga teknologi dapat diterapkan sesuai anjuran.

Menurut bapak Sulistiyo, SH, Kepala Dinas Indagkop dan UKM, ".....Distribusi pupuk bersubsidi di wilayah Ponorogo menggunakan sisten RDKK, yaitu semacam proposal yang dibuat oleh kelompok tani setiap kali akan membeli pupuk yang diserahkan kepada Dinas Indagkop dan UKM. Dan kita tekankan pada distributor pupuk hanya melayani pembelian jika ada RDKK yang telah mendapat persetujuan Dinas....." (Sumber: wawancara, Senin 7 Juni 2010, pukul 09.30 WIB)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Slamet sebagai salah satu warga masyarakat yang berprofesi sebagai petani yang ditemui di tempat berbeda, beliau menyampikan bahwa:

Menurut bapak Slamet, mantri tani untuk kecamatan Ponorogo, ".....Untuk membeli pupuk, petani disini (kec. Ponorogo) harus membuat RDKK dan menyerahkan ke dinas untuk mendapat stempel (persetujuan). Waktu di distributor untuk membeli pupuk, menyerahkan RDKK yang telah diberi stempel oleh Dinas....." (Sumber: wawancara, Rabu 9 Juni 2010, pukul 09.00 WIB)

Oleh karena itu penyusunan RDKK yang di laksanakan oleh kelompok tani secara serentak dan tepat waktu merupakan kegiatan strategis, sehingga perlu suatu gerakan untuk mendorong petani/ kelompok tani menyusun RDKK. Mekanisme penyusunan RDKK harus memperhatikan keinginan para petani, namun mengingat kemampuan petani dalam menyusun perencanaan masih terbatas, maka penyuluh pertanian perlu mendampingi dan membimbing petani/kelompok dalam menyusunnya, sehingga rencana yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan petani dalam menjalankan kegiatan usahatani.

Terlepas dari penyusunan RDKK itu sendiri berikut adalah uraian mengenai tujuan, sasaran serta kata kunci dalam pelaksanaan daripada sistem RDKK tersebut :

(a) Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 Tentang Perubahan atas peraturan menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Pedoman penyusunan RDK dan RDKK bertujuan:

- Meningkatkan peran kelompok tani dalam menyusun rencana kegiatan usahatani berkelompok;
- Meningkatkan peran penyuluh pertanian dalam membimbing kelompok tani penyusunan rencana kegiatan usahatani berkelompok.

Dalam kaitannya dengan pembangunan masyarakat dan pembangunan pertanian tujuan yang ingin dicapai dalam program RDKK sdapat dikatakan sangat signifikan kaitannya pada pembangunan pertanian. Seperti halnya dengan pendapat Bapak Sulistyos.H selaku Kepala Dinas Indagkop dan UKM Kabupaten Ponorogo, beliau menyatakan :

“.....Hemat kami selaku dinas yang menangani persoalan distribusi pupuk pada kawasan Ponorogo pada khususnya ingin memberdayakan potensi para petani, diharapkan dengan program ini pengajuan kuota pupuk yang diajukan oleh para petani dapat terpantau dengan baik.....” (Sumber: wawancara , Senin 7 Juni 2010, pukul 09.30 WIB)

Dengan telah terpaparkannya tujuan yang hendak dicapai mengenai program tersebut ,berikut adalah sasaran yang kedepannya ingin diraih pada program tersebut..:

(b) Sasaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 Tentang Perubahan atas peraturan menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Sasaran yang ingin dicapai adalah :

- (1) Tersusunnya rencana kegiatan usahatani berkelompok yang baik sebagai pedoman anggota kelompok dalam melaksanakan kegiatan usahatannya,

- (2) Tersusunnya rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan permodalan sebagai pendukung kegiatan usahatani;
- (3) Terlaksana tugas dan fungsi penyuluh secara optimal dalam membimbing kelompok tani penyusunan rencana kegiatan usahatani berkelompok.

Memang dapat menjalankan suatu program yang dapat dibidang berkaitan dengan orang banyak memerlukan suatu kata kunci yang dapat mempermudah daripada laju program itu sendiri. Berikut adalah beberapa kata kunci yang diperlukan dalam menyatukan program tersebut :

(c) Kata Kunci

- (1) Rencana Definitif Kelompok (RDK), adalah rencana kerja usahatani dari kelompok tani untuk 1 (satu), yang disusun melalui musyawarah dan berisi rincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usahatani;
- (2) Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah rencana kebutuhan kelompok tani untuk 1 (satu) musim tanam yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani, meliputi kebutuhan benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian serta modal kerja, untuk mendukung pelaksanaan RDK yang dibutuhkan oleh petani yang merupakan pesanan kelompok tani kepada gabungan kelompok tani atau lembaga lain (distributor sarana produksi dan perbankan);
- (3) Penyuluhan Pertanian, adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu

menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;

- (4) Penyuluh Pertanian PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan, kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan;
- (5) Pertanian (mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan), adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
- (6) Usaha tani, adalah usaha di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan;
- (7) Petani, adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang;

- (8) Pekebun, adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha perkebunan;
- (9) Peternak, adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan;
- (10) Kontak tani adalah ketua atau mantan ketua kelompok tani yang masih aktif sebagai anggota kelompok dan diakui kepemimpinannya dalam menggerakkan anggota/petani untuk mengembangkan usahanya;
- (11) Kelompoktani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota;
- (12) Gabungan kelompoktani (GAPOKTAN) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha;
- (13) Pemberdayaan Kelompok, merupakan upaya memfasilitasi kelompok untuk menggunakan potensi dan kreatifitasnya sendiri dalam mencapai tujuan mensejahterakan petani anggotanya;
- (14) Intensifikasi Pertanian adalah upaya pengamalan ilmu dan teknologi dalam usahatani untuk meningkatkan Produktivitas dan efisiensi dengan memanfaatkan1 potensi tanaman, lahan, daya dan dana secara terpadu serta mempertahankan kelestarian sumberdaya alam.

Pengadaan dan distribusi pupuk diawasi secara ketat karena setiap masa tanam kebutuhan akan pupuk meningkat secara tajam . Mengatasi kelangkaan pupuk setiap masa tanam ,dinas Pertanian dan Indagkop dan UKM Kabupaten Ponorogo membuat sebuah system pembelian pupuk yang bernama Rencana Denitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).Menurut peraturan Menteri No 66/Permentan /OT.140 /12 /2006 (Depdag ,2008) tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sector pertanian .RDKK yaitu sebuah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau untuk standar teknis tanaman perkebunan yang akan dibeli oleh petani ,perkebun ,peternak ,pembudidaya ikan atau udang.Dalam menentukan kebutuhan pupuk bersubsidi per wilayah dihitung berdasarkan usulan kebutuhan petani perorangan atau RDKK yang diajukan oleh kelompok tani.

Jumlah pupuk yang ditetapkan Oleh Departemen Pertanian Indonesia adalah sebesar UREA 250-300kg/Ha, Ponska 100 kg/Ha.Sedangkan saat pengajuan RDKK oleh kelompok tani, kebutuhan pupuk yang diajukan melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Diperta.Kelompok tani rata-rata mengajukan kebutuhan pupuk UREA 400kg/Ha, Ponska 200Kg/Ha .

Bapak Parwadi ,bagian data Dinas Indagkop dan UKM “Pengajuan jumlah pupuk oleh kelompok tani yang tercantum dalam RDKK, sesuai dengan jumlah yang telah diajukan oleh kelompok tani yang terkait.Mengapa malah terjadi kelangkaan pupuk di beberapa wilayah dikarenakan para petani yang terkait belum mendaftarkan ataupun bukan dari

anggota kelompok tani yang telah mempunyai RDKK.....” (Sumber :Wawancara ,Selasa ,8 juni 2010,pukul 09.00 WIB)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Harjo Kusman sebagai salah satu warga masyarakat yang berprofesi sebagai petani yang ditemui di tempat berbeda, beliau menyampikan bahwa:

Bapak Harjo Kusman,petani di wilayah Ponorogo”.....memang dalam mendapatkan pupuk pertanian khususnya pupuk yang disubsidi oleh pemerintah para petani merasa kesulitan dalam mendapatkannya apabila petani yang bersangkutan belum terdaftar sebagai anggota daripada kelompok tani”(Sumber : Wawancara; Rabu, 9 juni 2010,pukul 15.00 WIB)

b) Faktor penghambat.

1) Sosialisasi yang kurang akan RDKK

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 Tentang Perubahan atas peraturan menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Disadari atau tidak banyak dari masyarakat tani di Ponorogo yang kurang memahami akan program RDKK tersebut. Banyak dari mereka yang masih menganut sistem lama yaitu membeli pupuk di mana toko yang menjual pupuk.Oleh karena itulah ketika harga pupuk naik dan keberadaannya sulit ditemukan para petani akan sangat merasakan dampaknya.Belum lagi ditambah dengan musim semai tiba ataupun musim

tanam. Tentu hal ini akan sangat berdampak besar bagi petani yang mempunyai lahan luas karena sudah dapat dihitung berapa kerugiannya.

Beberapa kelemahan dalam sistem RDKK

- (a) Dibuat dalam bingkai lama, yakni model birokrasi panjang dan berlaku pada sistem distribusi pupuk subsidi yang mengandung celah – celah dan berbagai kelemahan. Misal pada pembentukan kelompok tani yang mengharuskan mendapat persetujuan dari pejabat Dinas di pemerintahan atau kota. Celah inilah yang dimanfaatkan secara luas oleh pihak-pihak tertentu dalam membelokan distribusi pupuk bersubsidi yang selayaknya menjadi hak daripada petani.
- (b) Sistem RDKK yang dijalankan di kabupaten Ponorogo tidak saja berlaku pada pola pembelian kelompok tani, perorangan yang membutuhkan pupuk bersubsidi juga selayaknya dapat membuat RDKK.

Salah satu aspek yang kurang dilakukan dalam hal ini adalah sosialisasi pada masyarakat akan bergunannya program ini dan keuntungan yang dapat diperoleh apabila petani yang bersangkutan telah terdata sebagai anggota kelompok tani di daerahnya atau tentang sosialisasi pengajuan RDKK oleh pihak petani pada dinas terkait yang dalam hal ini dibawah oleh Dinas Indagkop dan UKM kabupaten Ponorogo.

Bapak Jemikun, petani di kawasan Ponorogo “.....Untuk mendapatkan pupuk ini, kami sering salah agen dalam pembelian pupuk tersebut. Dikarenakan kami tidak diberitahu harus mengambil di agen, manakah kelompok tani kami. Selain hal itu pemerintah seakan kurang mensosialisasikan programnya

(RDKK) kepada kami yang seharusnya dibuat mudah akan peran pemerintah dalam dunia tani ,tetapi apa kenyataannya kami malah dibuat bingung oleh program mereka (Pemerintah).....” (Sumber :Wawancara; Kamis 10 Juni pukul 16.12 WIB.)

Dalam proses sosialisasi ini dilakukan oleh pihak dari Dinas Indagkop dan UKM ,pihak koperasi terkait dan tidak lupa juga dari pihak pengecer yang secara tidak langsung menerangkan akan bagaimana proses subsidi pupuk kepada pihak petani pada saat yang bersangkutan yaitu petani mengambil jumlah pupuk yang dibutuhkannya.tidak jarang program sosialisasi pupuk bersubsidi ini juga disosialisasikan antar petani sendiri ketika bercengkrama di ladang bersama.Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Parwadi selaku bagian data dari Dinas Indagkop dan UKM,beliau menyatakan bahwa :

“.....Sosialisasi yang telah kami lakukan mengenai hal pupuk bersubsidi ini telah dapat kami katakan sebagian besar dapat berjalan dengan baik ,hal itu dapat terlihat dari animo masyarakat yang terus menerus bertanya kepada koperasi selaku pihak pengecer tentang persyaratan pengajuan untuk mendapatkan subsidi pupuk tersebut.salah satunya ialah petani yang bersangkutan harus terdaftar di kelompok petani yang bersangkutan sebagai awal untuk pembentukan RDKK (Rencana Definitf Kelompok Kerja)”(Sumber : wawancara; Kamis 10 Juni 2010,pukul 09.15 WIB)

Selain sebagai tugas pihak yang berkewenangan dalam proses distribusi ini yaitu dari pihak Dinas Indagkop dan UKM serta dari pihak koperasi tani secara tidak disadari dari pihak dalam yaitu petani sendiri melaukan upaya sosialisasi

yang masih dibilang sepatah-patah. meskipun demikian hal ini sangat menggembarakan dari sudut pandang pihak Dinas Indagkop dan UKM bahwasanya program yang mereka upayakan telah sedikit banyak terdengar oleh masyarakat petani meskipun dapat dikatakan masih belum seutuhnya. Hal senada juga diungkapkan oleh pihak dari koperasi tani ,Bapak Suparlan. Beliau menyatakan bahwa :

“.....Saya mengamati program ini dari pertama saya mengajukan diri sebagai pengecer, memang dapat dikatakan bahwa program ini bertujuan baik dan dapat dikatakan sangat membantu dari pihak petani kecil atau petani yang mempunyai lahan yang tidak begitu luas.....” (Sumber: wawancara , Selasa 7 Juni 2010, pukul 13.30 WIB)

c. Upaya –upaya mengatasi hambatan yang dihadapi guna mengoptimalkan distribusi dalam proses pendistribusian pupuk bersubsidi bagi

1.) Mensosialisasikan program dan Tata Cara Penyusunan RDK dan RDKKoleh Kelompok Tani dan Dinas Indagkop di Daerah

(a.) Rencana Definitif Kelompok

Rencana Definitif Kelompok sebagai rencana kegiatan kelompok tani untuk 1 (satu) tahun yang berisi rincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usahatani. Rencana defenitif kelompok disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- (1) Pertemuan pengurus kelompok tani yang didampingi oleh Penyuluh Pertanian dalam rangka persiapan penyusunan RDK.
- (2) Pertemuan anggota kelompok tani dipimpin oleh Ketua Kelompok tani yang didampingi penyuluh pertanian untuk membahas, menyusun dan menyepakati rencana kegiatannya dalam pengelolaan usahatani antara lain ; pola tanam, sasaran areal tanam, sasaran produksi, sarana produksi dan permodalan, teknologi usahatani, jadwal kegiatan, pembagian tugas.
- (3) RDK dituangkan dalam bentuk format (terlampir) yang ditandatangani oleh ketua kelompok dan menjadi pedoman bagi anggota kelompok tani dalam menyelenggarakan kegiatan usahatani.

(b.) Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 Tentang Perubahan atas peraturan menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. RDKK sebagai dasar rencana pengadaan dan pelayanan dari GAPOKTAN. Dalam pelaksanaan penyusunan RDKK mengacu kepada RDK masing-masing kelompok dengan tahapan sebagai berikut:

- (1) Pertemuan pengurus kelompok tani yang didampingi oleh Penyuluh Pertanian dalam rangka persiapan penyusunan RDKK.
- (2) Pertemuan anggota kelompok tani dipimpin oleh Ketua Kelompok tani yang didampingi penyuluh pertanian untuk membahas, menyusun dan

menyepakati daftar kebutuhan sarana produksi 6 tepat (tepat jenis, jumlah, waktu, tempat, harga dan mutu) yang akan dibiayai secara swadana maupun kredit dari tiap anggota kelompoktani. Daftar yang disusun akan berfungsi sebagai pesanan kelompoktani kepada GAPOKTAN. RDKK selesai paling lambat 1 bulan sebelum jadwal tanam.

- (3) Meneliti kelengkapan RDKK dan penandatanganan RDKK oleh Ketua kelompoktani yang diketahui oleh Penyuluh Pertanian.

Kesemua daripada program – program pemerintah tersebut ditempuh agar upaya dalam pendistribusian barang kebutuhan masyarakat khususnya pupuk dapat berjalan dengan lancar karena melihat kebelakang dengan tidak adanya suatu sistem acuan yang baku digunakan dalam proses distribusi pupuk, maka proses pendistribusian tersebut akan kacau dan tidak tertuju pada sasaran. Seperti hanya pendapat Bapak Sulistyos.H selaku Kepala Dinas Indagkop dan UKM Kabupaten Ponorogo tentang sistem acuan tersebut :

“.....Memang pada dasarnya sistem tersebut sangat dibutuhkan kita selaku lembaga pemerintah yang menangani persoalan demikian,namun pada kenyataannya di tengah jalan proses tersebut kurang dapat berjalan dikarenakan kurang pemahaman dari kami sendiri selaku lembaga pemerintah dan para masyarakat petani yang selalu obyek yang akan kita layani karena public servise adalah paradigma yang kita pahami selama ini.Kedepannya diharapkan dengan paham program tersebut dari kaminya sendiri dan petani agar komunikasi yang berjalan dapat berjalan dengan beriringan agar sosialisasi program dapat sampai pada mereka

(masyarakat petani).....” (Sumber : wawancara; Kamis 15 Juli 2010,pukul 09.15 WIB)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Jemikun sebagai salah satu warga masyarakat yang berprofesi sebagai petani yang ditemui di tempat berbeda, beliau menyampaikan bahwa:

“.....Mengenai program yang Mas tanyakan ...(Program RDKK) sebenarnya jujur saya kurang tahu, yang saya pahami mengenai pendistribusian pupuk pada kami selaku petani ialah apabila kami telah tercatat sebagai warga tani di suatu daerah maka ketentuan lainnya seperti pengambilan jatah pupuk yang harus diambil itu tergantung ketua kelompok tani kami.Beliaulah yang mengrus tentang tata cara pengambilan pupuk tersebut agar para anggota dapat mengambil jatah pupuk sehingga kerancuan akan diman tempat yang harus kami datangi untuk mengambil pupuk jelas.....” (Sumber :Wawancara; Kamis ,15 Juli pukul 16.12 WIB.)

(c.) Materi RDK dan RDKK

Materi RDK meliputi:

(1) Pola tanam dan pola usahatani yang disusun atas dasar pertimbangan :

- Aspek teknis, meliputi; agroekosistem dan teknologi;
- Aspek ekonomi, meliputi ; permintaan pasar, harga, keuntungan usahatani;
- Aspek sosial, meliputi ; kebijakan pemerintah, kerja sama kelompok tani dan dukungan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

(2) Sasaran areal tanam dan produksi didasarkan atas;

- Potensi wilayah kelompok tani;
- Produktivitas dari masing-masing komoditi;
- Kebutuhan konsumsi anggota kelompok dan permintaan pasar.

(3) Teknologi usahatani,

- Ketersediaan teknologi;
- Rekomendasi teknologi;

(4) Sarana produksi dan permodalan, didasarkan atas;

- Luas areal usahatani kelompok tani;
- Teknologi yang akan diterapkan;

(5) Kemampuan permodalan anggota kelompok tani;

- Jadwal kegiatan, mengacu kepada rencana kegiatan usaha tani;
- Pembagian tugas disesuaikan dengan kesediaan dan kesepakatan kelompok.

❖ RDKK Materi RDKK terdiri dari

- Jenis dan luas masing-masing komoditi yang diusahakan
- Perhitungan kebutuhan:

- Benih

- Pupuk

- Pestisida

- biaya garap dan pemeliharaan

biaya panen dan pasca panen

- ❖ Jadwal penggunaan sarana produksi (sesuai kebutuhan lapangan)
Masing-masing kebutuhan tersebut ditentukan jumlah maupun nilai
uangnya dan diperinci yang akan dibiayai secara swadana dan kredit.

(d.) Mekanisme Pengajuan RDKK

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 Tentang Perubahan atas peraturan menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Proses pengajuan RDKK baik swadana maupun kredit dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- RDKK yang telah disusun dibuat rangkap 3 (tiga), Lembar pertama disampaikan kepada GAPOKTAN sebagai pesanan sarana produksi pertanian dan permodalan, lembar ke-2 sebagai arsip penyuluh dan lembar ke-3 untuk arsip kelompok tani;
- GAPOKTAN mengkompilasi RDKK dari kelompok tani dan menyampaikan hasilnya ke sekretariat POSKO IV (POSKO tingkat kecamatan);
- POSKO IV melakukan verifikasi terhadap kompilasi RDKK dari GAPOKTAN sebelum diteruskan ke sekretariat POSKO III, apabila terdapat ketidaklengkapan RDKK tersebut dikembalikan ke GAPOKTAN untuk dilakukan perbaikan. Selanjutnya POSKO IV meneruskan RDKK yang telah diverifikasi ke sekretariat POSKO III rangkap 2 (dua);
- POSKO III meneruskan setiap RDKK yang disampaikan oleh POSKO IV ke unit pelayanan sarana produksi dan permodalan (distributor

sarana produksi dan perbankan) setelah disetujui ketua harian POSKO

III. Disamping itu POSKO III mengkompilasi RDKK yang telah masuk.

Dengan adanya mekanisme tentang pengajuan RDKK yang jelas diharapkan semua aspek masyarakat petani dapat mengerti dan memahami arti penting daripada program tersebut terutama masyarakat tani yang berada pada kabupaten Ponorogo khususnya. Karena apabila melihat kebelakang dari masukan yang diterima oleh dinas- dinas terkait permasalahan yang sering timbul ialah pemaham ,prosedur serta pengajuan program tersebut sehingga dikalangan masyarakat terbentuk opini yang mengartikan bahwa program tersebut seakan malah membuat distribusi menjadi lebih sulit. seperti pernyataan Bapak Sulistyoso, SH , kepala dinas Indagkop dan UKM Kabupaten Ponorogo :

“.....Dengan berjalannya sosialisasi tentang mekanisme pengajuan Rancangan Definitif Kelompok Kerja (RDKK) tersebut kepada masyarakat dan bagaimana prosedur yang harus dilalui oleh masyarakat petani dalam pemenuhan syarat tersebut diharapkan akan terbentuk opini baru tentang program tersebut yang dulunya sering saya mendengar bahwa program tersebut hanya akal-akalan lembaga pemerintah supaya distribusi pupuk tersendat berubah menjadi sesuatu program dari pemerintah yang dalam hal ini kami selaku Dinas Indagkop yang menanganinya dapat berjalan lebih baik kedepannya.....” (Sumber : wawancara; Kamis 15 Juli 2010, pukul 09.15 WIB)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Jemikun sebagai salah satu warga masyarakat yang berprofesi sebagai petani yang ditemui di tempat berbeda, beliau menyampaikan bahwa:

“.....Dari mengikuti program yang ditentukan oleh pemerintah ini (program RDKK).. memang dalam bebrapa musin tanam ini saya dan teman –teman lebih gampang memperoleh pupuk yang harus kami dapatkan karena apabila telat maka tanaman kami yang jadi taruhannya,seperti beberapa musim lalu ada lahan di daerah kami dikarenakan sulit memperoleh pupuk dan sudah waktunya tanaman untuk dipupuk maka tananam menjadi layu dan ada bebrapa yang mati.....” (Sumber :Wawancara; Kamis 15 Juli pukul 16.12 WIB.)

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi dari orientasi pendistribusian pupuk bersubsidi khususnya untuk bidang pertanian yang diperuntukan untuk masyarakat petani kecil memang bisa dikatakan berhasil bila dibandingkan sebelum adanya program yang serupa, hal ini terbukti dari ungkapan beberapa kelompok sasaran yang memang benar-benar mendapatkan manfaat dari adanya program tersebut. Selain itu, dampak dari adanya kebijakan ini juga terlihat sekali dari kondisi beberapa masyarakat yang kita temui. Mereka begitu menampakkan ekspresi kegembiraannya karena adanya bantuan pemerintah seperti ini. Sehingga dalam hal ini, bisa dikatakan program-program seperti inilah yang kemudian layak dan patut untuk ditingkatkan karena keberadaannya benar-benar dapat menyentuh masyarakat pertanian kita khususnya masyarakat petani kecil.

C. Analisis dan Interpretasi Data

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, peneliti berusaha untuk menganalisis dan menginterpretasikan data yang ada. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dimana metode ini ditujukan untuk dapat melukiskan atau menggambarkan fenomena dari program pendistribusian Pupuk bersubsidi untuk masyarakat pertanian khususnya di kawasan Kabupaten Ponorogo, sehingga akan didapatkan bahan untuk evaluasi pelaksanaan program berikutnya. Berikut ini secara berturut-turut disajikan analisis dan interpretasi data-data yang dimaksud :

1. Analisis terhadap Mekanisme Distribusi Pupuk subsidi pada masyarakat petani daerah khususnya kawasan Kabupaten Ponorogo

Dalam proses pendistribusian pupuk bersubsidi pada para petani Kabupaten Ponorogo menggunakan mekanisme yang telah ada yaitu Struktur tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian NOMOR - 21/M-DAG/PER/6/2008 sebagai mekanisme resmi yang digunakan dalam pendistribusian pada masyarakat tani. Dengan hal –hal yang menyangkut kelancaran pada setiap lininya ada perlunya dikaji lebih lanjut tentang pihak – pihak yang berkewenangan diantaranya ialah Produsen ,Distributor ,Pengecer dan tidak lupa kelompok tani .Beberapa aspek inilah yang nantinya akan menentukan lancar tidaknya proses distribusi pupuk bersubsidi ini yang notabnya pendistribusian pupuk ini memang diprioritaskan pada petani –petani yang mempunyai lahan sedang atau kecil.

Hal inilah yang sebenarnya memerlukan sebuah sentuhan pikiran dan tenaga agar aspek pendistribusian tersebut khususnya untuk sektor pertanian dapat berjalan dengan lancar dan ditingkatkan. Menurut pengertian kamus Umum Bahasa Indonesia dapat disimpulkan bahwa proses distribusi adalah suatu kegiatan yang melakukan pembagian ,penyebaran, atau penyaluran suatu barang baik itu barang kebutuhan sehari –hari atau barang – barang pokok atau barang hasil produksi lainnya kepada beberapa orang atau tempat secara merata untuk tujuan tertentu. (Kamus Umum Bahasa Indonesia ,1996 :365).Berangkat dari pengertian yang demikianlah harapan besarnya ialah sebuah perubahan yang besar pada sistem yang mendukung pertanian khususnya pada sistem distribusinya.Hal ini dirasa sangat penting karena dalam proses distribusi tersebut kita secara tidak langsung menitiberatkan hal pada aspek distribusinya.Menurut W.J Staton yang mengatakan bahwa distribusi fisik terdiri dari semua kegiatan yang bertalian dengan pemindahan produk- produk yang tepat , dalam waktu dan pada waktu yang tepat. (W.J Staton ,1991:91).

Hal demikian juga ditemukan peneliti di lapangan ,dimana dalam realisasinya kepada petani mekanisme yang demikianlah yang dianggap baik di satu sisi tetapi di sisi lain hal yang demikian justru agak membingungkan oleh beberapa kalangan masyarakat pertanian.Dalam hal ini lembaga yang sangat berperan signifikan yang dapat diamati oleh peneliti ialah Dinas Industri dan Koperasi serta Usaha Kecil Menengah danpara pengecer serta tidak lupa kelompok tani yang berperan aktif dalam pengalokasian pupuk bersubsidi agar bisa sampai pada para petani yang memang membutuhkan.Dengan berperannya beberapa unsur diatas mekanisme yang telah ada dapat berjalan dengan lancar.

Dari uraian analisis tersebut, kita bisa memberikan gambaran bahwa rangkaian mekanisme distribusi pupuk bersubsidi memang perlu lebih diperhatikan dikarenakan dengan terciptanya alur distribusi yang jelas dan lancar maka masyarakat petani akan dapat menikmati hasilnya. Sehingga kedepannya dengan terciptanya alur dan mekanisme pendistribusian yang jelas maka pendistribusian pupuk bersubsidi akan dapat terlaksana dengan baik.

2. Analisis Kriteria Pendistribusian pupuk subsidi di Kawasan Ponorogo

Dalam proses pendistribusian pupuk bersubsidi pada para petani Kabupaten Ponorogo menggunakan mekanisme yang telah ada yaitu Struktur tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian NOMOR - 21/M-DAG/PER/6/2008 sebagai mekanisme resmi yang digunakan dalam pendistribusian pada masyarakat tani. Selain landasan hukum tersebut ada beberapa juga landasan yang memperjelas daripada pendistribusian yang harus dijalankan yaitu Peraturan Menteri Pertanian NOMOR: 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang pedoman pembinaan kelembagaan petani. Yang dimaksud diatas ialah segala kegiatan yang bersangkutan dengan pola distribusi serta sasaran dan persyaratan yang harus dipenuhi telah tercantum didalamnya sehingga apabila kedepannya terjadi permasalahan akan jelas terlihat landasan hukum yang mengaturnya. Dalam hal ini penentuan criteria yang berhak mendapatkan subsidi pupuk bagi masyarakat petani yakni ditentukan dengan jelas didalamnya ialah bagi petani yang hanya mempunyai luas lahan pertanian yang tidak lebih dari 25 hektar. Sedangkan bagi petani yang memang mempunyai luas lahan pertanian yang melebihi daripada ketentuan 25 hektar maka dihibau untuk mendapatkan pupuk yang non subsidi karena orientasi atau sasaran yang ingin dicapai daripada

program subsidi ini ialah bagi kalangan kecil saja. Sedang mengenai besaran yang berhak diterima oleh petani yang mendapat pupuk ialah tidak melebihi 200 kg per petani.

Dari hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti di lapangan menemukan beberapa fakta bahwa besaran petani yang mempunyai luas lahan yang berkisar tidak lebih dari 24 hektar di kawasan Ponorogo dapat dikatakan cukup banyak, jadi secara tidak langsung program pemerintah tersebut sangat membantu petani kecil di kawasan Ponorogo terlebih dari beberapa petani yang ada di kawasan Ponorogo tersebut memang sangat mengaharpakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah seperti halnya dengan pupuk bersubsidi. Akan tetapi dari kesekian banyak pendistribusian pupuk bersubsidi yang ada peneliti masih banyak menemui beberapa permasalahan yang sering timbul. Permasalahan ini sering timbul dikarenakan seorang petani yang mempunyai lahan persawahan tersebut tidak hanya mempunyai sawah di satu tempat akan tetapi ada di beberapa tempat yang berbeda. Tentu hal inilah yang sering menimbulkan permasalahan yang erat kaitannya dengan pendistribusian pupuk subsidi tersebut. Dalam hal ini ketentuan 25 hektar masih dianggap rancu, apakah yang dimaksud diatas hanya berlaku di satu tempat atau total dari kepemilikan keseluruhan lahan oleh petani

Dari uraian analisis tersebut kita bisa memberikan gambaran bahwa dalam memberikan kriteria yang jelas terhadap petani yang berhak mendapat subsidi pupuk harus jelas. Penentuan daripada kriteria yang diberlakukan untuk luas lahan untuk petani harus juga diperjelas agar kedepannya permasalahan yang semula tidak muncul kembali.

3. Analisis pada Proses distribusi pupuk bersubsidi bagi Masyarakat pertanian

Dalam proses distribusi pupuk bersubsidi ini kesemuanya telah ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan alur mana yang harus ditentukan terlebih dahulu. Apabila menilik lebih lanjut pada proses tersebut kewenangan yang masih terlihat dominan ada sampai pada lini ke III. Tanpa mengurangi unsur dari kesemuanya. Suatu sistem distribusi yang handal dapat tercipta dan berjalan dengan baik, cepat, efisien, dan aman apabila perencanaan kebutuhan, pengadaan dan sistem penyimpanan terselenggara dengan baik agar sistem distribusi yang handal itu tercipta. Diperlukan kerjasama yang erat antara satuan –satuan pengguna alat atau barang tertentu dengan para petugas penyimpanan (Siagian, 1992:262). Kerjasama yang dimaksud dalam Siagian (1992: 262- 263) akan mudah terbina dan terpelihara dengan baik apabila :

- Penggunaan alat atau barang menyampaikan kebutuhan dengan jelas, dalam arti barang apa yang dibutuhkan, dalam jumlah apa, dimana diperlukan dan kapan diperlukan. Untuk memperlancar pemrosesan semua permintaan yang datang dari berbagai permintaan dalam organisasi disediakan formulir permintaan barang untuk disampaikan kepada petugas gudang penyimpanan melalui suatu mekanisme dan prosedur yang telah diketahui bersama.
- Terdapat kecekatan petugas untuk memproses permintaan yang diterimanya dan penyampaian atau mengirimkannya kepada satuan kerja yang memintanya dengan cepat dan aman.

- Keseriusannya itu berarti bahwa harus ada suatu system distribusi yang tidak berkait-kait akan tetapi ,tetap menjamin bahwa mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan diatati oleh semua pihak yang berkepentingan.

Dengan melihat dari pendapat ahli tentang artian kerjasama diatas peneliti dapat melihat dalam hal ini pengaplikasiannya pada proses pendistribusian pupuk bersubsidi di kawasan Kabupaten Ponorogo. Bahwa hal yang demikian sangat diperlukan ,tidak terlepas dari Penggunaan alat atau barang menyampaikan kebutuhan dengan jelas , dalam arti barang apa yang dibutuhkan .Dalam hal ini barang yang ingin disampaikan ialah pupuk subsidi pertanian yang diperuntukan bagi petani. Hal selanjutnya yang dapat diperoleh dari hasil pengamatan ialah Terdapat kecekatan petugas untuk memproses permintaan yang diterimanya dan penyampaian atau mengirimkannya kepada satuan kerja yang memintanya dengan cepat dan aman. dari hasil pematian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan memang hal demikian memang sangat dibutuhkan oleh para petani di kala kebutuhan pupuk medesak. tetapi dsalam kenyataannya dapat dikatakan kecekatan yang dimaksud kurang ditemui oleh para petani sesuai dengan amatan yang dilakukan peneliti.

Selain hal demikian ada beberapa hal mesti digaris bawahi dalam proses pendistribusian ini. Menurut J.W.Sraton (1991:91) menyatakan :

Produsen → pedagang besar → pengecer → Konsumen

Di dalam pasar konsumen mereka merupakan grosir , atau pedagang besar, dan sekaligus pengecer.

Sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di lapangan menemukan bahwa kesemua aspek yang disebutkan diatas memang benar- benar ditemukan dilapangan sesuai dengan fungsi dan kinerjanya masing-masing. Karena pengamatan yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan barang kebutuhan pokok pertanian yaitu pupuk .

Dari uraian analisis tersebut, kita bisa memberikan gambaran bahwa peran dari setiap unsur yang ada dalam proses distribusi memang sangat penting karena satu dengan yang satunya saling mendukung. Selain dari faktor yang terlihat menurut ketentuan pendistribusian yang telah ada tersebut, ada beberapa unsur yang dinilai peneliti merupakan unsur yang juga sama- sama pentingnya ,diantaranya ialah peran –peran dari beberapa lembaga yang mendukung terselenggaranya proses distribusi pupuk bersubsidi.

4. Analisis peran dari Dinas Indagkop dan UKM

Sesuai dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 57 tahun 2008 tentang uraian tugas dan fungsi dari Dinas Indagkop dan UKM sebagaia berikut :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 92) dinas Industri ,Perdagangan ,Koperasi dan Usaha kecil menengah Menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang industri ,perdagangan, kopersasi, usaha kecil dan menengah ,serta pengelolaan pasar.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang industri perdagangan, kopersasi, usaha kecil dan menengah ,serta pengelolaan pasar.

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang industry, perdagangan ,koperasi ,usaha kecil dan menengah serta pengelolaan pasar.
- d. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas,
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga pemerintah/swasta yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas di bidang industry, perdagangan ,koperasi,usaha kecil dan menengah serta pengelolaan pasar.

Dengan kejelasan landasan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada lembaga yang berkaitan dengan proses pendistribusian pupuk bersubsidi yang dalam hal ini dimaksud oleh peneliti ialah Dinas Industri ,Koperasi serta Usaha Kecil menengah.Peneliti menemukan fakta bahwa Dinas pemerintah inilah yang berperan aktif dalam pengajuan syarat –syarat untuk memperoleh pupuk di kalangan masyarakat petani dengan tidak mengesampingkan peran dari dinas terkait lainnya.Dalam Proses pengajuan pupuk Bersubsidi inilah Peneliti mendapatkan fakta bahwa dalam kinerjanya Dinas yang terkait yang dalam hal ini yang dimaksud ialah Dinas Indagkop tidak hanya bekerja sendirian tetapi juga menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga non pemerintahan atau swadaya masyarakat seperti kelompok tani atau pengecer.Dengan terjalinnya hubungan yang erat diantara unsur tersebut peneliti menemukan fakta bahwa kesemua unsur tersebut sangat berperan aktif dalam proses pendistribusian pupuk bersubsidi di kawasan Ponorogo.

Tetapi dari hasil penelitian peneliti juga mendapatkan fakta bahwa dari kesemua unsur yang ada terutama yang non pemerintah ,ada beberapa ketentuan

yang mestinya dijadikan tolak ukur untuk menjadi mitra dari lembaga pemerintah tersebut. Karena dalam beberapa kasus yang ditemui peneliti di lapangan lembaga non pemerintah yang dapat dikatakan tidak berkompeten dapat mengganggu daripada kinerja dinas yang terkait.

Dari uraian diatas peneliti mendapat sebuah gambaran bahwa peran aktif dari dinas tersebut sangat penting dan tidak jarang dalam mengimplementasikan peran serta kontribusinya pada masyarakat dinas tersebut merupakan satu- satunya unsur pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam hal penunjukan suatu badan berhak atau tidaknya serta kompeten atau tidaknya menjadi distributor dan pengecer dalam kaitannya dengan proses pendistribusian pupuk kepada masyarakat petani.

5. Analisis peran dari Koperasi Petani

Selain sebagai ujung tombak yang dalam hal ini adalah mengenai proses distribusi pupuk bersubsidi oleh pemerintah kepada pihak masyarakat petani di daerah, Koperasi tani juga berfungsi sebagai pengecer daripada pendistribusian pupuk bersubsidi tersebut kepada masyarakat melalui kelompok tani yang tersebar di masyarakat. Dengan adanya koperasi tani inilah pihak pemerintah merasa sangat terbantu. Lebih lanjut dengan melihat kembali fungsi daripada koperasi tani yang mana berkewajiban menyalurkan pupuk bersubsidi sampai kepada kelompok tani atau petani itu sendiri sesuai dengan peraturan pemerintah tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian NOMOR 21/M-DAG/PER/6/2008. Bahwasanya didalam ketentuan tersebut terlihat jelas bahwa tugas daripada koperasi tani yang dalam hal ini berperan ganda sebagai pengecer

ialah menjamin distribusi pupuk sampai pada tangan petani ,dan sebagai koperasi ialah mensejahterakan para anggotanya.

Perlu disadari bahwa jalinan koperasi yang ditemukan oleh peneliti di lapangan mengatakan bahwa antar sesama anggota koperasi saling tolong-menolong dalam hal ini yang berkaitan dengan informasi mengenai syarat pengajuan untuk mendapatkan pupuk dari pemerintah .Disamping hal itu peneliti juga mendapat beberapa ketentuan wajib dalam anggota koperasi disamping tentang persyaratan dalam hal pengajuan pupuk bersubsidi.hal lain yang ditemui peneliti dilapangan yang berkaitan dengan peran koperasi tani yang berkaitan dengan proses pendistribusian pupuk ialah di dalam kegiatan koperasi tani peneliti mendapatkan fakta bahwa kegiatan tersebut sangat membantu dalam upaya pemerintah untuk mensosialisasikan distribusi pupuk untuk para vpetani di daerah.

Kegiatan yang dimaksud ialah Arisan tani yang dilakukan tiap minggu atau tiap bulan sesuai dengan ketentuan anggotanya.Karena tanpa disadari komunikasi yang terjalin diantara sesama petani dalam kegiatan tersebut seakan tanpa hambatan,seperti hanya peneliti menemukan beberapa temuan bahwa pertanyaan yang sering didiskusikan antaranya jarang didapati di forum resmi pemerintah.Seperti pertanyaan yang diajukan oleh anggota koperasi tentang siapa saja yang berhak yang dalam hal ini dimaksud ialah petani yang berhak mendapatkan program pupuk bersubsidi pemerintah.Apabila pertanyaan yang seperti demikian tidak terlontar secara spontan di kalangan para petani mereka juga kebanyakan tidak akan mengetahui bahwa ketentuan yang dapat memperoleh paket subsidi ialah petani yang mempunyai luas lahan kurang dari 25 hektar.

Dari hasil amatan peneliti diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang demikian sangat membantu dalam upaya sosialisasi pemerintah dalam mensukseskan programnya .Dan perlu diketahui bahwa komunikasi yang sering timbul didalam forum demikian seolah – olah tanpa hambatan dan para petani dapat bertukar pikiran sesuai dengan permasalahannya masing- masing.

6. Analisis peran dari Masyarakat Tani

Masyarakat tani adalah salah satu unsure yang paling akhir dalam tataran urutan alur pendistribusian pupuk pertanian.Peneliti menemukan fakta bahwa di dalam organisasi kelompok tani itu sendiri terbentuk suatu wadah yang mengayomi dan memberikan wacana,serta informasi- informasi yang berkaitan dengan dunia pertanian seperti pada proses pendistribusian ini.Pada pihak petani sering muncul keragu-raguan tentang persyaratan pengajuan pupuk bersubsidi dikarenakan di dalamnya tercantum tentang beberapa peraturan yang dirasa mereka sangat jarang ditemui sebelumnya.Seperti penemuan ungkapan RDKK yang sebelumnya mereka belum pernah menemui hal yang semacam itu.Apabila dikaji lebih lanjut tentang fungsi dari RDKK tersebut ialah tidak lebih dari proses pendataan lebih lanjut dari pihak koperasi yang menjadi kepanjangan tangan dari Dinas –dinas yang terkait seperti misal dinas perdagangan ataupun juga dinas pertanian.

Dari hasil pengamatan di lapangan peneliti mengemukakan bahwa masyarakat tani yang ada di kawasan Ponorogo sangat berperan aktif dalam kaitannya dengan program pupuk bersubsidi pemerintah.Karena dengan berjalannya masyarakat tani atau yang sering disebut kelompok tani dengan baik

pemerintah yang dalam hal ini yang diwakili oleh dinas yang berkaitan dengan program pendistribusian pupuk dapat memantau entah itu dari jumlah anggotanya ataupun dari jumlah keseluruhan daripada kelompok tani yang ada di kawasan Ponorogo. Hal ini dirasa sangat penting dikarenakan bahwa dengan didapatnya data mengenai jumlah kelompok tani yang masih aktif di kawasan Ponorogo maka pihak yang terkait dalam hal ini Dinas Indagkop dan UKM dapat bekerja dengan maksimal karena yang sering mereka butuhkan tetapi jarang didapat antara lain ialah masalah data mengenai jumlah kelompok tani serta anggotanya masing-masing. Karena dengan didapatnya data demikian maka kinerja yang diemban oleh dinas tersebut dapat sedikit berkurang dan disamping hal tersebut peneliti juga mengemukakan bahwa dengan adanya kelompok tani tersebut proses pendistribusian pupuk dapat dikatakan berjalan dengan lancar apabila dibandingkan dengan tidak adanya kelompok tani. Hal ini dapat ditemui bahwa dengan adanya kelompok tani beberapa program pemerintah seperti RDKK dapat langsung sampai terlepas dari beberapa kebingungan yang didapat oleh masyarakat tani itu sendiri dalam menyikapi program tersebut.

Hemat dari peneliti mengungkapkan bahwa apabila dikemas sedemikian rupa dari wujud RDKK itu sendiri tidak akan membingungkan para petani yang ingin mengajukan pengajuan permintaan pupuk kepada koperasi maupun pengecer. Di sini terlihat kelebihan dari kelompok petani yang tidak dimiliki oleh lembaga pertanian dalam hal sosialisasi program yang dimilikinya. Para petani dengan adanya program intern yang biasa disebut dengan arisan tani yang setiap bulannya ditentukan waktu dan tempatnya selain membahas tentang permasalahan keseharian tentang kegiatan bertani juga membahas tentang sosialisasi dari

program pemerintah yang dirasa kurang dipahami oleh yang bersangkutan dikarenakan banyak unsur yang menyertainya diantaranya ialah komunikasi yang tidak berjalan. Di dalam forum intern petani ini segala permasalahan dibahas dan seraya dipecahkan secara bersama-sama sesuai dengan kapasitas permasalahannya tersebut karena bahasa antar sesama petani dapat dengan mudah dipahami antar sesamanya pula.

7. Sosialisasi Program Pupuk Bersubsidi

Menurut Chambers yang mengatakan bahwa pemberdayaan merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan suatu paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat *people centered, participatory, empowering and sustainable*. (Chambers, 1995 dalam Kartasmita, 1996 : 142). Berangkat dari paradigma teori Chambers inilah harapan yang besar ada apa sosialisasi pendistribusian pupuk bersubsidi yang notabennya tidak hanya dilakukan oleh pihak –pihak yang berwenang saja seperti halnya dinas yang terkait dalam permasalahan pendistribusian tetapi juga pihak – pihak lain yang masih ada kaitannya dalam proses tersebut serta masyarakat itu sendiri.

Di lapangan peneliti menemukan beberapa fakta dan bahwa sosialisasi tersebut memang terjadi di kalangan masyarakat petani dengan pengecer ataupun distributor yang menangani permasalahan pupuk. Tetapi ada juga petani yang kurang paham atau dapat dikatakan informasi yang diterima masih dalam samar-samar sehingga hal ini mengakibatkan petani kurang dapat mengoptimalkan haknya sebagaimana yang terdapat dalam peraturan pemerintah, dari hal ini

peneliti dapat menyimpulkan bahwa besar kecilnya presentase sosialisasi yang diterima oleh petani secara individu menentukan sukses tidaknya program tersebut.

Hal lain yang ditemukan peneliti mengenai proses sosialisasi pupuk bersubsidi ialah diantaranya siapa saja petani yang memang diharapkan mendapat subsidi pupuk tersebut. Kebanyakan para petani sesuai dengan yang dinungkapkan oleh peneliti berdasarkan hasil di lapangan ialah masih terjadi kebingungan bahwa yang berhak mendapatkan subsidi ialah semua petani tetapi dalam hal ini kinerja yang dihasilkan oleh pihak – pihak terkait terlepas dari sosialisasi yang dilakukan mengenai program subsidi pupuk tersebut sampai para petani mengetahui bahwa hanya petani yang memiliki lahan tidak kurang dari 25 hektar saja yang mendapat subsidi pupuk dari pemerintah.

Dari pengamatan yang dilakukan peneliti di lapangan dapat dikatakan bahwa program sosialisasi memang sangat dibutuhkan dalam segala hal yang berhubungan dengan masyarakat banyak. Karena sukses atau tidaknya program yang dijalankan tergantung pada sosialisasi tentang informasi serta yang berhubungan dengannya yang dalam hal ini yang berhubungan dengan program pupuk bersubsidi.

8. Pelaksanaan Distribusi pupuk bersubsidi pada kelompok koperasi tani

Menurut J.W.Staton (1991:91) menyatakan :

Produsen → pedagang besar → pengecer → Konsumen

Di dalam pasar konsumen mereka merupakan grosir , atau pedagang besar, dan sekaligus pengecer.

Dengan memperhatikan prinsip distribusi yang dikemukakan oleh J.W. Staton inilah langkah yang kemudian diambil dalam tataran pendistribusian pupuk kepada masyarakat. karena kegiatan pendistribusian pupuk tersebut tidak hanya mengandalkan satu lembaga saja tetapi melibatkan berbaagi aspek lembaga baik itu dari pemerintah maupun dari non pemerintah yang kedepannya diharapkan apabila kesemuanya berjalan dengan berkesinambungan dan lancar akan menciptakan alur pendistribusian yang jelas serta tepat sasaran yaitu masyarakat petani .

Hal yang demikian juga ditemukan peneliti di lapangan .Peneliti menemukan fakta bahwa kerjasama antar unsur yang berkepentingan dalam melancarkan pendistribusian pupuk agar sampai pada petani sangat dibutuhkan.Suatu alur yang benar dan lancarlah yang menentukan berjalannya proses pendistribusian pupuk agar dapat sampai pada petani.Disadari ataupun tidak peneliti di lapangan menemukan fakta bahwa ada beberapa unsur yang tidak masuk dalam tataran alur yang telah ada tetapi unsur tersebut sangat membantu dalam kaitannya dengan proses pendistribusian pupuk di kawasan Ponorogo.

Unsur yang dimaksud ialah kelompok tani, disadari ataupun tidak kelompok tanilah yang diantara beberapa fakta yang ditemukan oleh peneliti di lapangan mengatakan bahwa didalam kelompok petani yang ada ditemukan beberapa keuntungan dengan berjalannya kelompok tani tersebut di daerah.Karena tanpa disadari bahwa kelompok tani adalah unsur yang membentuk daripada koperasi tani .Dengan berjalannya kelompok tani yang sehat maka secara tidak langsung akan terbentuk suatu koperasi yang sehat pula .Hal demikianlah yang sedikit

meringankan beban daripada tugas dari dinas yang terkait di kabupaten Ponorogo dalam upaya mendistribusikan pupuk bersubsidi agar sampai pada petani.

Hal lain yang ditemukan peneliti di lapangan ialah bahwa dengan didapatnya data mengenai jumlah kelompok tani yang ada dan yang aktif di kawasan Ponorogo maka pihak dari dinas terkait dapat dengan mudah mengamati jumlah pupuk yang akan dikeluarkan untuk para petani. Yang mana dalam kenyataannya peneliti menemukan fakta bahwa di dalam pendistribusian pupuk di koperasi tani setiap petani yang dalam hal ini yang tercatat sebagai anggota yang diprioritaskan dan yang mana ditemui petani yang tidak atau belum tercatat sebagai anggota koperasi maka akan diupayakan agar dapat dengan segera mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Dengan melihat fakta inilah peneliti dapat menyimpulkan bahwa pendistribusian pupuk di tatanan koperasi petani telah berjalan dengan baik terlepas dari beberapa kekurangan yang timbul dikarenakan sarana dan prasarana yang dapat dikatakan masih sederhana.

Apabila dilihat dari segi sosial maka dapat dikatakan bahwa pupuk dalam hal ini boleh dikatakan mendapat tempat sosial yang tinggi di kalangan masyarakat kita khususnya petani. Oleh karena dirasa sangat penting apabila dalam berjalanya proses pendistribusian pupuk sangat kita harapkan berjalan dengan lancar.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

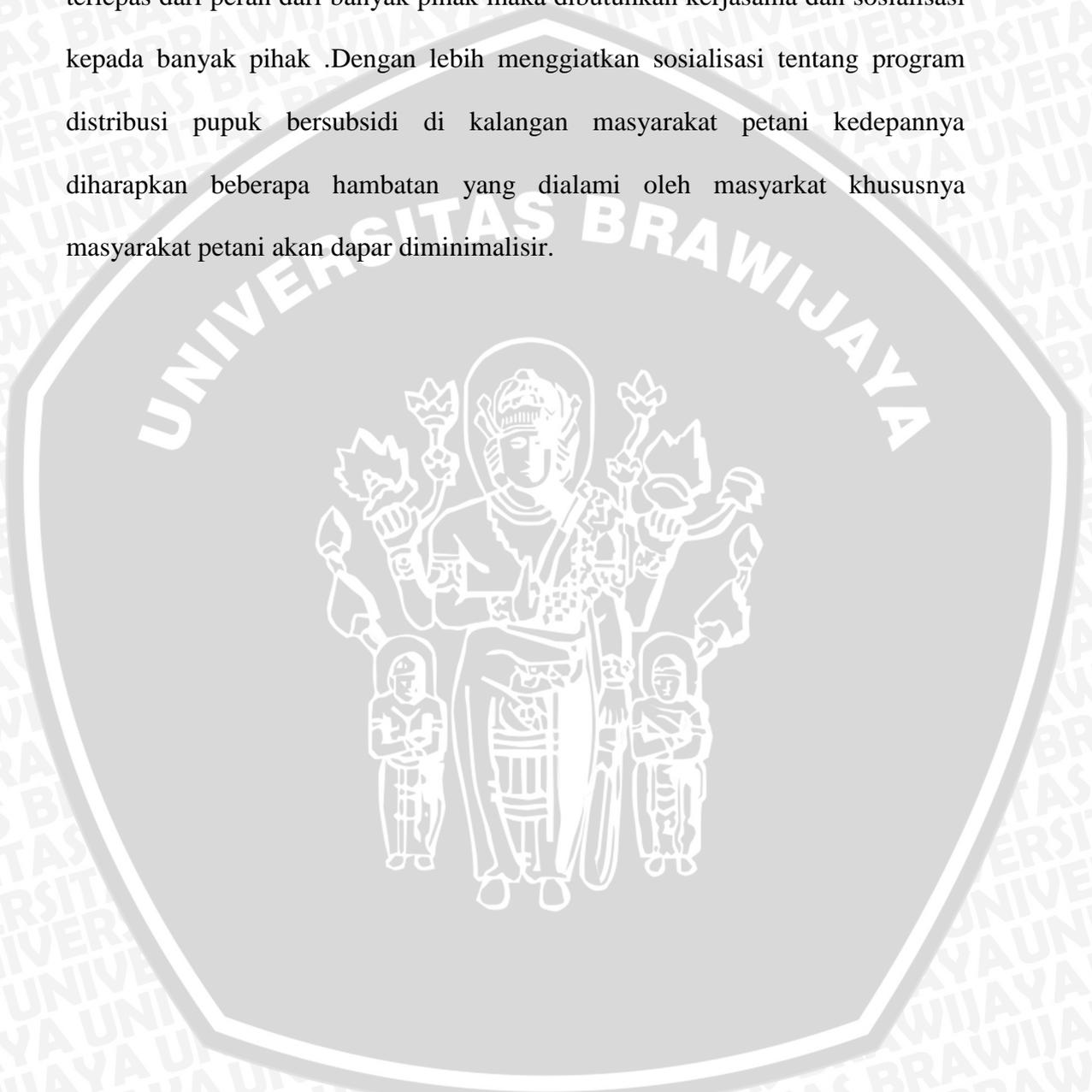
Berdasarkan pada uraian bab- bab sebelumnya diperoleh beberapa kesimpulan yang ditemukan oleh peneliti yang menyangkut tentang seputar pendistribusian pupuk bersubsidi sesuai dengan acuan peraturan yang digunakan yaitu peraturan menteri perdagangan nomor 07/M-DAG/PER/2009 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa :

Pertama, Pelaksanaan pendistribusian oleh pihak yang berwenang yang dalam hal ini dari Dinas Indagkop dan UKM Kabupaten Ponorogo dapat dikatakan telah berjalan dengan baik dengan mengacu pada program yang telah ada yaitu program pengadaan RDKK yang dalam ini melalui program tersebutlah pemerintah dapat memantau masyarakat yang memang membutuhkan besaran pupuk tertentu di daerahnya sesuai dengan besaran pengajuannya yang dalam kaitanya dengan proses pendistribusian pupuk bersubsidi pemerintah pada masyarakat petani ,hal tersebut memang patut dilaksanakan oleh pemerintah apabila menilik tentang fungsi daripada Negara kepada masyarakatnya .

Kedua, Pengoptimalan dari Kelompok Tani. Melalui wadah inilah para petani dapat meminimalisir segala kemungkinan yang dirasa kurang menguntungkan bagi keberlangsungan proses pertanian. Dan dengan wadah inilah kedepannya petani beserta pihak – pihak terkait dapat menanggulangi

permasalahan yang dihadapi seperti halnya dalam hal sulitnya mendapatkan pupuk pertanian yang memang diperuntukan bagi para petani.

Ketiga, Sosialisasi Program. Karena kegiatan pendistribusian ini tidak terlepas dari peran dari banyak pihak maka dibutuhkan kerjasama dan sosialisasi kepada banyak pihak. Dengan lebih menggiatkan sosialisasi tentang program distribusi pupuk bersubsidi di kalangan masyarakat petani kedepannya diharapkan beberapa hambatan yang dialami oleh masyarakat khususnya masyarakat petani akan dapat diminimalisir.



B. SARAN

Beberapa saran yang dapat diberikan dalam mengantisipasi dan upaya penanggulangan permasalahan distribusi pupuk subsidi pertanian adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan distribusi pupuk tidak hanya dilakukan oleh dinas yang terkait saja dalam hal ini dinas Indagkop dan UKM ,tetapi juga melibatkan petani ,kelompok tani ,dan distributor pupuk untuk mengawasi jalannya peredaran pupuk .
2. Sosialisasi dari pihak terkait juga sangat diperlukan dalam menunjang kelancaran daripada proses distribusi pupuk pertanian .Sosialisasi dalam hal ini maksudnya ialah penyosialisasian tentang tata cara akan pengajuan Rencana Definitive Kekompok Kerja (RDKK) kepada pihak Dinas pemerintah atau kota.
3. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh petani yang bersangkutan dalam memperoleh pupuk hendaknya kedepan dapat diperbaiki daripada alur yang mesti ditempuh oleh petani yang bersangkutan.Karena terlihat seakan mempersulit daripada petani dalam kaitannya dengan memperoleh pupuk bersubsidi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adimiharja, Kusnaka dan Hikmat, Harry. 2003. *Participatory reseach appraisal (pengabdian dan pemberdayaan masyarakat)*. Humaniora, Jakarta
- Anonimous. 1999. *Pengadaan dan Distribusi Pupuk Paska Kebijakan Desember 1998*. Laporan Penelitian Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Litbang Departemen Pertanian. Bogor. (Tidak dipublikasi).
- Arifin, B. 2004. *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2000. *Program Pembangunan Nasional 2000 – 2005*, Jakarta.
- Dewa K. S. Swastika, N. Ilham, A. Supriyatna. 1999. *Pengadaan dan Distribusi Pupuk Pasca Deregulasi Kebijaksanaan Desember 1998*. Dalam: Sudaryanto, T., I.W. Rusastra, dan E. Jamal (Penyunting). *Analisis dan Perspektif Kebijaksanaan Pembangunan Pertanian Pasca Krisis Ekonomi. Monograph Series No.20*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.
- Fatich, M. 1997. *Liberalisasi Ekonomi, Berkah ataukah Musibah* (Mengkaji peran Hukum di Era Perdagangan Bebas). Jurnal Ilmiah Buana, Edisi : XIII, Th. 1997: 3 – 8. Universitas Islam Malang.
- Hasibuan, N. 1993. *Ekonomi Industri: Persaingan, Monopoli dan Regulasi*. LP3ES. Jakarta.
- Handerson, J. M. and R. E. Quandt. 1980. *Microeconomic Theory : A Mathematical Approach*. Third Edition. McGraw-Hill International Book Company. London.
- Iqbal, M. Dan T. Sudaryanto. 2008. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dalam Prespektif Kebijakan Pembangunan Pertanian. Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 6 No. 2, Juni 2008: 155-173*.
- Koentjaraningrat. 1991. *Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia. Jakarta.

- Moleong L. J.. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mubaryanto.1998. *Partisipasi dan Demokrasi di Pedesaan*. Suara No.4 Tahun III. PB HMI, Jakarta.
- Miles Mathew B. And Heberman A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. UI Press, Jakarta.
- Siagian, Sondang P. 2003. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Soekartawi, 2004. *Petani Indonesia dalam Menghadapi Persaingan Global*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Stanton, William J, 1991. *Fundamental Of Marketing*. 9th ed. Mc Graw-Hill. Inc
Diterjemahkan oleh Alexander Sindoro.: Penerbit Airlangga. Jakarta
- Stanton, William J, 1995, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, Edisi Ketujuh, Jilid I, Penerbit Airlangga Jakarta
- Tjiptoherijanto, P. 1997. *Prospek Perekonomian Indonesia dalam Rangka Globalisasi*.Rineka Cipta, Jakarta.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 1996. *Birokrasi Pembangunan Masyarakat* dalam Effendi, Sofian et al (Eds), 1996, *Membangun Martabat Manusia: Peranan Ilmu Sosial dalam Pembangunan*, Gajah Mada University Press, Jakarta.
- Yudhoyono, S.B. 2004. *Pembangunan Pertanian dan Perdesaan sebagai Upaya mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran: Analisis Ekonomi-Politik Optimasi Kebijakan Fiskal*. Disertasi Doktor Tidak Dipublikasikan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21M/M-DAG/Per/6/2008 tentang *pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian* .
- Peraturan Bupati Ponorogo nomor 57 tahun 2008 tentang *uraian Tugas dan fungsi Dinas Industri ,Perdagangan ,Koperasi dan Usaha kecil menengah Kabupaten Ponorogo*.
- Peraturan Menteri Pertanian nomor : 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang *pedoman kelembagaan petani*.

- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 106/Kpts/SR.130/2/2004 tentang *kebutuhan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dan Nomor 64/Kpts/SR.130/3/2005*
- <http://www.deptan.go.id/ditjentan/pedum/pedumsubsidi10.pdf>
- <http://www.deptan.go.id/pengumuman/permentan42/permentan-no42-2008.pdf>.



INTERVIEW GUIDE

- Peneliti : Ihwan Dadang Setyo Prayitno
- Tujuan : Penelitian Skripsi
- Sasaran : Kantor Dinas Indagkop dan UKM Kabupaten Ponorogo dan Masyarakat Petani di daerah Kabupaten Ponorogo.
- Materi : Tanggapan Masyarakat Mengenai Pelaksanaan Distribusi Pupuk kepada para petani khususnya pada Kabupaten Ponorogo.

1. Bagaimanakah tanggapan masyarakat petani tentang mekanisme pendistribusian pupuk pertanian
2. Bagaimanakah tanggapan masyarakat tentang penilaian kriteria bagi yang berhak memperoleh pupuk bersubsidi
3. Bagaimanakah tanggapan dari pegawai dinas Indagkop mengenai Peran dari Kelompok Tani dalam pengawasan atas pelaksanaan distribusi pupuk pertanian di Kabupaten Ponorogo.
4. Bagaimanakah tanggapan dari pihak pengecer serta distributor mengenai sistem penyaluran pupuk bersubsidi.
5. Bagaimanakah tanggapan masyarakat mengenai Peran dari Dinas Indagkop selaku pengawas daripada proses pendistribusian pupuk pada kawasan Pertanian di Kabupaten Ponorogo.
 - a) Bagaimana realisasi daripada program RDKK.
 - b) Pengaruh yang ditimbulkan daripada program RDKK.
6. Bagaimanakah tanggapan dari masyarakat mengenai realisasi dari program pupuk bersubsidi bagi perkembangan pertaniannya ,khususnya dalam hal perolehan pupuk dan syarat Pengajuan RDKK.

LAMPIRAN**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 07/M-DAG/PER/2009****TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA****NOMOR -21/M-DAG/PER/6/2008 TENTANG PENGADAAN DAN
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN****Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 Tentang Pengadaan dan Penyalutan Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian diubah sebagai berikut :

1. Kata “pengadaan dan” atau pengadaan “ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3), dan pasal 15 ayat (4) dan ayat (5) dihapus .
2. Ketentuan pasal 1 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal I

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaannya dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian.
2. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan ,hortikultura , perkebunan rakyat ,hijauan pakanan ternak dan budidaya ikan / udang.
3. Program khusus Pertanian adalah program yang dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Dinas Pertanian Kota /Kabupaten atau kelembagaan

Petani untuk usaha budidaya tanaman yang anggarannya telah disediakan oleh Pemerintah dan/lembaga lainnya.

4. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura termasuk perkebunan yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat dengan skala usaha yang tidak mencapai skala tertentu, peternak yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakanan ternak yang tidak dipersyaratkan memiliki izin usaha dan pembudidaya ikan / udang yang tidak dipersyaratkan memiliki izin usaha.
5. Kelompok Tani adalah kumpulan petani, pekebun, peternak, atau pembudidaya ikan/ udang yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian ,untuk bekerjasama meningkatkan produktifitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan dan kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati/ Walikota setempat atau pejabat yang ditunjuk.
6. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luas area usaha tani yang diusahakan petani, pekebun,peternak dan pembudidaya ikan/ udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
7. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi Pupuk anorganik yaitu Pupuk Urea ,SP-36, superphos, ZA, NPK, dan Pupuk Organikdi dalam negeri.
8. Distributor adalah perusahaan perorangan atau badan usaha , baik berbentuk badan badan hukum ataupun bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen untuk melakukan pembelian ,penyimpanan, penyaluran dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya untuk dijual kepada Petani dan/kelompok tani melalui pengecer yang ditunjukmya .

9. Surat perjanjian Jual Beli yang selanjutnya disebut SPJB adalah kesepakatan kerjasama yang mengikat antar Produsen dengan distributor dengan Pengecer yang memuat hak dan kewajiban masing-masing dalam pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Petani / Kelompok tani berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Pemerintah.
10. Pengecer resmi yang selanjutnya disebut Pengecer adalah Perseorangan ,kelompok tani ,dan badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau yang bukan badan hukum yang berkedudukan di kecamatan /desa , yang ditunjuk oleh Distributor dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya secara langsung hanya kepada Petani dan/ kelompok Tani.
11. Pengadaan adalah proses penyediaan Pupuk Bersubsidi oleh Produsen yang berasal dari produksi dalam negeri dan/ impor.
12. Penyaluran adalah proses pendistribusian Pupuk Bersubsidi dari Produsen sampai dengan petani dan/kelompok tani sebagai konsumen akhir.
13. Wilayah tanggung jawab adalah Provinsi atau Kabupaten Kota /desa yang menjadi tanggung jawab dari Produsen ,Distributor , dan Pengecer dalam Pengadaan dan atau penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan /kelompok tani.
14. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri Peretanian untuk penjualan tunai .

LAMPIRAN

FOTO- FOTO LAPANGAN



Salah satu distributor pupuk di Ponorogo



Masyarakat pengguna pupuk bersubsidi



Pendistribusian pupuk bersubsidi



Pupuk bersubsidi di tangan pengecer



Kegiatan di salah satu distributor pupuk



Kegiatan di salah satu distributor pupuk





Kantor Dinas Industri Perdagangan dan UKM Kabupaten Ponorogo,berada pada Lt..7



CURRICULUM VITAE

Nama : Ihwan Dadang Setyo Prayitno
 Tempat dan Tanggal Lahir : Ponorogo, 18 Agustus 1987
 Alamat Asal : Kelurahan Keniten ,Kecamatan Ponorogo,
 Kabupaten Ponorogo

RT.01/RW.02

Pendidikan	1. 1993-1994	TK Bustanul Aqfal Aisyah
	2. 1994-2000	SD Negeri Bangunsari 1
	3. 2000-2003	SMP Negeri 1 Ponorogo
	4. 2003-2006	SMA Negeri 3 Ponorogo
	5. 2006-2010	Universitas Brawijaya Malang

